KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

LAPORAN HASIL EVALUASI

PEMIILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

Pengarah : Mohamad Ihsan, Ahmad Suja'i, Aas Satibi, M. Ali Zaenal Abidin, M. Agus Muslim, Akhmad Subagja, A. Munawar, Ferry Syahminan

Penyusun : H. Agus Supriyadi, Karni Kumalasari, Eka Rafianto, Danny Widodo Uji Prakoso, Isnaini Ayub, Agus Diansyah

Editor : Karni Kumalasari, Danny Widodo Uji Prakoso

Desain Sampul : Enggartiasto

Penata Letak : Agus Diansyah, Isnaini Ayub

Penerbit :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Jl. Syeh Al Bantani Nomor 7A Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten.
Telp./Fax. (0254) 216106 | Website: banten.kpu.go.id

Cetakan Pertama, Maret 2025

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

SAMBUTAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perwujudan demokrasi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia dalam politik. Melalui Pikada tahun 2024 sebagai wadah fasilitas bagi masyarakat untuk beradu gagasan untuk menguji kelayakan seseorang sebagai calon pemimpin daerah.

Amanat undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan bagi KPU adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 adalah kegiatan untuk meninjau dan menilai pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan hambatan yang muncul selama proses penyelenggaraan. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan mengenali keberhasilan serta faktor-faktor pendukungnya, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilihan di masa depan.

Buku **"Laporan Hasil Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024"** hadir sebagai kajian komprehensif mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini mencakup berbagai dimensi evaluasi, yaitu pelaksanaan tahapan pemilu, kegiatan non tahapan pemilu, serta kelembagaan penyelenggara pemilu, yang meliputi dukungan fasilitasi untuk pelaksanaan baik tahapan maupun non-tahapan pemilu. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja KPU dalam menjalankan tahapan pemilu.

Evaluasi ini bertumpu pada teori *Electoral Integrity* sebagai teori utama, yang didukung oleh teori *Electoral Management Body* dan teori Manajemen Pemilu, yang digunakan sebagai pijakan evaluasi untuk menghindari adanya penilaian subyektif. Hal ini bertujuan untuk menyediakan potret penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dari berbagai sudut pandang para stakeholder untuk menghasilkan data yang komprehensif dan melahirkan rekomendasi yang baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang akan datang.

Secara garis besar, buku ini menghasilkan berbagai kajian evaluasi dari berbagai dimensi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 berikutnya. Evaluasi mencakup tata kelola pendaftaran pemilih, koordinasi antar lembaga, penguatan sosialisasi untuk peserta maupun pemilih, aspek regulasi dan anggaran, hingga evaluasi penggunaan teknologi informasi yang telah digunakan oleh KPU Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pemilihan yang efektif dan transparan.

Melalui laporan evaluasi ini, besar harapan kami agar buku ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mewujudkan pemilu selanjutnya yang berintegritas. Buku ini tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah ditingkat provinsi, namun juga ditujukan kepada masyarakat yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap pemenuhan hak asasi politik. Tentunya, buku ini tidak luput dari kekurangan yang ada di dalamnya, sehingga laporan ini turut membuka kesempatan untuk lahirnya kajian terbaru untuk melengkapi hasil analisis yang tercantum di dalam buku ini, demi mewujudkan wadah demokrasi yang sempurna.

Serang, 17 Maret 2025
Ketua KPU Provinsi Banten

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PROVINSI BANTEN

Mohamad Ihsan

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

PENGANTAR

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebagai langkah perwujudan nilai demokrasi telah diselenggarakan dan secara keseluruhan dinilai dapat terlaksana dengan baik. Terlepas dari penilaian itu, tentu terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai daerah dalam wilayah Provinsi Banten. Hal tersebut menjadi landasan dibuatnya suatu evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 untuk menghadirkan serangkaian potret penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam ragam dimensi beserta evaluasi dan rekomendasinya, sebagai pijakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Proses penyelenggaraan evaluasi ini diawali dengan penginputan instrumen evaluasi yang mencakup desain evaluasi, dimensi dan indikator evaluasi, instrumen penggalian data, metode analisa dan sistematika laporan hasil evaluasi. Proses penggalian data kuantitatif telah dilakukan di tingkat KPU Provinsi Banten, dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten melalui *google form*. Data tersebut diproses melalui pengolahan dan analisa sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi. Data kuantitatif diolah berdasarkan instrumen yang sudah diisi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk diagram, chart maupun tabel-tabel. Sedangkan data kualitatif diolah dari daftar pertanyaan terbuka dalam instrumen dan dilengkapi dengan penajaman melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat KPU Provinsi Banten.

Acara kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Rapat Evaluasi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tahapan dan Penyusunan Buku Laporan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2025, bertempat di Aston Serang Hotel & Convension Centre, Banten.

Dalam rangka melengkapi hasil analisis dalam buku Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, maka patut untuk dicantumkan beberapa rekomendasi atas hasil pengamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Rekomendasi disusun berdasarkan dimensi evaluasi yang telah disusun dalam buku ini, meliputi rekomendasi untuk tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan, dan eksternal.

Adapun beberapa rekomendasi yang dikeluarkan meliputi: perbaikan/penyempurnaan regulasi teknis; peningkatan kerja sama dengan pemerintah; perbaikan tata kelola pengadaan dan distribusi logistik melalui sistem monitoring; sosialisasi pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat; Keleluasaan secara bertanggungjawab bagi KPU Provinsi Banten dalam perencanaan dan penganggaran; perbaikan sistem rekrutmen dan penyederhanaan persyaratan calon Badan Ad-hoc;

peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan komisioner dan staf; pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi, dan; penguatan komunikasi dan regulasi dengan DPR dan Pemerintah, serta pertimbangan masa keberlakuan putusan lembaga peradilan (MK dan DKPP) khususnya permohonan yang berkaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Secara garis besar, buku Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 ini memberikan wawasan yang mendalam tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 yang dianalisis berdasarkan data dan teori yang dijadikan landasan utama, serta menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk berjalannya pemilu yang akan datang. Besar harapan kami agar hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif, demi mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Serang, 17 Maret 2025
Ketua KPU Provinsi Banten

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PROVINSI BANTEN

Mohamad Ihsan

DAFTAR ISI

Tim Penyusun ..... **i**
Sambutan ..... **ii**
Pengantar ..... **iv**
Daftar Isi ..... **vi**
Daftar Tabel ..... **vii**
Daftar Gambar ..... **ix**
Daftar Istilah ..... **xiii**
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ..... **xv**
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Tujuan 4
1.4 Manfaat 5
BAB II DESAIN EVALUASI PILKADA 2024 ..... **7**
2.1 Kriteria Evaluasi 7
2.2 Prinsip Evaluasi 10
2.3 Metode Evaluasi Pilkada Provinsi Banten 10
BAB III LANDASAN TEORI **39**
3.1 Teori Integritas Pemilu 39
3.2 Teori Manajemen Pemilu 42
3.3 Teori Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 50
BAB IV HASIL EVALUASI **53**
4.1 Deskripsi Statistik 53
4.2 Analisa Data 75
4.3 Hambatan dan Kendala 194
4.4 *Success Stories, Lesson Learned dan Best Practice* 195
BAB V SIMPULAN DAN SARAN **197**
Simpulan 197
Saran 198
BAB VI PENUTUP **201**
DAFTAR PUSTAKA **203**

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	*Desain* Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	9
Tabel	2.2	*Logical Framework* Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024	10
Tabel	2.3	Skema Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024	11
Tabel	2.4	Dimensi, Indikator, Sub-Indikator dan Pertanyaan Evaluasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	14
Tabel	4.1	Jumlah DPT di Provinsi Banten	91
Tabel	4.2	Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara	92
Tabel	4.3	Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Banten.....	94
Tabel	4.4	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Banten	95
Tabel	4.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih di TPS Lokasi Khusus pada Provinsi Banten	96
Tabel	4.6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-30 Provinsi Banten	98
Tabel	4.7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-7 Provinsi Banten	98
Tabel	4.8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Provinsi Banten	99
Tabel	4.9	Data Pendaftaran paslon di silon Provinsi Banten	110
Tabel	4.10	Data Rekapitulasi Pendaftaran paslon di Provinsi Banten	114
Tabel	4.11	Jadwal Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024	127
Tabel	4.12	Materi Debat Terbuka Pasangan Calon	136
Tabel	4.13	Kegiatan Sosialisasi	155
Tabel	4.15	Evaluasi Penerapan SOP pada KPU Provinsi Banten	166
Tabel	4.16	Evaluasi Penerapan SOP pada KPU Provinsi Banten.....	166
Tabel	4.17	Lokasi Pelaksanaan Tes Tertulis Badan Adhoc PPK berbasis CAT	174
Tabel	4.18	Lokasi Pelaksanaan Tes Wawancara Badan Adhoc PPK	175
Tabel	4.19	Lokasi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Badan Adhoc PPK se-Provinsi Banten	175
Tabel	4.20	Jumlah Badan Adhoc PPK se-Provinsi Banten	175
Tabel	4.21	Jumlah Sekretariat Badan Adhoc PPK se-Provinsi Banten	176
Tabel	4.22	Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPS untuk Pilkada 2024	177

Tabel 4.23 Lokasi Pelaksanaan Tes Tertulis PPS untuk Pilkada 2024 ……. 180
Tabel 4.24 Lokasi Pelaksanaan Tes Wawancara PPS untuk Pilkada 2024 181
Tabel 4.25 Lokasi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah PPS…… 182
Tabel 4.26 Jumlah Badan Adhoc PPS se-Provinsi Banten ……. 182
Tabel 4.27 Jumlah Sekretariat PPS se-Provinsi Banten …… 183
Tabel 4.28 Jadwal Pembentukan Pantarlih …… 184
Tabel 4.29 Jumlah Pantarlih se-Provinsi Banten 185
Tabel 4.30 Jadwal Pembentukan KPPS ……. 186
Tabel 4.31 Masa Kerja KPPS …….. 187
Tabel 4.32 Matrik Evaluasi Kerja Sama antara KPU Provinsi Banten dengan Instansi Lain 193

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan memberikan sambutan dalam FGD Evaluasi Pemilu 2
Gambar 1.2 Ketua KPU Republik Indonesia, memberikan pengarahan dalam FGD Evaluasi Pemilu 3
Gambar 1.3 Ahmad Suja'i menekankan pentingnya evaluasi sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pemilihan di masa mendatang.... 4
Gambar 1.4 Ahmad Subagja menekankan evaluasi bukan hanya melaksanakan seremonial, evaluasi harus menjadi refleksi dari semua kegiatan..... 5
Gambar 1.5 M. Agus Muslim menekankan laporan penyelenggaraan pilkada disusun dengan merangkum fakta-fakta yang ada dalam penyelenggaraan pilkada……..... 5
Gambar 1.6 Narasumber, Ahsanul Minan memberikan penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam analisis instrumen evaluasi pemilihan 2024..... 6
Gambar 2.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Tahap Pertama Pengisian Instrumen Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024……. 36
Gambar 2.2 Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan memimpin Rapat Pleno finalisasi hasil kuesioner evaluasi..... 36
Gambar 2.3 Perwakilan dari KPU Kab/Kota memberikan pandangan dan masukan mengenai tahapan selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 37
Gambar 2.4 Perwakilan dari stakeholder ikut memberikan pandangan dan masukan mengenai tahapan selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 37
Gambar 2.5 Perwakilan dari peserta dari Sekretariat KPU Provinsi Banten..... 38
Gambar 2.6 Sesi Foto Bersama Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin 38
Gambar 4.1 Infografis Jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 …… 81
Gambar 4.2 Infografis Tingkat Partisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 …… 82
Gambar 4.3 Infografis Jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 …….. 84
Gambar 4.4 Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afiffudin memonitoring kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 …… 100

Gambar 4.5 KPU Provinsi Banten menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024, Airin-Ade Sumardi……. 105
Gambar 4.6 KPU Provinsi Banten menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024, Andra Soni- A.Dimyati….. 105
Gambar 4.7 Tim verifikasi KPU Provinsi Banten memverifikasi berkas pendaftaran dari bakal paslon……..... 114
Gambar 4.8 Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 ……. 116
Gambar 4.9 H. Ade Sumardi mendapat giliran pertama pengambilan Nomor Urut 118
Gambar 4.10 H. R. Achmad Dimyati Natakusumah mendapat giliran kedua pengambilan Nomor Urut …… 119
Gambar 4.11 Hasil dari Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur Banten …… 120
Gambar 4.12 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur Banten …… 120
Gambar 4.13 Pasangan Calon Airin Rachmi Diany- Ade Sumardi pada acara Deklarasi Kampanye Damai 123
Gambar 4.14 Pasangan Calon Andra Soni-A. Dimyati Natakusumah pada acara Deklarasi Kampanye Damai 123
Gambar 4.15 Sambutan dari Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar pada Deklarasi Kampanye Damai 124
Gambar 4.16 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai 125
Gambar 4.17 Memainkan angklung sebagai simbol Kampanye Damai dimulai 125
Gambar 4.18 Naskah Deklarasi Kampanye Damai 126
Gambar 4.19 Sambutan Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan pada Debat Pertama..... 129
Gambar 4.20 Serah Terima soal debat yang mengusung tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Trans TV …… 130
Gambar 4.21 Moderator Debat Pertama …… 131
Gambar 4.22 Prosesi Debat Pertama dari masing-masing pasangan calon, Airin-Ade Sumardi dan Andra Soni-A. Dimyati…… 131
Gambar 4.23 Sambutan Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan pada Debat Kedua..... 132
Gambar 4.24 Pengambilan soal debat pada Debat Kedua 133
Gambar 4.25 Moderator Debat Kedua …… 133
Gambar 4.26 Prosesi Debat Kedua dari masing-masing pasangan calon, Airin-Ade Sumardi dan Andra Soni-A. Dimyati…… 134

Gambar 4.27 Penyerahan Soal Debat Ketiga dari Panelis, Suwaeb Amirudin kepada Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan……... 135
Gambar 4.28 Moderator Debat Ketiga …… 135
Gambar 4.29 Pasangan calon, Airin dan Andra Soni pada Debat Ketiga ……. 136
Gambar 4.30 Pemungutan Suara Ulang pada TPS 12 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang..... 137
Gambar 4.31 Kadiv Perencanaan dan Logistik, Ahmad Suja'i melakukan monitoring Kesiapan Logistik di Gudang Logistik KPU Kab Serang..... 139
Gambar 4.32 Monitoring pembuatan kotak dan bilik suara ke pabrik PT Surya Prima Semesta, Sidoarjo, Jawa Timur 140
Gambar 4.33 Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat Memonitoring ke gudang logistik KPU Kab Serang didampingi para pimpinan KPU Provinsi Banten.... 141
Gambar 4.34 Maskot Bara dan Jara 143
Gambar 4.35 Band Lokal Banten "Soulego" karya Adhitya Angga Pratama Menyanyikan jinggle Pilkada Banten 2024 "Sayangi Bantenmu, Coblos Pilihanmu"..... 144
Gambar 4.36 Jambore Kepemiluan 146
Gambar 4.37 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan membuka Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pilkada Serentak 2024..... 157
Gambar 4.38 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pilkada Serentak 2024 tanggal 2 s.d 3 Oktober 2024 di Trembesi Hotel 158
Gambar 4.39 Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten, M. Agus Muslim membuka Kegiatan Bimtek Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024..... 159
Gambar 4.40 Sesi Tanya Jawab mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pemilu Tahun 2024..... 160
Gambar 4.41 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan membuka acara Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Jawaban Sengketa Hukum di Mahkamah Konstitusi..... 161
Gambar 4.42 Peserta Rapat Koordinasi dari KPU Kabupaten Serang didampingi Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sedang menyusun jawaban PHPU 162
Gambar 4.43 Peserta Rapat Koordinasi dari KPU Kabupaten Pandeglang didampingi Kadiv Data dan Informasi, A. Munawar sedang menyusun jawaban PHPU 162
Gambar 4.44 Peserta Rapat Koordinasi dari KPU Kota Tangerang Selatan didampingi peserta dari tim hukum KPU Provinsi Banten sedang menyusun jawaban PHPU 163
Gambar 4.45 Penandatanganan NPHD Pilkada Tahun 2024 169

Gambar 4.46 Nilai NPHD KPU Provinsi Banten 169
Gambar 4.47 Pendaftaran Calon Anggota PPK Kabupaten Lebak 172
Gambar 4.48 Tes Tertulis Calon Anggota PPK Kota Cilegon 173
Gambar 4.49 Pendaftaran Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Pandeglang……. 178
Gambar 4.50 Tes Tertulis Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Lebak…… 179
Gambar 4.51 Pelantikan PPS KPU Kabupaten Tangerang …… 181
Gambar 4.52 Pendaftaran Pantarlih Kota Cilegon …… 184
Gambar 4.53 Pelantikan Pantarlih Serentak di Kota Tangerang Selatan yang dihadiri Anggota KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos 185
Gambar 4.54 Pelantikan KPPS Kecamatan Kedaleman Kota Cilegon …… 187
Gambar 4.55 Alur Penggunaan SIAKBA …… 191

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

DAFTAR ISTILAH

Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
Pantarlih	:	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Satker	:	Satuan Kerja
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
Panwaslu	:	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
DCS	:	Daftar Calon Sementara
DCT	:	Daftar Calon Tetap
DP4	:	Daftar Penduduk Potensial Pemilihan
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	:	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPTb	:	Daftar Pemilih Pindahan
DPK	:	Daftar Pemilih Khusus
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KK	:	Kartu Keluarga
IKD	:	Identitas Kependudukan Digital
Rutan	:	Rumah Tahanan
Pemantau Pemilihan	:	Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
Jingle	:	Lagu pendek atau nada yang digunakan untuk keperluan Komersial.
Tagline	:	Kalimat pendek yang digunakan untuk mewakili identitas merek, menyampaikan pesan, dan memotivasi konsumen.

Maskot	:	Simbol atau bentuk, bisa berupa orang, hewan, atau benda, yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas, seperti tim, perusahaan, sekolah, atau acara khusus, dan dianggap dapat membawa keberuntungan serta menyemarakkan suasana.
Bara	:	Banten Bersuara
Jara	:	Jaga Suara
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Kampanye	:	Kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon
Dana Kampanye	:	Sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
RKDK	:	Rekening Khusus Dana Kampanye
LADK	:	Laporan Awal Dana Kampanye
LPSDK	:	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPPDK	:	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Asersi	:	Pernyataan yang dibuat Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
AP	:	Akuntan Publik
Paslon	:	Pasangan Calon
Sidalih	:	Sistem Informasi Daftar Pemilih
Silonkada	:	Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah
Silog Pilkada	:	Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Sikadeka	:	Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye
SIAKBA	:	Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc
SPSE	:	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
PSU	:	Pemungutan Suara Ulang
PSL	:	Pemungutan Suara Lanjutan
PHPU	:	Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Ormas	:	Organisasi Masyarakat

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tugas dan dan kewajiban KPU Provinsi Banten yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 11 huruf s adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur.

. Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems.*[1] Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan untuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan.

[1] Dunn, William. 2

014. Public Policy Analysis: Dunn 5th Edition. Pearson Education Limited. Essex. Hal. 2

Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan tahapan pilkada, non-tahapan pilkada, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pilkada), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU Provinsi Banten menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan di KPU Provinsi Banten. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Banten.

Dalam perjalanannya, untuk memperoleh data yang akurat dan valid untuk kemudian diolah dan analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mana data kuantitatif diolah berdasarkan instrumen yang sudah diisi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk diagram, chart maupun tabel-tabel sedangkan data kualitatif diolah dari daftar pertanyaan terbuka dalam instrumen dan dilengkapi dengan penajaman melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat KPU Provinsi Banten. Acara kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2025, bertempat di Aston Serang Hotel & Convension Centre, Banten.

Gambar 1. 1 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan memberikan sambutan dalam FGD Evaluasi Pilkada

Gambar 1. 2 Ketua KPU Republik Indonesia, Mohamad Ihsan memberikan pengarahan dalam FGD Evaluasi Pilkada

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Dinas Ketua KPU Nomor 131/PL.02-SD/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Pilkada Tahun 2024;
6. Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 131/PL.02-SD/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Laporan Pilkada Tahun 2024;
7. Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal *Focus Group Discussion (FGD)* Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.

1.3 TUJUAN

1 Menilai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Provinsi Banten baik dari aspek tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan;

2 Membangun model dan standar evaluasi pemilihan yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilihan di masa mendatang.

Gambar 1. 3 Ahmad Suja'i menekankan pentingnya evaluasi sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pemilihan di masa mendatang

Gambar 1. 4 Ahmad Subagja menekankan evaluasi bukan hanya melaksanakan seremonial, evaluasi harus menjadi refleksi dari semua kegiatan.

Gambar 1. 5 M. Agus Muslim menekankan laporan penyelenggaraan pilkada disusun dengan merangkum fakta-fakta yang ada dalam penyelenggaraan pilkada

1.4 MANFAAT

Evaluasi ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilihan, yang mencakup pemerintah daerah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, melalui evaluasi ini, akan diperoleh model dan standar yang akan dapat dipergunakan KPU Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi pemilihan di masa mendatang.

Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Evaluasi pemilihan tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil evaluasi pemilu serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU.

Gambar 1. 6 Narasumber, Ahsanul Minan memberikan penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam analisis instrumen evaluasi pemilihan 2024

BAB II
DESAIN EVALUASI PILKADA 2024

2.1 KRITERIA EVALUASI

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu Program/rencana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 ini dimaknai sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. kegiatan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 ini dilakukan secara *ex-post evaluation*.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1 Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;

2 Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;

3 Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (*ex-ante*);

4 Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan 11 yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering kali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1 Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya;

2 Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;

3 Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;

4 Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;

5 Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;

6 Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1 Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2 Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3 Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

Secara garis besarnya desain evaluasi pilkada dapat dijabarkan sebagai berikut:

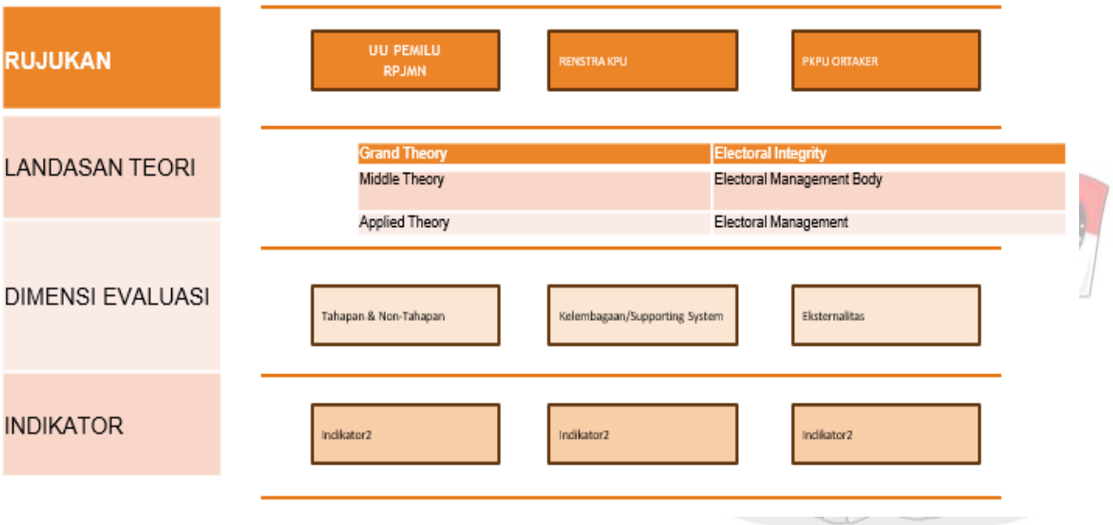

Tabel 2.1 *Desain* Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024

2.2 PRINSIP EVALUASI

Evaluasi Pilkada Serentak KPU Provinsi Banten Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing sub bagian di KPU Provinsi Banten dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self-assessment combined with evidence-based evaluation*).
2. Prinsip *comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh sub bagian di KPU Provinsi Banten, Pakar dari KPU Republik Indonesia sebagai narasumber, KPU Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Banten, dan stakeholder pada Pemilihan Tahun 2024 diantaranya Bawaslu Provinsi Banten. Lembaga Pemantau Pemilihan, Media Massa (cetak dan elektronik), Peserta Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Banten.

2.3 METODE EVALUASI PILKADA PROVINSI BANTEN

A. Kerangka Kerja Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 dibuat berdasarkan sebuah konstruksi alur berpikir evaluasi. Penyusunan konstruksi alur berpikir (*logical framework*) dalam pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur, logis dan sistematis.

Adapun logika berpikir dalam penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

RUJUKAN	**UU Pemilu dan PKPU**	**Renstra KPU**	**PKPU Ortaker**
LANDASAN TEORI	***Grand Theory***: Teori *Election Integrity*		
	Middle Theory: Teori *Election Management Body*		
	Applied Theory: Teori Manajemen Pemilu		
DIMENSI EVALUASI	Tahapan dan Non-Tahapan Pemilihan	Supporting Systems (kelembagaan)	Eksternalitas
INDIKATOR			

Tabel 2.2 *Logical Framework* Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024

Rujukan yang dimaksud dalam penyelenggaraan evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pemilihan yang dipedomani dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, baik dalam konteks penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu, maupun dalam konteks penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilu oleh sekretariat KPU. Oleh karenanya, salah satu acuan penilaian yang dipergunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah UU Pemilu, Peraturan KPU, Keputusan KPU, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Landasan teori dipergunakan untuk menjadi dasar pijakan dalam mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Kedudukan landasan teori ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific judgement*) dan menghindari penilaian secara subyektif. Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas tiga tingkatan teori, yakni *grand theory* (teori dasar sekaligus utama) berupa teori integritas pemilu; *middle theory* yakni teori kelembagaan organisasi penyelenggara pemilu (*theory of Electoral Management Body/EMB*); dan ketiga *applied theory* yakni teori manajemen pemilu (*theory of Electoral Management*). Penjelasan secara lebih mendalam tentang landasan teori ini dijabarkan di dalam Bab III.

Secara garis besarnya skema evaluasi pilkada dapat dijabarkan sebagai berikut:

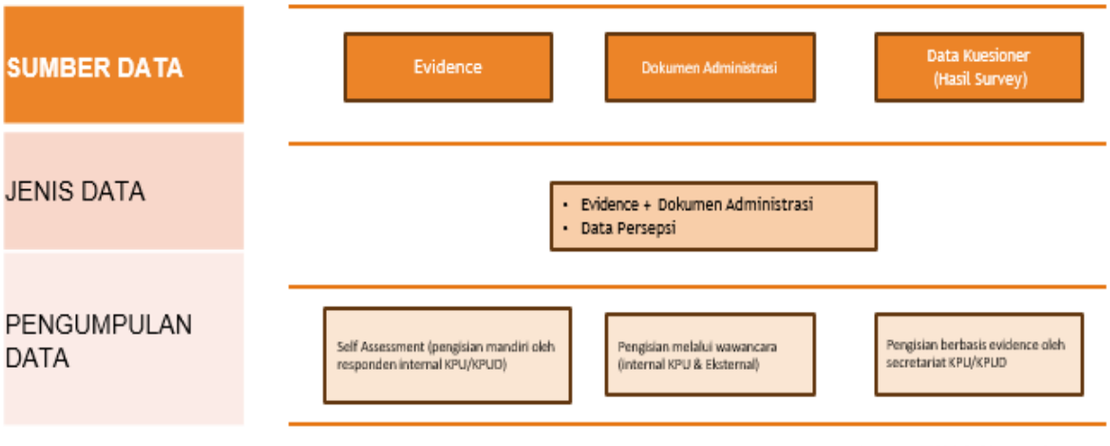

Tabel 2.3 Skema Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024

Ruang lingkup Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024, mencakup 3 (tiga) dimensi dan beberapa indikator.

Dimensi evaluasi:

a. Dimensi Tahapan terdiri dari:

1. Evaluasi penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada.
2. Pemberian Advokasi Hukum dan penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum.
3. Pembentukan Badan Adhoc kepatuhan).
4. Pembentukan Badan Adhoc (kinerja), Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Kampanye dan Dana Kampanye.
6. Pemungutan dan Perhitungan Suara.
7. Penetapan Hasil Pemilihan.
8. Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih:
   - Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
   - Evaluasi Tahapan Pemutakhiran.
   - Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT.
   - Jumlah/Persentase layanan pindah memilih.
   - Perubahan penetapan DPT.
9. Instrumen Tugas Pantarlih:
   - Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk.
   - Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit.
10. Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih:
    - Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada.
    - Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada.
11. Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih:
    - Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada.
    - Evaluasi pengisian Sirekap Pilkada.
    - Evaluasi penyelenggaraan Bimktek Sirekap Pilkada

b. Dimensi Non Tahapan terdiri dari:

1. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada.
2. Regulasi Logistik Pilkada.
3. Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada.
4. Anggaran Logistik Pilkada.
5. Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada.
6. Persiapan Distribusi Logistik.

c. Dimensi Kelembagaan yang mencakup:

1. Terwujudnya Sistem Adminitsrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.
2. Terwujudnya Sistem Adminitsrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.
3. Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada(melalui medsos dan website KPU).
4. Indeks Partisipasi Pemilu.
5. Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklihparmas.
6. Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri.
7. Pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc.
8. Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024.
9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc.
10. Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah.
11. Laporan Keuangan KPU yang berkualitas.
12. Pengelolaan Persediaan Pilkada.
13. Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana.
14. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
17. Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024.
18. Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota.

d. Dimensi Eksternalitas yang mencakup:

1. Instrumen Produksi Logistik Pilkada:
   - Pelaksanaan produksi logistik Pilkada.
   - Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota.

2. Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota:
   - Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota.
3. Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS:
   - Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS.
4. Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada:
   - Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada.
   - Proses pengelolaan logistik Pilkada di tempat penyimpanan logistik Pilkada/Gudang.
   - Penghapusan Surat Suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.

Dari 4 (empat) dimensi evaluasi tersebut, diturunkan ke dalam indikator penilaian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner evaluasi.

Adapun dimensi, indikator dan sub-indikator yang dipergunakan dalam evaluasi pemilu di tingkat satker KPU Provinsi Banten adalah:

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
DIMENSI TAHAPAN			
Indikator Perencanaan dan Organisasi	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada	Persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan	1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilhan sesuai kebutuhan? 2. Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)? 3. Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan? 4. Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	5. Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya? 6. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran? 7. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?
Indikator Hukum	Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.	1. Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
	pelayanan pertimbangan hukum		
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	2. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	3. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? 4. Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi? 5. Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan? 6. Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti? 7. Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud? 8. Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud? 9. Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggara kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)? 10. Jika ADA, berapa jumlahnya? 11. Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum? 12. Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum? 13. Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?
	Pembentukan Badan Adhoc (kepatuhan)	Persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	1. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? 2. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?
	Pembentukan Badan Adhoc (kinerja)	Persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	3. Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? 4. Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? 5. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
			6. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?
	Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	1. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	2. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	3. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	4. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	5. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	6. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan.
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang	7. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		dilakukan penelitian administratif perbaikan	Partai Politik dan Jalur Perseorangan
		Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian adminstratif dan penelitian administratif perbaikan	8. Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	9. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan
		Pelanggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada	10. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada? 11. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan? 12. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?
	Kampanye dan Dana Kampanye	Pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13. Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan? 14. Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU? 15. Jika TIDAK, sebutkan alasannya! 16. Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? 17. Jika TIDAK, sebutkan alasannya! 18. Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon
		Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	19. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri? 20. Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!
		Rencana Kampanye yang sudah dibuat dalam SIkadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	21. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? 22. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon	23. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya? 24. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK	25. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu? 26. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu? 27. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?
		Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK	28. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK? 29. Jika ADA, sebutkan!
		Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK.	30. Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK? 31. Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!
		Kendala Dalam Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK? 33. Jika ADA, sebutkan jumlahnya! 34. Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?
		Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik.	35. Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elekronik? 36. Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elekronik?
		Pelanggaran dan Sengketa dalam	37. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		tahapan kampanye Pilkada	Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada? 38. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye? 39. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?
	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal	40. Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? 41. Jika ADA, apa penyebabnya?
		Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada	42. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada? 43. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara? 44. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan	45. Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan? 46. Jika ADA, apa penyebabnya?
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	47. Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub? 48. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada? 49. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekampitulasi suara? 50. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?
		Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUSS	51. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu? 52. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan Penyandingan suara TPS dengan Kecamatan serta Rekapitulasi Ulang	53. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu? 54. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK? 55. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapituasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?
	Penetapan Hasil Pemilihan	Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	56. Apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?
		Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada	57. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada? 58. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam ttahapan penetapan hasil? 59. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?
Indikator (Tahapan) Data dan Informasi	Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih		
	Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	1. Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?
	Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	2. Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?
	Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	3. Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?
	Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	4. Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?
	Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?
	Instrumen Tugas Pantarlih		

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
	Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	6. Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?
	Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit	7. Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?
	Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih		
	Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	8. Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai? 9. Apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?
	Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	10. Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?
	Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih		
	Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	11. Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?
	Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	12. Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?
	Evaluasi penyelenggaraan Bimktek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	13. Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?
	Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada		
	Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	14. Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	15. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	16. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	17. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	18. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada
	Evaluasi penyelenggaraan Bimktek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	19. Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?
DIMENSI NON-TAHAPAN			
Indikator Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilhan sesuai kebutuhan? 2. Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami? 3. Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur? 4. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik? 5. Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan? 6. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala? 7. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun? 8. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?
Instrumen Perencanaan Logistik Pilkada	Regulasi Logistik Pilkada	Terbentuknya regulasi sebagai dasar hukum/payung hukum dalam pelaksanaan pemenuhan Logistik Pilkada	1. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut? 2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?
	Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada	Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,	3. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda? 4. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara? 5. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?

SAYANGI BANTEN
COBLOS PILIHAN

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
	Anggaran Logistik Pilkada	Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada	6. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa? 7. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada? 8. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?
Instrumen Produksi Logistik Pilkada	Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada	Persiapan produksi logistik Pilkada	9. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara? 10. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?
		Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada	11. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada? 12. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?
Instrumen Pendistribusian Logistik Pilkada	Persiapan Distribusi Logistik	Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada	13. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? 14. Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada? 15. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?
		Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada	16. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada? 17. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik?
		Pemetaan moda transportasi yang	18. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS	untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS? 19. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?
DIMENSI KELEMBAGAAN			
Indikator Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya Sistem Adminitsrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu melalui pemantauan aplikasi	1. Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi? 2. Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?
Indikator Parhubmas	Pendidikan Pemilih	Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024	1. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pillkada 2024 mudah dipahami? 2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas? 3. Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?
		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024	4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di tetapkan? 5. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncakan tapi tidak berhasil dilaksanakan? 6. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaanya tidak memenuhi target yang ditetapkan? 7. Apa penyebab kegagalan sosialisasi?
		Segmentasi peserta/audiens	8. Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih? 9. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula? 10. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan? 11. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas? 12. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?
		Jumlah Audiens	13. Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
			14. Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?
		Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.	15. Apa saja kegiatan pendididkan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024
		Output kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	16. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024? 17. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih? 18. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan? 19. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih? 20. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?
		Pelaksana Kegiatan	21. Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan? 22. Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?
	Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada(melalui medsos dan website KPU)	Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra	23. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU? 24. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)? 25. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kotamempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer?
		Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis untuk diseminasi informasi kepemiluan	26.Apa saja kegiatan pendididkan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024
		Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunisasi masyarakat dengan	27.Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yaang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		informasi valid tentang tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh hoax)	
	Indeks Partisipasi Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc	28. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS 29. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS
		Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	30. Jumlah CEK NIK di infopemilu 31. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol 32. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD
		Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	33. Jumlah cek DPT (cekdptonline.kpu) 34. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih 35. Jumlah permohonan untuk pindah memilih
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	36. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU 37. Karakteristik sosial ekonomi
		Partisipasi dalam pemungutan suara	38. Data pengguna hak pilih 39. Data surat suara tidak sah
		Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara	40. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi) 41. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat 42. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu
	Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklihparmas	KPU menggandeng stakeholder untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	41. Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)
		KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi msayarakat pilkada 2024	42. Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja 43. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja 44. Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
Indikator Keuangan	Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri	Tepat waktu dalam penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc	1. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan 2. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc
	Pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc	1. Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti	3. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
		pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024. 2. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban	4. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan? 5. Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc? 6. Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024? 7. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024? 8. Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?
	Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai	9. Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam pengelolaan keuangan di badan adhoc 2024	10. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat 11. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc? 12. Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?
	Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah	Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel	13. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan? 14. Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?
	Laporan Keuangan KPU yang berkualitas	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	15. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan: ▪ Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ▪ Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ▪ Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ▪ Sistem Pengendalian Intren yang memadai

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
			16. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK
Indikator PBJ & BMN	Pengelolaan Persediaan Pilkada	1. Penatausahaan Persediaan Pemilihan 2. Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan 3. Pelaksanaan pemusnahan Persediaan Pemilihan 4. Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	1. Apakah pelaksanaan penatausahan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku? 2. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan? 3. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan? 4. Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 5. Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)? 6. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 7. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien? 8. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 9. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset? 10. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?
	Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana	Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan	11. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	12. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA? 13. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
			14. Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak? 15. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?
		Penggunaan sistem informasi (SiRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	16. Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP? 17. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP? 18. Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan? 19. Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandantangan Surat Perjanjian/Kontrak? 20. Apakah PPK sudah menyelesaiakan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog? 21. Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non-Tender dan Non e-Purchasing pada Aplikai SPSE?
	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ: Provinsi Tipe A : 7 ASN Provinsi Tipe B : 5 ASN Kab/Kota : 3 ASN	22. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah? 23. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ? 24. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?
	Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Persentase PPK dan PPS yang melakukan bimtek kepada KPPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	25. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek? 26. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
	Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan bimtek kepada PPK dan PPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	27. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek? 28. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
	Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota	Fasilitator yang melakukan Ortug menggunakan Modul yang telah ditetapkan	29. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul? 30. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan? 31. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?
DIMENSI EKSTERNALITAS			
Indikator Logistik	**Instrumen Produksi Logistik Pilkada**		
	Pelaksanaan produksi logistik Pilkada	Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik Pilkada	1. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK? 2. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik? 3. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?
		Quality Control produksi surat suara	4. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik,rusak atau cacat?
	Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	5. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota?
		Pengirimanan logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	6. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengirimanan logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?
	Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota		
	Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	7. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengirimanan logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?
	Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS		
	Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	8. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS? 9. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?
	Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada		
	Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Ketersediaan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	10. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai?

DIMENSI	TAHAPAN	INDIKATOR	DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI
			11. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? 12. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?
	Proses pengelolaan logistik Pilkada di tempat penyimpanan logistik Pilkada/Gudang	Quality Control untuk memastikan logistik yang diterima oleh KPPS/KPPSLN dalam keadaan baik	13. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik? 14. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?
	Penghapusan Surat Suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan	Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	15. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut? 16. Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?

Tabel 2. 4 Dimensi, Indikator, Sub-Indikator dan Pertanyaan Evaluasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

B. Waktu Evaluasi

Secara teoritik, evaluasi ditinjau dari segi waktu dan kronologi perencanaan serta pelaksanaannya dibedakan menjadi tiga (Halimah, 2020: 37):

1. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum program dilaksanakan (*pre programme evaluation*). Evaluasi ini dikenal dengan istilah studi kelayakan.
2. Evaluasi yang dilaksanakan pada program berjalan (*on going evaluation*). Evaluasi ini berfungsi untuk memberikan saran penyempurnaan pelaksanaan program.
3. Evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan atau program telah berjalan cukup lama sehingga telah dicapai hasil – hasil (*output*) tertentu (*ex-post evaluation*).

Dalam konteks ini, Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 masuk ke dalam kategori ketiga, yakni *ex-post evaluation*. Hal ini disebabkan karena kegiatan evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dimandatkan oleh UU Pemilu.

C. Tipe Evaluasi

Tipe evaluasi menurut Langbein sebagaimana dikutip oleh Hayat (2018) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tipe Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.
2. Evaluasi proses (*proses of public policy implementation*) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

Tipe evaluasi yang dipergunakan di dalam evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini adalah gabungan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil.

D. Model Evaluasi

Para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Goal–oriented Model*. Model evaluasi berbasis tujuan merupakan model evaluasi yang paling awal muncul yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler, model ini memfokuskan pada sejauh mana pencapaian tujuan.
2. Model Evaluasi Bebas Tujuan. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang diimplementasikan.

   Tiga jenis dampak yang pada umumnya dikaji:

   1) Dampak simpangan negatif yaitu dampak yang tidak dikehendaki oleh program.
   2) Dampak positif yaitu pengaruh yang sesuai dengan tujuan.
   3) Dampak simpangan positif yaitu dampak positif program di luar pengaruh positif yang telah ditetapkan.
3. *Countenance Evaluation Model*, yakni model evaluasi yang digunakan untuk menentukan tahapan dari suatu proses dan segala hal yang mempengaruhinya.

Model evaluasi ini terdiri atas tiga tahapan yaitu:

1) Tahapan pra-program, yaitu dengan melihat keadaan awal program, faktor yang diprediksi mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan, kompetensi yang dimiliki SDM sebelum kebijakan dilaksanakan.
2) Tahapan saat program dilaksanakan, tahapan ditujukan untuk melihat kesesuaian program yang sedang berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai.
3) Tahapan pasca program, untuk meninjau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

4. Model evaluasi Responsif, yakni model yang di diimplementasikan pada kebijakan sosial atau evaluasi pada persoalan yang memerlukan tindakan dengan aspek humaniora, yang difokuskan kepada tanggapan dari berbagai pihak atas kebijakan yang dijalankan dengan melihat pengaruh sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

   Evaluasi dikatakan responsif jika mempunyai kriteria:

   1) Berpusat kepada aktivitas dari pada tujuan yang telah ditetapkan.
   2) Memenuhi kebutuhan audients.
   3) Pandangan nilai – nilai yang berbeda dari orang dilayani dilaporkan dalam keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan.

5. Model evaluasi *CIPP. Context, Input, Process, Product (CIPP)*. Evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebem ini memiliki empat langkah, setiap tahapan evaluasi tersebut memiliki informasi untuk membuat keputusan.

   1) Evaluasi konteks, yang bertujuan untuk melihat kondisi kontekstual mengenai harapan masyarakat, visi dan misi dari lembaga yang ingin dievaluasi.
   2) Evaluasi input yang bertujuan untuk melihat kapasitas dan kualitas masukan.
   3) Evaluasi proses yang bertujuan melihat bagaimana proses kebijaksanaan berjalan.
   4) Evaluasi produk, bertujuan menginformasikan kelanjutan program (*recycling decision*).

6. Model Evaluasi CSE-UCLA. Model evaluasi (*Centre for the Study of Evaluation*, University California at Los Angeles) CSE- UCLA terdiri atas lima tahapan yang bersifat komprehensif, secara berurutan yaitu: sistem assessmen (Need Assessment), perencanaan dan pengembangan (*planning and development*), implementasi. *Discrepancy Evaluation Model* (DEM), yang dikembangkan oleh Malcom M. Provus. Model evaluasi ini menonjolkan gap implementasi kebijakan.

   Terdapat 6 langkah yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi *discrepancy* yaitu:

   1) Membuat desain dan standar-standar yang sesuai dengan pelaksanaan kebijakan yang ideal;
   2) Melakukan rencana evaluasi dengan model evaluasi discrepancy;
   3) Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membandingkan pelaksanaan kebijakan yang terjadi di lapangan dengan standar pelaksanaan sesuai kebijakan;
   4) Menemukan kinerja kebijakan antara lain pelaksanaan program, hasil penemuan data melalui kuantitatif dan kualitatif;
   5) Menjelaskan dan mengukur gap antara standar kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya;
   6) Menentukan hambatan yang dialami oleh para pelaku kebijakan dalam mencapai standar kebijakan; dan
   7) Membuat perubahan terhadap implementasi kebijakan untuk menghilangkan kesenjangan. Ketimpangan mencakup pada input, proses dan output pada setiap fase perkembangan program.

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten ini menggunakan model campuran yang mengombinasikan beberapa model yang ada (*mixed-model*).

E. Model Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi.

Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU Provinsi Banten dan sekretariat KPU Provinsi Banten, dan stakeholder pemilihan lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. DI samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

F. Analisa Evaluasi

Hasil pengisian kuesioner Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 diolah dan dianalisis oleh KPU Provinsi Banten dengan dibantu oleh Pakar yang ditunjuk oleh KPU Republik Indonesia sebagai narasumber di kegiatan FGD KPU Provinsi Banten. Analisa dilakukan terhadap data kuantitatif maupun kualitatif, baik yang bersumber dari kuesioner, maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil penggalian melalui kegiatan Focus Group Discussion yang melibatkan pihak stakeholder yang meliputi Bawaslu Provinsi Banten, Lembaga Pemantau Pemilihan, Media Massa (cetak dan elektronik), Peserta Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Banten.

G. Proses Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Pertama: Menginput data instrumen di spreadsheet yang disebar sub bagian Perencanaan ke sub-sub bagian lain yang ada di KPU Provinsi Banten. Data instrumen ini sebagai sarana KPU Provinsi Banten untuk mengolah data untuk dipaparkan pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka evaluasi atas penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi pada tanggal 27-28 Februari 2025.

b. Kedua: Melaksanakan Rapat Koordinasi Tahap Pertama Pengisian Instrumen Pilkada 2024 di aula 2 KPU Provinsi Banten pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025. Rapat ini dihadiri Plh. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, Kepala Bagian KPU Provinsi Banten, Kepala Sub Bagian KPU Provinsi Banten dan Staff Perencanaan KPU Provinsi Banten.

Gambar 2. 1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Tahap Pertama Pengisian Instrumen Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

c. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2025, dilakukan kembali Rapat Koordinasi Tahap Kedua Pengisian Instrumen Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 di ruangan aula 2 gedung KPU Provinsi Banten. Rapat Pleno Finalisasi Isian Kuesioner sesuai dengan arahan Ketua KPU dalam Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2024 Perihal *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Gambar 2. 2 Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan memimpin Rapat Pleno finalisasi hasil kuesioner evaluasi

d. Setelah selesai rapat pleno finalisasi hasil kuesioner, data dikirim ke KPU Republik Indonesia tautan https://linktr.ee/evaluasi_pilkada_2024.

e. Selanjutnya KPU Provinsi Banten melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 pada hari Kamis sampai dengan Jumat, tanggal 27-28 Februari 2025 di Aston Serang Hotel & Convension Centre, Banten untuk meminta masukan pada Pakar KPU Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai narasumber, Perwakilan Pimpinan dan Sekretariat dari 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dan Stakeholder pada Pemilihan Tahun 2024 diantaranya Bawaslu Provinsi Banten, Lembaga Pemantau Pemilihan, Media Massa (cetak dan elektronik), Peserta Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Banten.

Gambar 2. 3 Perwakilan dari KPU Kab/Kota memberikan pandangan dan masukan mengenai tahapan selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

Gambar 2. 4 Perwakilan dari stakeholder ikut memberikan pandangan dan masukan mengenai tahapan selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

Gambar 2. 5 Perwakilan dari peserta Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota se-Banten

Gambar 2. 6 Sesi Foto Bersama Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 TEORI INTEGRITAS PEMILU

Pemilu merupakan rangkaian perwujudan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia dalam politik. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penyelenggaraan pemilu untuk dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan berpegang teguh pada suatu nilai moral dan etika, yang dikenal dengan integritas. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi wujud dari kualitas demokrasi. Apabila suatu desain kriteria penyelenggaraan pemilu tidak terlaksana, maka menurut Przeworski akan menghasilkan “demokrasi minimalis”. Demokrasi minimalis berarti terpenuhinya prosedur politik demokratis namun kualitas demokrasinya tidak dipersoalkan (Silalahi, 2022).

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dilakukan dengan berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dibalut dengan integritas yang tinggi untuk mengakomodir hak politik warga negara. Hal tersebut menjadi suatu esensi penting untuk mewujudkan pemilu demokratis, yang dihasilkan dari profesionalitas penyelenggara pemilu yang berintegritas, kredibel, dan akuntabel.

Integritas merujuk pada kepatuhan terhadap pedoman nilai dan etika. Integritas menjadi penentu seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan morilnya yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga secara normatif, integritas menjadi persoalan sosiologis yang dibebankan kepada seseorang atau lembaga (Iqbal, 2020; Silalahi, 2022). Dalam konteks pemilu, integritas pemilu diartikan sebagai tindakan dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam keinginannya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan berpedoman pada moral dan etika. Pemilu tanpa adanya integritas dapat memicu kekosongan dalam proses demokrasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang berakhir pada ketidakstabilan politik.

Terdapat suatu konsep dalam integritas pemilu yang dibedakan menjadi *concept-based approach* dan *process-based approach* yang dikembangkan oleh Carolien Van Ham. Ham mengkategorisasi beberapa konsep yang pernah dikeluarkan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang integritas pemilu. *concept-based approach* mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan *process-based approach* mempertimbangkan proses penyelenggaraan pemilu.

Konsep yang digunakan oleh Muzaffar dan Schedler dengan istilah *electoral governance* menggambarkan konsep process-based approach dengan menjadikan tata kelola pemilu sebagai esensi utama dalam integritas pemilu melalui rangkaian kegiatan pemilu, mulai dari proses pra-pemilu, saat pemilu, hingga setelah pemilu.

Beberapa peneliti juga menggabungkan *concept-based approach* dan *process-based approach* untuk mendefinisikan integritas pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Elklit dan Svansson melalui definisi *"free and fair"* yang didasarkan pada teori demokrasi yang kemudian disempurnakan melalui penerapannya dalam tahapan pemilu (Ham, 2015). *Concept-based approach* memberikan keuntungan untuk menjadi tolak ukur evaluasi pemilu, yang didukung oleh pertimbangan pada setiap tahapan pemilu (*process-based approach*) untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas.

Literatur mengenai integritas pemilu telah berkembang dalam mengidentifikasi sejumlah faktor penentu integritas pemilu, mulai dari faktor struktural seperti pengalaman historis dengan pemilu demokratis dan ciri-ciri sosio-ekonomi masyarakat, hingga penjelasan institusional yang terfokus pada sistem pemilu dan keberadaan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, hingga penjelasan yang lebih dekat yang terfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam manipulasi pemilu dan pengawasan pemilu (James, et al. 2019).

Penjelasan struktural merujuk pada struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang memengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman sosial. Peneliti menemukan bahwa manipulasi pemilu lebih sering terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Penjelasan institusional menitikberatkan pada peran lembaga lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses pemilu. Lembaga lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi pemilu, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat mengurangi tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen.

Penjelasan berbasis aktor berfokus pada keputusan strategis yang diambil oleh aktor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik pemilu tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi pemilu masih bervariasi, namun integritas pemilu cenderung paling tinggi pada pemilu yang memiliki tingkat persaingan yang cukup.

Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas pemilu, sementara dampak pengawasan dari pemantau pemilu internasional dan domestik menunjukkan hasil yang beragam.

Integritas pemilu menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan pemilu, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam pemilu. Integritas pemilu kerap dijadikan bahan perhitungan. Dalam pemilu yang secara prosedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat dan partai bersaing di lapangan yang setara. Namun, ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” pemilu (Norris, 2014). Malpraktek dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus , ditambah dengan ketidakpuasan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem pemilu.

Beberapa peneliti meletakkan fokusnya tentang integritas pemilu dalam konteks negatif (Ham, 2015). Lehoucq menaruh fokusnya dalam kegagalan pemilu yang berintegritas yang disebabkan oleh pelanggaran (*election fraud*) dan manipulasi suara (*ballot-rigging*). Hal tersebut akan berdampak pada sentimen publik pada pemilu, yang dapat mengikis atau mendikreditkan pemilu itu sendiri (Silalahi 2022; Lehoucq, 2003). Konsep lainnya seperti malpraktek pemilu (*election malpractice*), yang utamanya dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (*inequality*), rendahnya tingkat urbanisasi, dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes (Silalahi, 2022; Darnolf, 2012).

Toby S. James membuka perspektif baru untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang dapat memengaruhi suatu integritas pemilu. James membuka perspektifnya melalui pengaruh desain organisasi lembaga penyelenggara pemilu terkait sentralisasi; indepedensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel, untuk membuktikan pengaruhnya terhadap performa lembaga penyelenggara pemilu. Poin poin tersebut menjadi esensi bagi luaran kinerja lembaga penyelenggara pemilu berupa integritas pemilu dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu (James, et al. 2019).

3.2 TEORI MANAJEMEN PEMILU

Pemilu sering dikatakan sebagai salah satu kegiatan logistik yang kompleks, yang dilakukan pada masa damai (James, 2020). Pemilu seringkali menjadi fokus perhatian di mata masyarakat, khususnya terhadap kegagalan eksekusi pemilu yang memecah sentimen publik terhadap kepercayaannya dalam sistem demokrasi. Pemilu Kenya tahun 2007 menjadi salah satu bukti bahwa kegagalan manajemen logistik dalam pemilu dapat mengakibatkan krisis politik, ekonomi, dan humaniter. Evaluasi dari European Union Election Observation pada tahun 2008 menyatakan bahwa Pemilu Kenya 2008 merupakan bentuk kegagalan suatu negara dalam penyelenggaraan pemilu sesuai standar internasional dan regional, yang berakibat pada kepercayaan dan akurasi hasil pemilu.

Permasalahan dalam eksekusi pemilu bukanlah hal yang jarang terjadi. Pemilu Amerika Serikat Tahun 2000 mengekspos kekurangan alat pemilihan dengan surat suara yang membingungkan, peralatan yang rusak, antrean di tempat pemungutan, permasalahan dengan surat suara yang tidak sah, hingga warga negara yang tidak terdaftar (U.S. Commission on Civil Rights 2001; Wand et al. 2001; James, 2020). Pada tahun 2010 di Inggris, BBC News menurunkan berita utama bahwa pemilihan umum telah dirusak oleh kesalahan yang meluas dalam administrasi pemilu. Ratusan pemilih di Chester tidak dapat memberikan suara karena daftar pemilih yang kedaluwarsa; antrean panjang terbentuk di Sheffield dan Leeds sehingga para pemilih 'terkunci' ketika tempat pemungutan suara ditutup pada tengah malam; tempat pemungutan suara di Liverpool melaporkan bahwa mereka kehabisan kertas suara. Beberapa pemilih yang tidak puas melakukan aksi duduk untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai 'pencabutan hak pilih'. Di Australia, lebih dari 1.300 suara menghilang dalam perhitungan ulang Senat Australia Barat yang berlangsung sengit. Terlebih lagi, di Willsburg, Utah, panitia pemilu bahkan lupa untuk melaksanakan pemilu. Kasus-kasus ini menjadi perhatian baru dalam studi kepemiluan, bahwa terdapat elemen penting yang harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, yaitu manajemen pemilu.

Studi tentang pemilihan umum secara luas dianggap sebagai bagian dari disiplin ilmu politik (Hum dan Powell, 2013; James, 2020). Banyak penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pilihan individu terhadap kandidat atau partai politik.

Selain itu, terdapat pula kajian mengenai peran lembaga penyelenggara pemilu, pembiayaan kampanye, serta sistem pemungutan suara dalam memengaruhi hasil pemilu. Namun, pemilu sering kali dipahami hanya dalam kerangka bagaimana merancang mekanisme pemilu melalui serangkaian aturan untuk menciptakan sistem yang efektif.

Namun, pemilu bukan hanya sebatas undang-undang atau aturan. Suatu undang-undang atau aturan juga dibentuk untuk diimplementasikan. Sumber daya perlu dimobilisasi, staf direkrut dan dimotivasi, teknologi dirancang. Oleh karena itu, manajemen pemilu mengacu pada organisasi, jaringan, sumber daya, praktik kerja antropologis mikro dan instrumen yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu (James, 2020).

James turut menjelaskan beberapa hal esensial yang berkaitan dengan manajemen pemilu. Hal tersebut melibatkan:

- Mengatur proses pemilu yang sebenarnya (mulai dari pendaftaran dan kampanye pra-pemilu, pemungutan suara pada hari pemilu, hingga penghitungan suara pasca-pemilu).
- Memantau pelaksanaan pemilu selama proses pemilu (misalnya, memantau kampanye dan media partai politik/kandidat menjelang pemilu, menegakkan peraturan terkait kelayakan pemilih dan partai, dana kampanye, perilaku kampanye dan media, prosedur penghitungan suara, dan lain-lain).
- Mengesahkan hasil pemilu dengan mengumumkan hasil pemilu.

Untuk mendukung ketiga hal tersebut, negara diharuskan untuk memiliki mesin birokrasi yang setidaknya dapat:

- Mengukur dan memantau kinerja.
- Mengelola dan memelihara hubungan organisasi eksternal dan internal.
- Proses pengambilan keputusan tentang mekanisme pelaksanaan.
- Merancang instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja.
- Mengalokasikan sumber daya di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- Perekrutan dan pelatihan, staf.

Seiring berkembang dan bertambahnya jumlah pelaksanaan pemilu di dunia, aspek manajemen pemilu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Terdapat empat alasan utama yang diuraikan mengenai pentingnya manajemen pemilu:

- Cita-cita demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menekankan adanya kesetaraan politik serta kendali rakyat atas pemerintahan. Jika suara seseorang tidak diperhitungkan akibat hilang dalam perjalanan dari kotak suara ke tempat pemungutan, atau terjadi kesalahan dalam proses penghitungan, maka orang tersebut berpotensi kehilangan hak demokrasinya, sehingga prinsip kesetaraan terganggu. Apabila kesalahan-kesalahan tersebut terjadi secara sistematis dan menguntungkan salah satu kandidat atau partai, baik disengaja maupun tidak, maka integritas dari sistem pemerintahan demokratis secara fundamental telah tercoreng.
- Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokratis. Cacat dalam manajemen pemilu dan pemberitaannya yang meluas dapat dengan cepat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis.
- Keamanan, perdamaian dan konflik. Seperti yang diilustrasikan oleh kasus Kenya, situasi di mana otoritas pemilu dan hasil pemilu tidak dipercaya dapat dengan cepat merusak proses perdamaian yang rapuh. Perang saudara dan konflik dapat berimbas pada prospek konsolidasi demokratis yang lebih rendah.
- Akuntabilitas publik.

Dalam konteks Indonesia, tata kelola pemilu didasarkan atas:

1. **Asas Mandiri**

Salah satu asas penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah mandiri.

Mandiri dalam konteks penyelenggaraan Pemilu mengacu pada otonomi dan kemandirian penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Asas Mandiri Salah satu asas penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah mandiri. Mandiri dalam konteks penyelenggaraan Pemilu mengacu pada otonomi dan kemandirian penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip mandiri ini juga mencakup pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.

Dengan prinsip mandiri, diharapkan penyelenggara Pemilu dapat bekerja secara objektif dan profesional dalam menyukseskan Pemilu yang adil, bersih, dan berkualitas. Prinsip mandiri ini juga menjadi landasan untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

2. Jujur

Salah satu asas penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah jujur.

Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk bertindak secara jujur dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Jujur dalam konteks penyelenggara Pemilu mengacu pada integritas, kejujuran, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktiknya, asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu mencakup berbagai hal, seperti pengawasan dan pengawalan terhadap proses Pemilu, penghitungan suara, dan pelaporan hasil Pemilu. Penyelenggara Pemilu juga harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kepentingan politik tertentu yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.

Asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu sangat penting untuk menjamin keadilan, kepercayaan masyarakat, dan keabsahan hasil Pemilu. Dengan menjunjung tinggi asas jujur, diharapkan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Adil

Salah satu asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah asas adil.

Adil dalam konteks penyelenggaraan pemilu merujuk pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu. Hal ini berarti setiap peserta pemilu, baik partai politik maupun calon, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pemilu tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Dalam praktiknya, asas adil ini tercermin dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seperti penegasan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi, penyelenggaraan pemilu yang transparan dan jujur, serta pemberian perlindungan hukum bagi setiap peserta pemilu dalam mengikuti proses pemilu.

Asas adil juga mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menjamin bahwa setiap proses pemilu dilakukan secara terbuka dan merata bagi semua peserta, tanpa adanya intervensi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, asas adil menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Berkepastian Hukum

Berkepastian hukum merupakan salah satu asas penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Asas ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak calon, partai politik, dan pemilih dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, berkepastian hukum memastikan bahwa segala peraturan dan mekanisme yang mengatur tahapan pemilu telah jelas dan dapat diprediksi.

Asas berkepastian hukum juga memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan jelas. Ini penting untuk menjaga keadilan, keberlangsungan proses pemilihan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi.

Dengan adanya berkepastian hukum, diharapkan proses penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel sesuai dengan prinsip demokrasi. Melalui pemenuhan asas berkepastian hukum, diharapkan Pemilu dapat memberikan hasil yang sah dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

5. Tertib

Salah satu asas penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tertib.

Tertib dalam penyelenggaraan Pemilu merujuk pada keteraturan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan segala proses terkait pemilihan umum. Ini mencakup segala hal mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

Dalam konteks ini, asas tertib memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu untuk menjaga agar semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penyelenggara harus memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta merujuk pada standar prosedur yang berlaku.

Selain itu, asas tertib juga menegaskan pentingnya pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam setiap proses pemilu. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran, kecurangan, maupun ketidakberesan lain yang dapat merugikan integritas dan keabsahan hasil Pemilu.

Dengan demikian, asas tertib menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu untuk menjaga agar seluruh proses pemilihan umum berjalan dengan lancar, adil, dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

6. Terbuka

Salah satu asas penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah asas terbuka.

Asas terbuka dalam penyelenggaraan Pemilu mengacu pada penerapan prinsip transparansi dalam segala proses yang terkait dengan Pemilu. Hal ini mencakup proses penyusunan Daftar Pemilih, pelaksanaan kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu.

Dengan prinsip terbuka, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara detail setiap tahapan Pemilu yang dilaksanakan. Penyelenggara Pemilu juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat terkait mekanisme dan prosedur Pemilu. Selain itu, asas terbuka juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam memantau proses Pemilu guna memastikan keabsahan dan keadilan pelaksanaannya.

Dengan demikian, asas terbuka dalam penyelenggaraan Pemilu memegang peranan penting dalam menjamin kepercayaan publik terhadap integritas dan legitimasi Pemilu itu sendiri.

7. Proporsional

Proporsional adalah prinsip yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Prinsip proporsional mengacu pada pembagian kursi atau perwakilan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan representasi yang adil di dalam lembaga legislatif.

Dengan prinsip proporsional, partai politik yang memperoleh suara yang signifikan akan mendapatkan jumlah kursi atau perwakilan yang sebanding dengan dukungan yang mereka terima dari pemilih. Hal ini memastikan bahwa setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama dan tidak terpinggirkan.

Selain itu, prinsip proporsional juga memungkinkan berbagai kelompok masyarakat dan pandangan politik untuk diwakili di dalam lembaga legislatif, sehingga keberagaman dan pluralisme politik dapat diakomodasi.

Dengan demikian, prinsip proporsional merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil dan demokratis, serta merupakan bagian integral dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu di Indonesia.

8. Profesional

Salah satu asas penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah profesionalisme.

Profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu mengharuskan setiap pihak yang terlibat, baik itu KPU, Bawaslu, maupun penyelenggara lokal, untuk bertindak secara profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini mencakup sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar etika dan integritas, serta kemampuan teknis yang memadai dalam mengelola seluruh proses pemilu, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu.

Dalam konteks profesionalisme, penyelenggara Pemilu diharapkan dapat menjaga netralitas, tidak memihak kepada pihak mana pun, serta menegakkan keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Mereka juga diwajibkan untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, profesionalisme diharapkan dapat menjamin keberlangsungan proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu/Pemilihan.

9. Akuntabel

Salah satu asas penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah akuntabel.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambil serta transparan dalam segala hal terkait dengan proses Pemilu/Pemilihan.

Dalam konteks ini, para penyelenggara Pemilu/Pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. Mereka harus membuka akses informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait dengan tahapan, mekanisme, dan hasil dari Pemilu.

Selain itu, asas akuntabel juga menuntut adanya integritas dan keterbukaan dalam menjalankan tugas, sehingga proses Pemilu dapat berjalan secara adil dan transparan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan demokratis.

10. Efektif

Salah satu asas penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah efektif.

Efektif dalam hal ini mengacu pada kemampuan penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, efektivitas penyelenggaraan Pemilu diukur dari berbagai aspek, antara lain adalah pengaturan proses pencalonan, pemilihan, serta penghitungan suara yang dijalankan secara adil, jujur, dan transparan. Selain itu, penyelenggara juga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga Pemilu dapat berjalan lancar dan berkualitas.

Dengan adanya asas efektif sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan Pemilu, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja mereka demi terciptanya Pemilu yang berkualitas dan dapat dipercaya.

11. Efisien

Efisiensi adalah salah satu asas utama penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Efisiensi dalam konteks ini berarti penyelenggara Pemilu harus mampu menjalankan proses Pemilu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang efisien, penataan proses administrasi yang efektif, serta penggunaan teknologi yang memudahkan dan mempercepat proses Pemilu.

Selain itu, efisiensi juga berarti penyelenggara Pemilu harus mampu meminimalisir kesalahan dan ketidakpastian dalam proses Pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang modern, serta pengawasan yang ketat terhadap setiap proses Pemilu.

Dengan menerapkan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Penyelenggara Pemilu juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pemilih, sehingga proses Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

3.3 TEORI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU

Komisi Pemilihan Umum dalam diskursus internasional sering disebut dengan *Election Management Body* (EMB). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengorganisir penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan umum, sesuai dengan jenis pemilihan umum yang diberlakukan di masing-masing negara.

Meskipun memiliki sejumlah fungsi umum, EMB secara global memiliki perbedaan dalam strukturnya. Wall et al. (2006) mengidentifikasi tiga model utama lembaga pemilihan umum: EMB independen, EMB pemerintah, dan EMB 'campuran'.

EMB independen bersifat independen dari cabang eksekutif (pemerintah) dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu dan sangat sering juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu. Mereka terdiri dari para ahli yang tidak berpihak atau perwakilan dari partai politik (atau campuran keduanya) dan paling sering bertanggung jawab kepada legislatif.

EMB pemerintah, di sisi lain, dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri yang bertanggung jawab kepada menteri kabinet. Artinya, dalam model ini, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, baik melalui kementerian (misalnya Kementerian Dalam Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Model ini dalam praktiknya juga memiliki banyak sub-model sebagaimana diterapkan oleh banyak negara. Swedia dan Swiss, misalnya, lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat hanya menjalankan beberapa fungsi utama, dan menyerahkan tugas-tugas (terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari pemilihan) kepada badan-badan lokal dan/atau regional. Di Inggris dan AS, sistemnya sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada lembaga penyelenggara pemilu pusat, dan semua urusan diserahkan kepada otoritas lokal. Yang terpenting, dan terlepas dari seberapa terdesentralisasi mereka, lembaga penyelenggara pemilu dalam model ini hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemilu saja, mereka tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan sebagaimana yang dimiliki lembaga penyelenggara pemilu independen.

Model 'campuran' menggabungkan unsur-unsur dari model independen dan model pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan melalui kementerian dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana model pemerintahan, namun ada badan kedua, yang independen dari eksekutif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pemilu.

Dalam beberapa kasus, badan yang bersifat independen ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka regulasi pemilu berdasarkan undang-undang (Elisabeth Carter & David M. Farrell., 2010).

Masing-masing model lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Wall et al. (2006: 21) menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang independen diuntungkan karena kecil kemungkinannya untuk tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tekanan politik. Otonomi ini, bersama dengan persepsinya tentang ketidakberpihakan akan dapat meningkatkan legitimasi pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan model lembaga penyelenggara pemilu yang independen ini banyak diterapkan di kalangan negara-negara demokrasi baru. Keuntungan lain dari lembaga penyelenggara pemilu yang independen adalah bahwa mereka mungkin lebih mampu mengembangkan profesionalisme staf, memastikan administrasi pemilu berada di bawah kendali terpadu dan merencanakan serta melembagakan tugas-tugas pemilu.

Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu yang independen memiliki kelemahan. López-Pintor (2000) menjelaskan kelemahan ini antara lain: lembaga penyelenggara pemilu yang independen kurang memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga dapat menghambat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Lemahnya pengaruh politik ini juga dapat berdampak kepada sulitnya memperoleh dukungan pendanaan yang cukup. Lebih jauh lagi, lembaga penyelenggara pemilu independen ini juga cenderung bekerja dengan biaya yang lebih tinggi karena, tidak seperti lembaga penyelenggara pemilu pemerintah, mereka tidak dapat memanfaatkan staf yang terampil dan menggandeng struktur pemerintah untuk membantu pelaksanaan pemilu.

Namun demikian, Wall et al. (2006: 11) mengingatkan bahwa kualitas kinerja, efisiensi, keterbukaan, transparansi, profesionalisme dan imparsialitas penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan oleh struktur lembaga penyelenggara pemilu. Perilaku lembaga penyelenggara pemilu juga memegang peran yang sangat penting. Wall mengatakan bahwa meskipun independensi lembaga penyelenggara pemilu diatur secara hukum dalam konstitusi atau undang-undang

pemilu (seperti di Meksiko dan Uruguay), tidak berarti bahwa ketidakberpihakan dan otonomi dari kendali pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam model lainnya.

Lembaga penyelenggara pemilu pemerintah (seperti di Selandia Baru dan Swedia) dianggap adil dan tidak memihak meskipun merupakan lembaga pemerintah. Kinerja lembaga penyelenggara pemilu juga bergantung pada kemauan politik dan komitmen untuk membiarkan lembaga penyelenggara pemilu bertindak bebas dan tidak memihak, serta pada bagaimana pimpinan lembaga penyelenggara pemilu berperilaku dengan benar dan berintegritas (Elisabeth Carter & David M. Farrell., 2010: 22-23).

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

BAB IV

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan di BAB II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survei internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab IV ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilihan, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

4.1 Deskripsi Statistik

4.1.1. Potret Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan oleh KPU Republik Indonesia ke KPU Provinsi Banten. Pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilu dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu.

1. **Penyusunan Perencanaan, Program, Dan Anggaran Pilkada**
   - **Penyusunan Anggaran Pemilihan Sesuai Kebutuhan (100%)** → Semua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan.
   - **Dokumen Anggaran Pemilihan Terbit Tepat Waktu (100%)** → Semua dokumen anggaran diterbitkan pada bulan Januari, awal tahun.
   - **Tersedia Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran (100%)** → Semua Satker memiliki petunjuk teknis untuk penggunaan anggaran pemilihan.
   - **Rencana Kerja Sesuai Kebijakan (100%)** → Semua rencana kerja telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

- **Rencana dan Anggaran Sesuai Kebutuhan (100%)** → Semua rencana dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan pemilihan.
- **Ketidaksesuaian Anggaran (60%)** → Sebagian besar menyatakan rencana kegiatan sudah tersusun, tetapi ada aspek pendukung yang belum teranggarkan karena kebijakan dan peraturan yang baru keluar, sehingga perlu revisi anggaran.
- **Hambatan Penyusunan Anggaran (80%)** → Sebagian besar menghadapi hambatan dalam penyusunan anggaran, seperti perbedaan standar penyusunan anggaran, perubahan pedoman penyusunan, penyesuaian dengan anggaran daerah, dan belum adanya PKPU saat penyusunan anggaran.
- **Frekuensi Revisi Anggaran (60%)** → Sebagian besar mengalami revisi anggaran sebanyak 1-3 kali, sementara sebagian lainnya mengalami 4-10 kali revisi.

2. Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

- **Jumlah Pasangan Calon Jalur Perseorangan (60%)** → Sebagian besar menyatakan tidak ada pasangan calon jalur perseorangan, sementara sebagian lainnya menyatakan terdapat 1-2 pasangan calon.
- **Jumlah Pasangan Calon yang Diverifikasi Administrasi (60%)** → Sebagian besar menyatakan ada pasangan calon yang diverifikasi administrasi, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak ada pasangan calon perseorangan yang diverifikasi.
- **Jumlah Pasangan Calon yang Diverifikasi Faktual (60%)** → Sebagian besar menyatakan ada pasangan calon yang diverifikasi faktual, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak ada pasangan calon jalur perseorangan yang diverifikasi faktual.
- **Jumlah Pasangan Calon Jalur Partai Politik (60%)** → Sebagian besar menyatakan ada 2 pasangan calon, sementara sebagian lainnya menyatakan ada 3-4 pasangan calon.
- **Penelitian Administratif Pasangan Calon (60%)** → Sebagian besar menyatakan ada 2-3 pasangan calon yang diteliti administrasinya, sementara sebagian lainnya menyatakan ada 4 pasangan calon.

- **Penelitian Administratif Perbaikan Pasangan Calon (60%)** → Sebagian besar menyatakan ada 2-3 pasangan calon yang diperbaiki administrasinya, sementara sebagian lainnya menyatakan ada 4 pasangan calon.
- **Dokumen Pasangan Calon yang Bermasalah (40%)** → Sebagian besar menyatakan tidak ada dokumen bermasalah, sementara sebagian lainnya menyatakan ada ketidaksesuaian dokumen terkait pajak dan LHKPN.
- **Jumlah Pasangan Calon yang Ditetapkan (60%)** → Sebagian besar menyatakan ada 2-3 pasangan calon yang ditetapkan, sementara sebagian lainnya menyatakan ada 4 pasangan calon yang ditetapkan.
- **Pelanggaran Administrasi dalam Tahapan Pencalonan (100%)** → Tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU.
- **Pelanggaran Pidana dalam Tahapan Pencalonan (100%)** → Tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan KPU.
- **Sengketa TUN dalam Tahapan Pencalonan (100%)** → Tidak ada sengketa TUN dalam tahapan pencalonan Pilkada.

3. **Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye**

- **Pemanfaatan APK oleh Pasangan Calon (100%)** → Semua pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU, baik yang diserahkan langsung maupun difasilitasi pemasangannya.
- **Pemberitahuan kampanye kepada kepolisian (100%)** → Semua pasangan calon telah mematuhi aturan dengan memberitahukan rencana kampanye melalui surat pemberitahuan kepada kepolisian.
- **Jumlah debat publik (100%)** → Debat publik dilaksanakan sebanyak 2-3 kali, dengan mayoritas daerah melaksanakan dua kali debat sesuai berita acara.
- **Batas waktu rilis SK sebelum kampanye cukup (80%)** → Mayoritas menyatakan cukup, namun 20% menilai waktu koordinasi harus lebih panjang karena kampanye melibatkan banyak elemen masyarakat.
- **Mayoritas pasangan calon mematuhi aturan pemberitahuan kampanye (100%)** → Semua pasangan calon telah mematuhi aturan pemberitahuan kampanye kepada kepolisian.
- **Pembersihan APK oleh peserta Pilkada (40%)** → Sebanyak 60% peserta tidak membersihkan APK sendiri, dan tugas ini diambil alih oleh KPU serta instansi terkait seperti Bawaslu, Satpol PP, dan DLH.

- **Ketepatan waktu penyampaian LADK (100%)** → Semua pasangan calon menyampaikan LADK tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
- **Ketepatan waktu penyampaian LPPDK (100%)** → Semua pasangan calon menyampaikan LPPDK tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Ketepatan waktu penyampaian LPSDK (100%)** → Semua pasangan calon menyampaikan LPSDK tepat waktu melalui sistem SIKADEKA.
- **Sumbangan dana kampanye di luar RKDK (80%)** → Tidak ditemukan indikasi sumbangan di luar RKDK, tetapi 20% menyebut ada kendala teknis di sistem SIKADEKA yang menyebabkan beberapa pasangan calon menyerahkan laporan dalam bentuk fisik.
- **Penutupan RKDK tepat waktu (100%)** → Semua pasangan calon telah melakukan penutupan RKDK sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- **Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik (100%)** → Tidak ada laporan dana kampanye yang diterima dalam bentuk uang elektronik, semua dilaporkan dalam bentuk uang tunai atau barang.
- **Pelanggaran administrasi oleh KPU (80%)** → Tidak ada pelanggaran signifikan, tetapi 20% mencatat adanya iklan kampanye yang ditayangkan sebelum jadwal.
- **Pelanggaran pidana oleh KPU (100%)** → Tidak ditemukan pelanggaran pidana dalam tahapan kampanye.
- **Sengketa TUN dalam tahapan kampanye (100%)** → Tidak ada sengketa TUN yang terjadi selama proses kampanye dan pencalonan.
- **TPS yang tidak melaksanakan tahapan sesuai jadwal (100%)** → Semua TPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal.
- **Kendala penutupan RKDK (100%)** → Tidak ditemukan kendala dalam penutupan RKDK oleh pasangan calon.
- **Jumlah pelanggaran administrasi dalam kampanye (20%)** → Hanya satu kasus pelanggaran terkait iklan yang tayang sebelum jadwal, mayoritas daerah tidak mencatat adanya pelanggaran administrasi.
- **Jumlah pelanggaran pidana dalam kampanye (0%)** → Tidak ada pelanggaran pidana yang ditemukan dalam tahapan kampanye.
- **Sengketa TUN dalam tahapan kampanye (0%)** → Tidak ditemukan adanya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait pencalonan atau kampanye.

4. **Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- **Pelanggaran administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara (20%)** → Terdapat 4 pelanggaran di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, termasuk PSU di 3 TPS dan PSL di 1 TPS, sementara 80% menyatakan tidak ada pelanggaran.
- **Pelanggaran pidana dalam pemungutan dan penghitungan suara (100%)** → Tidak ada pelanggaran pidana yang ditemukan.
- **Sengketa TUN dalam pemungutan dan penghitungan suara (100%)** → Tidak ada sengketa TUN yang terjadi.

5. **Tahapan Rekapitulasi Suara**

- **Kecamatan yang tidak melaksanakan rekapitulasi tepat waktu (100%)** → Semua kecamatan melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal.
- **Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota tepat waktu (100%)** → Semua rekapitulasi dilaksanakan sesuai jadwal.
- **Pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi suara (100%)** → Tidak ada pelanggaran administrasi yang ditemukan.
- **Pelanggaran pidana dalam rekapitulasi suara (100%)** → Tidak ada pelanggaran pidana yang terjadi.
- **Sengketa TUN dalam rekapitulasi suara (100%)** → Tidak ada sengketa TUN yang dilaporkan.
- **TPS yang harus melaksanakan PSU/PUUS berdasarkan rekomendasi Bawaslu (40%)** → 3 TPS harus melaksanakan PSU, dan 1 TPS melakukan PSL, sedangkan 60% tidak ada PSU/PUUS.
- **TPS yang harus melaksanakan PSU/PUUS berdasarkan putusan MK (100%)** → Tidak ada TPS yang diperintahkan melakukan PSU/PUUS oleh MK.
- **Kecamatan yang harus melakukan rekapitulasi suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu (20%)** → 1 Kecamatan (TPS 12 Kelurahan Belendung) harus melaksanakan rekapitulasi ulang, sedangkan 80% tidak ada.
- **Kecamatan yang harus melakukan penyandingan suara berdasarkan putusan MK (100%)** → Tidak ada kecamatan yang diperintahkan untuk melakukan penyandingan suara.

- **Kecamatan yang harus melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan putusan MK (100%)** → Tidak ada kecamatan yang diperintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang.

6. **Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten**
   - **Penetapan hasil pemilihan sesuai jadwal (100%)** → Seluruh proses penetapan hasil pemilihan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
   - **Pelanggaran administrasi dalam penetapan hasil Pilkada (100%)** → Tidak ada pelanggaran administrasi yang ditemukan.
   - **Pelanggaran pidana dalam penetapan hasil Pilkada (100%)** → Tidak ada pelanggaran pidana yang ditemukan.
   - **Sengketa TUN dalam tahapan penetapan hasil Pilkada (100%)** → Tidak ada sengketa TUN yang terjadi dalam proses penetapan hasil.

7. **Tahapan Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum.**
   - **Perkara hukum yang dihadapi dalam Pilkada 2024 (80%)** → Terdapat antara 1 hingga 4 perkara hukum, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa hasil di MK, sedangkan 20% menyatakan tidak ada.
   - **Lembaga yang menangani perkara hukum KPU (80%)** → Perkara hukum terkait Pilkada teregister di MK, DKPP, Pengadilan Negeri Pandeglang, dan Bawaslu Kota Tangerang, sedangkan 20% menyatakan tidak ada perkara.
   - **Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU (20-100%)** → 20% menyatakan KPU memenangkan 100% sengketa, sementara lainnya berkisar antara 50-99%, dan ada yang belum memiliki keputusan final.
   - **Jumlah perkara perselisihan hasil Pilkada di MK (20-60%)** → Terdapat antara 1 hingga 3 perkara yang dihadapi KPU, termasuk perkara terkait Pilkada Kabupaten Pandeglang.
   - **Persentase perkara MK yang dimenangkan KPU (20-40%)** → Sebagian menyatakan 70-99% perkara dimenangkan KPU, tetapi ada juga yang menyatakan perkara belum selesai.
   - **Jumlah putusan yang harus ditindaklanjuti (40%)** → Sebagian menyatakan terdapat 1-3 putusan yang harus ditindaklanjuti, sementara 60% menyatakan tidak ada.

- **Tindak lanjut hasil putusan perkara hukum (80%)** → Mayoritas menyatakan tidak ada perkara yang perlu ditindaklanjuti, sementara 20% masih menunggu putusan.
- **Kendala dalam menindaklanjuti putusan perkara hukum (100%)** → Tidak ada kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti hasil putusan.
- **Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan (60%)** → Sebanyak 60% menyatakan ada pelanggaran kode etik oleh KPU Prov/Kab/Kota atau Badan Adhoc, sementara 40% menyatakan tidak ada.
- **Jumlah penyelenggara yang melanggar kode etik (60%)** → Terdapat antara 1 hingga 6 orang yang diputus melanggar kode etik oleh DKPP.
- **Ketersediaan petunjuk teknis penyelesaian sengketa hukum (80%)** → Mayoritas menyatakan petunjuk teknis tersedia dan membantu dalam penyelesaian sengketa.
- **Kemudahan penyelesaian perkara dengan adanya petunjuk teknis (80%)** → Sebagian besar merasa terbantu dengan petunjuk teknis, sementara 20% merasa belum cukup membantu.
- **Kemampuan menghadapi penyelesaian perkara hukum dengan petunjuk teknis (80%)** → Mayoritas merasa cukup terbantu dengan petunjuk teknis dalam menghadapi perkara hukum.

8. **Tahapan Pembentukan Badan Adhoc**

- **Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik (80%)** → Sebagian besar Badan Adhoc menyampaikan laporan kinerja, baik secara hard copy maupun soft copy.
- **Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan evaluasi kinerja sesuai ketentuan (80%)** → Mayoritas telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai prosedur.
- **Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja internal dengan baik (100%)** → Semua Badan Adhoc melaporkan hubungan kerja yang baik dengan internal mereka.
- **Jumlah PPK/PPS yang menerima aduan masyarakat (40%)** → Sebagian PPK/PPS menerima laporan terkait pelanggaran kode etik, dengan 6 orang di 2 kecamatan diberhentikan.
- **Jumlah PPK/PPS yang terbukti melakukan pelanggaran Pilkada (40%)** → Sebanyak 6 orang dinyatakan bersalah, sementara 60% menyatakan tidak ada pelanggaran.

9. Proses Penyusunan Dafrar Pemilih

Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

- **Persentase kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit (100%)** → Data kesesuaian berada di rentang 81-100%.
- **Kecukupan jadwal tahapan penyusunan daftar pemilih (80%)** → Sebagian besar merasa jadwal sudah cukup, sementara 20% menyatakan tidak cukup.
- **Persentase akses masyarakat ke link cekdptonline (60-100%)** → Sebanyak 60% masyarakat mengakses link cekdptonline dalam kisaran 81-100%, sementara sebagian kecil 0-20%.
- **Persentase masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih (40-100%)** → Sebagian besar berada dalam kisaran 41-100%, sementara 40% berada di rentang 0-20%.
- **Faktor perubahan penetapan DPT (60%)** → Perubahan disebabkan pemilih pindah domisili, meninggal, pemilih pemula, atau tanggapan dalam rapat pleno.

Instrumen Tugas Pantarlih

- **Persentase kesesuaian jumlah Pantarlih dengan TPS yang terbentuk (100%)** → Kesesuaian berada di rentang 81-100%.
- **Persentase Pantarlih yang menggunakan e-Coklit (100%)** → Semua Pantarlih menggunakan e-Coklit dengan persentase 81-100%.

Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih

- **Kesesuaian PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih (80%)** → Mayoritas menyatakan PKPU sudah sesuai, namun ada perbedaan istilah antara PKPU 7/2024 dan PKPU 17/2024 yang perlu diperjelas.
- **Evaluasi PKPU untuk Pilkada selanjutnya (100%)** → Perlu penguatan posisi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK), penyempurnaan istilah DPTb dan DPK agar tidak membingungkan penyelenggara, serta penambahan formulir bagi pemilih yang meninggal.
- **Kesesuaian SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih (80%)** → Sudah sesuai, namun perlu tambahan formulir untuk pemilih yang meninggal dan mekanisme bagi pemilih yang pindah memilih karena pekerjaan.

- **Evaluasi Ecoklit (100%)** → Perlu fitur tambahan seperti dukungan untuk semua jenis HP, penghapusan dokumen yang salah unggah, serta perbaikan server agar tidak mudah down.
- **Evaluasi Sidalih (100%)** → Perlu fitur tambahan seperti integrasi dengan data kependudukan yang update, upload dokumen pemilih TMS, dan pemindahan pemilih antar desa tanpa harus men-TMS-kan mereka.
- **Evaluasi Bimtek Ecoklit dan Sidalih (100%)** → Bimtek sudah sesuai, namun perlu peningkatan durasi dan jumlah sesi bimtek agar lebih efektif.

10. Proses Penyusunan Dafrar Pemilih

- **Evaluasi Sirekap Pilkada (100%)** → Perlu dukungan untuk semua jenis HP, perbaikan sistem login, dan peningkatan server agar tidak mudah down.
- **Persentase Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada (100%)** → Data berada di kisaran 81-100%.
- **Kecepatan memperoleh data hasil TPS melalui SIREKAP (100%)** → Rentang waktu bervariasi dari 10 menit hingga 1 jam setelah C hasil tersedia.
- **Akurasi pembacaan SIREKAP (100%)** → Akurasi tinggi, berada dalam rentang 80-100%.
- **Jumlah TPS yang gagal mengakses SIREKAP (100%)** → Semua TPS berhasil mengakses SIREKAP.
- **Persentase Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada (100%)** → Data berada di kisaran 81-100%.
- **Kecepatan memperoleh data hasil Kabupaten/Kota melalui SIREKAP (100%)** → Waktu akses berkisar antara 1 jam hingga 1 hari.
- **Persentase Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada (100%)** → Data berada di kisaran 81-100%.
- **Kecepatan memperoleh data hasil tingkat Provinsi melalui SIREKAP (100%)** → Rentang waktu akses berkisar antara 1 jam hingga 1 hari.
- **Evaluasi Bimtek Sirekap Pilkada (100%)** → Sudah sesuai, namun perlu dilakukan lebih dari satu kali agar pemahaman lebih optimal.

4.1.2. Potret Penyelenggaraaan Non Tahapan Pemilihan

- **Ketersediaan petunjuk teknis penyusunan dokumen kerja sama (66.7%)** → Sebagian besar menyatakan petunjuk teknis tersedia, tetapi 33.3% menyatakan tidak ada.

- **Pemahaman petunjuk teknis penyusunan dokumen kerja sama (66.7%)** → Mayoritas dapat memahami petunjuk teknis, tetapi ada yang menganggap Surat Edaran Nomor 846 Tahun 2021 tidak mengatur teknis penyusunan dokumen kerja sama.
- **Aspek yang belum diatur dalam petunjuk teknis (33.3%)** → Sebagian menyatakan belum ada petunjuk teknis spesifik yang mengatur penyusunan dokumen kerja sama.
- **Ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik (100%)** → Semua pihak menyatakan ruang lingkup kerja sama telah berjalan sesuai ketentuan.
- **Evaluasi kerja sama secara berkala (66.7%)** → Evaluasi dilakukan secara berkala, tetapi 33.3% menyatakan belum dilakukan evaluasi.
- **Kendala dalam pelaksanaan kerja sama (100%)** → Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama.
- **Jumlah dokumen kerja sama (66.7%)** → Sebagian besar melaporkan 4-6 MoU dan PKS, sementara 33.3% memiliki lebih dari 6 dokumen kerja sama.
- **Kecukupan regulasi logistik Pilkada (100%)** → Regulasi dinilai sudah mencukupi untuk pengelolaan logistik Pilkada.
- **Ketersediaan dokumen penetapan jumlah kebutuhan logistik Pilkada (100%)** → Semua satker memiliki dokumen penetapan kebutuhan logistik.
- **Kesesuaian jumlah kebutuhan logistik dengan pemungutan suara (100%)** → Jumlah kebutuhan logistik sudah sesuai.
- **Spesifikasi logistik Pilkada sesuai dengan kebutuhan (100%)** → Semua pihak menyatakan spesifikasi logistik telah sesuai.
- **Ketersediaan anggaran sebelum pengadaan barang/jasa (100%)** → Anggaran tersedia sebelum pengadaan logistik.
- **Kecukupan anggaran hibah Pilkada dalam DIPA (100%)** → Anggaran hibah dalam DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik.
- **Pembagian kewenangan dalam penyediaan logistik antara provinsi dan kabupaten/kota (100%)** → Terdapat pembagian kewenangan dalam penyediaan logistik.
- **Penempatan personil untuk pengamanan produksi surat suara (33.3%)** → Hanya sebagian yang menempatkan personil, sedangkan 66.7% tidak melakukannya.

- **Personil pengamanan yang dibekali pengetahuan terkait pengamanan surat suara (66.7%)** → Sebagian personil telah dibekali pengetahuan, tetapi 33.3% belum mendapatkan pelatihan.
- **Ketersediaan dokumen jadwal tahapan pengelolaan logistik Pilkada (100%)** → Semua pihak memiliki dokumen jadwal tahapan pengelolaan logistik.
- **Perhitungan mitigasi risiko dalam pengelolaan logistik Pilkada (66.7%)** → Sebagian besar telah memperhitungkan risiko, tetapi 33.3% menyatakan belum dilakukan. Berikut adalah analisis lengkap berdasarkan data yang diberikan:
- **Dokumen kerja sama dengan aparat keamanan (66.7%)** → Sebagian besar memiliki dokumen kerja sama dengan TNI dan Polri, namun masih ada 33.3% yang belum memiliki dokumen ini.
- **Stakeholder yang terlibat dalam pengamanan logistik Pilkada (100%)** → Terdiri dari berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, kejaksaan, rumah sakit, BPJS, Kesbangpol, Bank BJB Syariah, PT Pos Indonesia, Polres Metro, Kodim, Satpol PP, serta SOP pengawalan distribusi logistik ke TPS.
- **Dokumen prosedur pengamanan distribusi logistik (100%)** → Semua pihak memiliki dokumen prosedur pengamanan distribusi logistik.
- **Dokumen pemetaan daerah prioritas distribusi logistik (100%)** → Semua pihak telah memiliki dokumen pemetaan untuk daerah prioritas distribusi logistik.
- **Variabel dasar dalam pemetaan daerah prioritas distribusi logistik (100%)** → Variabel utama meliputi jarak, kesiapan penyimpanan logistik di PPK dan PPS, serta kategori 3T (Tertinggal, Terluar, Tersulit).
- **Dokumen pemetaan moda transportasi distribusi logistik (100%)** → Semua pihak memiliki dokumen pemetaan moda transportasi untuk distribusi hingga TPS.
- **Pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi (100%)** → Seluruh satker telah melakukan pengecekan kelayakan moda transportasi sebelum digunakan.
- **Ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (66.7%)** → Sebagian besar memiliki jaringan internet dengan cakupan 81-100%, namun ada yang masih di kisaran 61-80%.

- **Ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS, dan KPPS (66.7%)** → Mayoritas memiliki jaringan internet dengan cakupan 81-100%, sementara 33.3% masih di 61-80%.
- **Penggunaan template website Pusdatin di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (100%)** → Semua satker telah menggunakan template website yang disediakan oleh Pusdatin.
- **Pemasangan alat monitoring di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (66.7%)** → Sebagian besar masih rendah (0-20%), hanya 33.3% yang sudah mencapai 61-80%.
- **Persentase serangan siber dalam tahapan Pilkada (100%)** → Tidak ada serangan siber yang signifikan (0-20%).
- **Upaya mitigasi serangan siber (100%)** → Upaya yang dilakukan meliputi backup data secara rutin dan pendampingan dari BSSN.
- **Tindakan dalam menangani serangan siber (100%)** → Menggunakan sistem operasi Windows original dan mendapatkan pendampingan dari BSSN untuk mencegah serangan.
- **Jenis alat dan teknologi yang digunakan (100%)** → Termasuk perangkat elektronik seperti jaringan internet dan CCTV, serta komputer dengan spesifikasi yang memadai. Namun, beberapa detail masih perlu klarifikasi dari Pusdatin.

4.1.3. Potret Kelembagaan

- **Monitoring dan Evaluasi program Pilkada melalui aplikasi (66.7%)** → Sebagian besar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi, tetapi masih ada yang belum menerapkannya.
- **Penyusunan dokumen laporan dalam setiap kegiatan monitoring dan evaluasi (100%)** → Semua satker telah menyusun laporan untuk setiap kegiatan monitoring dan evaluasi.
- **Kemudahan memahami pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih (100%)** → Semua satker menyatakan bahwa pedoman ini mudah dipahami.
- **Pembuatan kerangka acuan kerja program sosialisasi pendidikan pemilih (66.7%)** → Sebagian besar satker telah menyusun kerangka acuan kerja, namun masih ada yang belum melakukannya.

- **Kesesuaian kegiatan sosialisasi dengan rencana yang ditetapkan (100%)** → Semua kegiatan sosialisasi yang terlaksana sesuai dengan rencana.
- **Sosialisasi yang direncanakan tetapi tidak terlaksana (33.3%)** → Terdapat satu satker yang memiliki kegiatan sosialisasi yang gagal dilaksanakan.
- **Sosialisasi yang tidak mencapai target (0%)** → Tidak ada kegiatan sosialisasi yang gagal memenuhi target yang ditetapkan.
- **Dasar penentuan target sasaran pendidikan pemilih (66.7%)** → Mayoritas satker menentukan target berdasarkan arahan pimpinan, sementara lainnya menggunakan data pemilih.
- **Sosialisasi pendidikan pemilih dengan segmentasi pemilih pemula (100%)** → Semua satker telah melaksanakan sosialisasi bagi pemilih pemula.
- **Sosialisasi pendidikan pemilih dengan segmentasi pemilih perempuan (100%)** → Semua satker telah melaksanakan sosialisasi bagi pemilih perempuan.
- **Sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih disabilitas (100%)** → Semua satker telah melakukan sosialisasi bagi pemilih disabilitas.
- **Sosialisasi pendidikan pemilih untuk masyarakat umum (100%)** → Semua satker telah melakukan sosialisasi bagi masyarakat umum.
- **Dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah target audiens pendidikan pemilih (66.7%)** → Mayoritas satker menentukan target berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan, sedangkan sebagian lainnya mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan berkolaborasi dengan pihak eksternal.
- **Jumlah peserta yang terlibat dalam pendidikan pemilih** → Jumlah peserta bervariasi antara 2.480 orang hingga 31.000 orang.
- **Jenis kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan** → Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti tatap muka, sosialisasi berbasis segmen pemilih, KPU Goes to Campus/School, kegiatan komunitas, media sosial, media luar ruang, konser musik, CFD, dan lainnya.
- **Tingkat partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara Pilkada 2024** → Partisipasi pemilih bervariasi antara 58.26% hingga 72.63%, dengan beberapa daerah mengalami peningkatan dari Pilkada sebelumnya.
- **Penggunaan instrumen penilaian tingkat pengetahuan peserta (33.3%)** → Hanya sebagian kecil satker yang menggunakan instrumen penilaian, sementara mayoritas tidak menggunakannya.

- **Pengukuran tingkat kesadaran pemilih setelah sosialisasi (33.3%)** → Hanya sebagian kecil satker yang mengukur kesadaran pemilih setelah mengikuti sosialisasi.
- **Keberhasilan pelaksanaan pendidikan pemilih** → Keberhasilan dinilai dari peningkatan partisipasi pemilih, pemahaman masyarakat tentang pemilu, serta berkurangnya jumlah suara tidak sah.
- **Faktor penghambat kegiatan sosialisasi (33.3%)** → Beberapa satker mengalami hambatan karena jadwal tahapan yang beririsan, sementara lainnya tidak menghadapi kendala.
- **Satker melibatkan badan adhoc dalam pelaksanaan kegiatan** (100%) → Semua satker menyatakan melibatkan badan adhoc dalam kegiatan.
- **Satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan** (100%) → Semua satker melibatkan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- **Kegiatan sosialisasi & penyebaran informasi Pilkada melalui media sosial dan website KPU masuk dalam dokumen perencanaan** (66.7%) → Sebagian besar menyatakan masuk dalam dokumen perencanaan, namun ada yang menyatakan tidak (33.3%).
- **Dokumen perencanaan KPU mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)** (100%) → Semua responden menyatakan kebutuhan ini telah dipertimbangkan.
- **KPU merespon dan menyikapi pemaksimalan media sosial sebagai cara handal untuk diseminasi informasi Pilkada** (100%) → Semua KPU Prov/Kab/Kota menyatakan telah menyikapi dan merespon pemanfaatan media sosial secara optimal.
- **KPU memiliki SOP manajemen krisis terhadap pemberitaan media yang berimplikasi pada respon masyarakat** (0%) → Tidak ada KPU yang memiliki SOP manajemen krisis terkait pemberitaan di media.
- **Jenis dukungan yang diberikan dalam sosialisasi Pilkada** → Beragam, meliputi fasilitasi dan pelaksanaan sosialisasi oleh stakeholder, sosialisasi melalui radio (Star dan Smooth Radio), serta optimalisasi iklan layanan masyarakat dan media luar ruang.

- **Jumlah lembaga/pemangku kepentingan yang terlibat** → Bervariasi, dari 52 lembaga, sosialisasi kepada 21 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), hingga lebih dari 200 elemen, termasuk LSM, NGO, ormas, pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat adat yang melakukan 80 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024.
- **Ruang lingkup daerah dukungan** → Bervariasi dari 0-20% (33.3%), 21-40% (33.3%), hingga cakupan luas 81-100% (33.3%). •
- **Manfaat bagi masyarakat** (33.3%) → Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi Pilkada 2024 memberikan manfaat seperti meningkatkan budaya politik aktif, kesadaran memilih, dan potensi pemimpin yang sesuai harapan masyarakat.
- **Penyaluran anggaran untuk badan adhoc sesuai jadwal** (100%) → Semua responden menyatakan penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- **Anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sesuai kebutuhan** (100%) → Semua responden menyatakan anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc.
- **Laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc tepat waktu** (33.3%) → Laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc telah disampaikan tepat waktu, namun ada ketidakharmonisan antara badan adhoc dan sekretariatnya.
- **Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai petunjuk teknis** (100%) → Semua responden menyatakan laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan.
- **Format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami** (100%) → Semua responden menyatakan format laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc.
- **Pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc** (33.3%) → Sebagian besar responden mengungkapkan pemanfaatan aplikasi SITAB maksimal, meskipun beberapa daerah pedesaan mengalami kesulitan akibat keterbatasan jaringan internet.
- **Aplikasi SITAB membantu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan** (100%) → Semua responden menyatakan aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024.

- **Sarana dan prasarana untuk penggunaan aplikasi SITAB memadai** (100%) → Semua responden menyatakan sarana dan prasarana yang ada untuk penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai.
- **Tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa penginputan akun belanja untuk Badan Adhoc telah sesuai dan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota
- **Metode pelaksanaan Bimtek dilakukan secara berjenjang atau terpusat (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Bimtek dilakukan secara berjenjang
- **Jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk Badan Adhoc dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota
- **Tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc dalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa sekretariat badan adhoc telah memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan
- **Jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa proses pertanggungjawaban anggaran hibah telah selesai dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota
- **Tingkat pemahaman satker dalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa satker telah memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan
- **Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP.
- **KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa PIPK telah disusun dan disampaikan.

- **Pelaksanaan penatausahan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa penatausahan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku.
- **KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa KPU tidak memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal.
- **KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa KPU tidak memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal.
- **Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa pemindahtanganan persediaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP) (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa pemindahtanganan Persediaan Pemilihan tidak memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.
- **Pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa pemusnahan Persediaan Pemilihan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien.
- **Pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa wasdal telah dilakukan secara efektif.

- **Upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa upaya pengendalian pengelolaan aset sudah dilakukan secara optimal.
- **Jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan cukup tersedia.
- **Sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah dilakukan.
- **Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Rencana Umum Pengadaan telah diumumkan di Aplikasi SIRUP.
- **Masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak.
- **PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dengan baik.
- **Terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (100%)** → Semua responden menyatakan tidak ada kendala dalam proses pengumuman di Aplikasi SIRUP.
- **Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa satuan kerja KPU tidak memiliki Admin RUP.
- **Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Rencana Umum Pengadaan telah diumumkan.
- **Ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak (100%)** → Semua responden menyatakan tidak ada kendala dalam proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak.
- **PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa PPK telah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog.

- **PPK melakukan pencatatan paket Pekerjaan NonTender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa PPK tidak melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE.
- **APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa APIP melakukan reviu efisiensi/efektivitas secara periodik.
- **APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko (100%)** → Semua responden menyatakan setuju bahwa APIP memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko.
- **APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik.
- **APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik.
- **APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya.
- **Seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa seluruh pegawai di Satker diwajibkan menandatangani Pakta Integritas.
- **Pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa pimpinan Satker memiliki kepemimpinan yang kondusif.
- **Rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan.
- **Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya.

- **Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko.
- **Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko.
- **Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Satker memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh.
- **Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Satker memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN.
- **Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi yang ada secara optimal (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi yang ada secara optimal.
- **Satker telah mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui SIM secara terus menerus (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa Satker telah mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui SIM secara terus menerus.
- **Pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan.
- **Pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi, namun beberapa belum.
- **Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

- **Kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing wilayah (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi.
- **Jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa jumlah ASN yang memiliki sertifikat PBJ adalah 38 orang.
- **Untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC.
- **Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa seluruh Badan Adhock, baik PPK atau PPS, menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek.
- **Ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek (100%)** → Semua responden menyatakan tidak ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU.
- **Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa semua KPU Kabupaten/Kota menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU.
- **Ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa tidak ada KPU Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU.
- **Fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa fasilitator sudah sesuai dalam menyampaikan materi berdasarkan modul.
- **Isi materi sudah sesuai dengan isu-isu strategis terkait pemilihan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa isi materi sudah sesuai dengan isu-isu strategis terkait pemilihan.

- **Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa jam pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi.

4.1.4. Potret Eksternalitas

- **Validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK dilakukan sebelum produksi massal (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa validasi contoh cetak dilakukan oleh PPK sebelum produksi massal.
- **Pengawasan produksi di pabrik dilakukan (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa pengawasan produksi dilakukan di pabrik.
- **Pengawasan produksi di pabrik tidak melibatkan tim pakar (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa pengawasan produksi di pabrik tidak melibatkan tim pakar.
- **Ada dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat (100%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa ada dokumen standarisasi kualitas surat suara, namun beberapa tidak.
- **Ada sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa ada sistem informasi untuk monitoring pengiriman logistik.
- **Tidak ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/Kota (60%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa tidak ada mitigasi, namun beberapa menyatakan ada.
- **Tidak ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota (80%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa tidak ada mitigasi, namun beberapa menyatakan ada.
- **Tidak ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS (80%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa tidak ada mitigasi, namun beberapa menyatakan ada.
- **Jumlah logistik yang diterima sesuai dengan kebutuhan (80%)** → Sebagian besar menyatakan bahwa jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan, namun beberapa tidak.

- **Ada dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa ada dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang yang memadai.
- **Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan kriteria.
- **Pemerintah Daerah berperan mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berperan mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang.
- **Sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada dilakukan setelah diterima dari pabrik (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa sortir dan hitung dilakukan terhadap logistik setelah diterima dari pabrik.
- **Ada standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas logistik selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa ada standar pemeliharaan untuk menjaga kualitas logistik selama disimpan.
- **Ada Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa ada Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan pendokumentasiannya.
- **Satker melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara (100%)** → Semua responden menyatakan bahwa Satker melibatkan instansi luar dalam pemusnahan kelebihan surat suara.

4.2. Analisa Data

Setelah mengetahui sajian data yang diperoleh dari riset sebagaimana dikemukakan sebelumnya, data tersebut dipergunakan untuk menganalisis sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Analisa dilakukan dengan menginterpretasikan data-data tersebut dengan menggunakan pisau analisa berupa tiga teori yang telah dikemukakan di dalam Bab III, yakni teori integritas pemilu, teori manajemen pemilu, dan teori kelembagaan penyelenggara pemilu.

Teori integritas pemilu diposisikan sebagai *grand theory*, karena teori ini menjadi pondasi penting dari teori tata kelola pemilu (*electoral management atau electoral governance*), dan juga teori kelembagaan penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, kelembagaan penyelenggara pemilu yang baik ditambah dengan tata kelola pemilu yang baik akan menjadi kontributor utama bagi terwujudnya integritas pemilu.

Carolien Van Ham mengatakan bahwa integritas pemilu dapat dipahami berdasarkan *concept-based approach* yang mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, dan *process-based approach* yang menekankan kepada proses penyelenggaraan pemilu. Sementara, James mengatakan bahwa integritas pemilu juga dipengaruhi oleh desain organisasi lembaga penyelenggara pemilu terkait sentralisasi; indepedensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel, untuk membuktikan pengaruhnya terhadap performa lembaga penyelenggara pemilu. Poin-poin tersebut menjadi esensi bagi luaran kinerja lembaga penyelenggara pemilu berupa integritas pemilu dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu (James, et al. 2019).

4.2.1. Integritas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Sebagaimana dijelaskan di dalam Bab III, integritas Pemilu/Pemilihan diartikan sebagai tindakan dan kapabilitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam keinginannya untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan berpedoman pada moral dan hukum. Pemilu/Pemilihan tanpa adanya integritas dapat memicu kekosongan dalam proses demokrasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang berakhir pada ketidakstabilan politik.

Meminjam pendapat Carolien Van Ham, integritas Pemilu/Pemilihan dibangun di atas dua pilar, yakni keterpenuhan standar ideal demokrasi dan *electoral governance*. Mengukur integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi berarti memahami integritas pemilu berdasarkan pendekatan konseptual (*concept based approach*), sedangkan mengukur integritas pemilu berdasarkan tata kelola pemilu berarti memahami integritas pemilu berdasarkan pendekatan proses (*proces based approach*).

Sejumlah faktor menjadi penentu integritas pemilu, mulai dari faktor struktural seperti pengalaman historis dengan pemilu demokratis dan ciri ciri sosio-ekonomi masyarakat, faktor institusional yang terfokus pada sistem pemilu dan keberadaan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, hingga faktor relasi aktor-aktor yang terlibat dalam manipulasi pemilu dan pengawasan pemilu (James, et al. 2019).

Penjelasan struktural merujuk pada struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang memengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman sosial. Peneliti menemukan bahwa manipulasi Pemilu/Pemilihan lebih sering terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Faktor institusional menitikberatkan pada peran lembaga-lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses pemilu. Lembaga-lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi pemilu, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat mengurangi tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen.

Faktor aktor berfokus pada keputusan strategis yang diambil oleh aktor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik pemilu tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi pemilu masih bervariasi, namun integritas pemilu cenderung paling tinggi pada pemilu yang memiliki tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas pemilu, sementara dampak pengawasan dari pemantau pemilu internasional dan domestik menunjukkan hasil yang beragam.

Beberapa peneliti meletakkan fokusnya tentang integritas pemilu dalam konteks negatif (Ham, 2015). Lehoucq menaruh fokusnya dalam kegagalan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas yang disebabkan oleh pelanggaran (*election fraud*) dan manipulasi suara (*ballot-rigging*). Hal tersebut akan berdampak pada sentimen publik pada pemilu, yang dapat mengikis atau mendikreditkan pemilu itu sendiri (Silalahi 2022; Lehoucq, 2003).

Konsep lainnya seperti malpraktek pemilu (*election malpractice*), yang utamanya dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (*inequality*), rendahnya tingkat urbanisasi, dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes (Silalahi, 2022; Darnolf, 2012).

Integritas Pemilu/Pemilihan menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam Pemilu/Pemilihan.

Integritas Pemilu/Pemilihan kerap dijadikan bahan perhitungan. Dalam pemilu yang secara prosedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat dan partai bersaing di lapangan yang setara. Namun, ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” pemilu (Norris, 2014).

Malpraktek dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus , ditambah dengan ketidakpuasan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan teori intergitas pemilu tersebut, maka pengukuran (evaluasi) terhadap integritas pemilu serentak tahun 2024 dilakukan dengan mengkaji dimensi-dimensi berikut: a) Keterpenuhan standar ideal demokrasi *electoral*; b) faktor struktural; c) faktor institusional; d) faktor relasi aktor; dan e) pencegahan *election fraud*. Sedangkan penilaian atas tata kelola pemilu sebagai pendekatan proses (*process-based approach*) dan kelembagaan penyelenggara Pemilu/Pemilihan akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

4.2.1.1. Keterpenuhan Standar Ideal Demokrasi Elektoral

Standar ideal demokrasi elektoral yang secara universal diakui adalah *free and fair* atau pemilu/pemilihan yang bebas dan adil. Sedangkan standar ideal demokrasi elektoral di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 22E memperluas standar universal tersebut dengan menambahkan parameter langsung, umum, rahasia, dan jujur.

Asas pemilu ini juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dengan demikian, standar demokrasi elektoral di Indonesia secara lengkap adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. **Perwujudan dan pemenuhan standar "langsung" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024**

Asas langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Perwujudan dan pemenuhan standar "langsung" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 telah dilakukan oleh KPU Provinsi Banten melalui beberapa pendekatan:

a. Pendekatan normatif yakni dengan membuat regulasi teknis yang mengatur proses penyaluran hak pilih oleh pemilih harus dilakukan secara langsung oleh pemilih itu sendiri. Hal ini diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

   Di samping itu, KPU juga mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Memastikan ketersediaan logistik pemilu termasuk surat suara bagi penyandang disabilitas penglihatan, serta fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas. KPU telah menerbitkan Ketuputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 diketahui jumlah Kategori Disabilitas Fisik 9.457 pemilih, kemudian Disabilitas Mental 3.797 pemilih, Disabilitas Sensorik Rungu 1.123 pemilih, Disabilitas Sensorik Netra 2.986 pemilih, Disabilitas Sensorik Wicara 4.037 pemilih, dan Disabilitas Intelektual 1.485 pemilih.

Semua pemilih disabilitas dilayani secara khusus oleh KPU, utamanya Disabilitas Netra dengan adanya desain Alat Bantu Tuna Netra, Penyandang tunanetra akan diberi jenis kertas menggunakan bahan art karton dengan ketebalan 190 gram.

Bentuk dan format surat suara juga dibedakan, bentuk Alat Bantu Tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.

Pada sisi kanan kantong map dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) untuk memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

c. Desain alat bantu tunanetra berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam.

   Nantinya, surat suara akan dibuat menggunakan huruf awas dan huruf braille yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih. Huruf braille yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

d. Untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 bagi tunanetra, KPU Provinsi Banten juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan surat suara bagi tunanetra.

e. Langkah ini dilakukan oleh KPU untuk mengupayakan agar pemilih disabilitas tidak menemui kendala dalam memberikan suaranya secara langsung.

f. Membuat kebijakan penetapan peta TPS yang sedapat mungkin mudah diakses pemilih, sehingga dapat mendorong pemilih untuk hadir langsung di TPS untuk memberikan suaranya.

g. Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten nomor 123 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diketahui jumlah pemilih sebanyak 8.926.662 pemilih dengan rincian 4.495.022 pemilih Laki-laki, dan 4.431.640 pemilih Perempuan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dengan TPS sebanyak 17.231 TPS, terdapat juga TPS Lokasi Khusus yaitu 13 TPS Lokasi Khusus dengan rincian 11 Lapas/Rutan, dan 2 Lokasi Lainnya yaitu Pensatren.

h. Berbagai kebijakan ini dibuat untuk memastikan dan sekaligus memfasilitas agar pemilih dapat memberikan suara secara langsung.

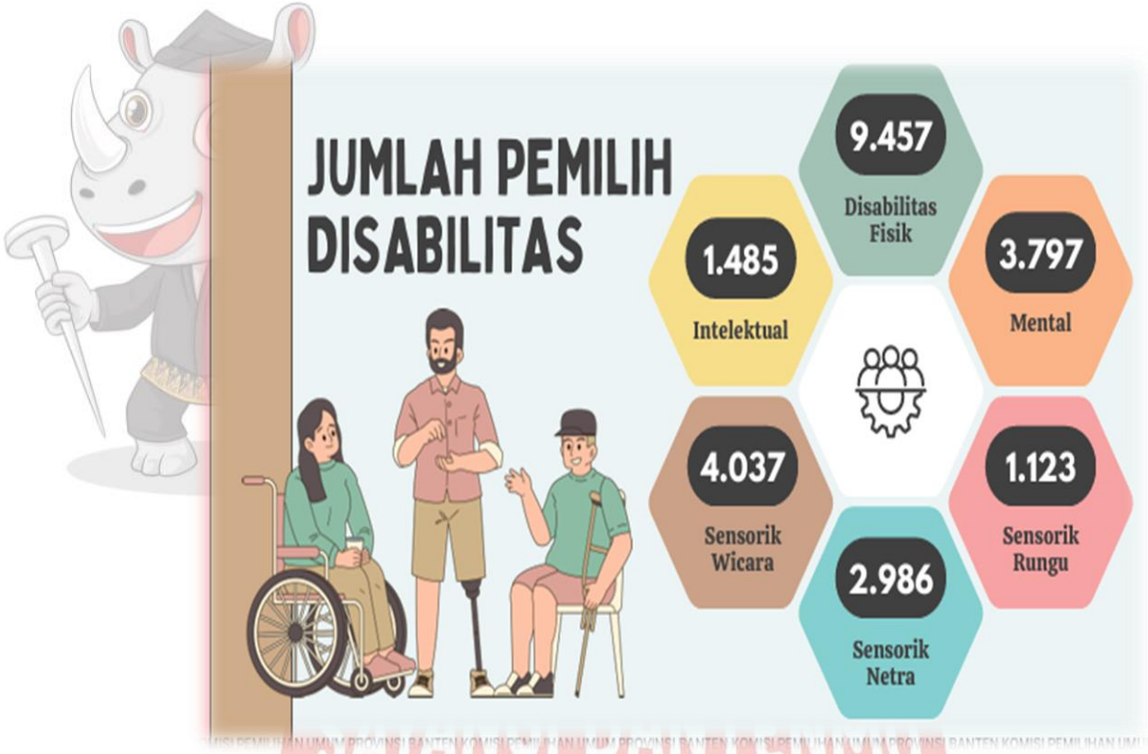

Gambar 4.1 Infografis Jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

Dalam praktiknya, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan yang mencederai standar “langsung” ini.

Angka partisipasi pemilih di TPS mencapai 66,19%, meskipun hasil capaian ini tidak mampu mencapai target kinerja yaitu pada 77,5% namun angka partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 lebih baik daripada yang diraih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 yaitu sebesar 61,97%. Presentasi angka partisipasi pemilih ini dihitung berdasarkan jumlah pemilih di DPT dan DPK.Di sisi lain, tidak ada kasus pelanggaran pemilu yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian suara yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemilih.

Gambar 4.2 Infografis Tingkat Partisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

2. Perwujudan dan pemenuhan standar "umum" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Asas umum berarti bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Perwujudan dan pemenuhan standar "umum" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 telah dilakukan KPU Provinsi Banten melalui :

a. Pembuatan regulasi teknis tentang pendaftaran pemilih dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang dituangkan ke dalam Peraturan KPU

Nomor 7 Tahun 2024 pada Pasal (2) mengatur prinsip-prinsip pendaftaran pemilih yang meliputi:

1) komprehensif, yakni penyusunan Daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
2) inklusif yakni proses pendaftaran pemilih mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih;
3) akurat yakni penyusunan Daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4) mutakhir yakni penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru;
5) terbuka yakni Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat;
6) responsif yakni membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih.;
7) partisipatif yakni membuka partisipasi seluas luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data Pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih;
8) akuntabel yakni memberikan kejelasan fungsi dan tugas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih;
9) pelindungan data pribadi yakni memberikan pelindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya; dan
10) aksesibel yakni memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.

b. Pembentukan dan pelatihan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
c. Pembuatan sistem informasi pendaftaran pemilih (sidalih) yang disertai fitur cekdptonline.
d. Sosialisasi pendaftaran pemilih.

Kinerja pendaftaran pemilih yang optimal oleh KPU menghasilkan Keputusan KPU Provinsi Banten nomor 123 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diketahui jumlah pemilih sebanyak 8.926.662 pemilih dengan rincian 4.495.022 pemilih Laki-laki, dan 4.431.640 pemilih Perempuan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dengan TPS sebanyak 17.231 TPS.

Gambar 4.3 Infografis Jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

3. **Perwujudan dan pemenuhan standar "bebas" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024**

Asas bebas berarti bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Perwujudan dan pemenuhan standar "bebas" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 telah dilakukan KPU Provinsi Banten melalui:

a. Pembuatan regulasi teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara yang secara tegas mengatur tentang tata cara pemungutan suara yang memungkinkan pemilih terbebas dari berbagai pengaruh baik godaan politik uang ataupun intimidasi yang akan mempengaruhi kebebasan dalam menentukan pilihannya.
b. Pemberian pelatihan kepada KPPS mengenai tata cara penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk di dalamnya prosedur dan spesifikasi TPS yang harus ditempatkan di area yang netral, serta TPS bersih dari berbagai atribut peserta pemilihan.
c. Sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada pemilih yang dilakukan tidak hanya oleh KPU Republik Indonesia, tetapi juga KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sosialisasi ini tidak hanya mengangkat topik ajakan untuk hadir di TPS, tapi juga ajakan menolak politik uang sebagai bagian dari upaya mewujudkan asas “bebas” dalam proses pelaksanaan hak pilih.

Dalam praktiknya, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, tidak ditemukan permasalahan yang mencederai standar “bebas” yang dilakukan oleh KPU di wilayah Provinsi Banten.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

4. Perwujudan dan pemenuhan standar “jujur” pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Asas rahasia berarti bahwa dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan cara apa pun. Perwujudan dan pemenuhan standar “rahasia” pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 telah dilakukan KPU Provinsi Banten melalui:

a. Pembuatan regulasi teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara yang secara tegas mengatur tentang kerahasiaan pilihan pemilih, termasuk tata cara pendamping pemilih disabilitas dalam membantu proses pemberian suara.
b. Pemberian pelatihan kepada KPPS mengenai tata cara penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk di dalamnya prosedur dan spesifikasi TPS dan tata cara pemungutan suara bagi pemilih disabilitas.

c. Sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada pemilih termasuk juga kepada penyandang disabilitas yang mungkin membutuhkan bantuan petugas dalam proses pelaksanaan hak pilih.

Dalam praktiknya, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tidak ditemukan permasalahan yang mencederai standar "bebas" yang dilakukan oleh KPU.

5. Perwujudan dan pemenuhan standar "rahasia" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Asas jujur berarti bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perwujudan dan pemenuhan standar "jujur" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah dilakukan KPU Provinsi Banten melalui:

a. Pembuatan regulasi teknis terkait penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan, maupun kelembagaan yang menjunjung tinggi asas kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
b. Menekankan pemahaman dan internalisasi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan pelatihan, orientasi tugas, bimbingan teknis, maupun rapat koordinasi di lingkungan KPU.
c. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan supervisi dalam rangka pembinaan kepada jajaran KPU.

Pelaksanaan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, secara umum berlangsung baik. Mengacu kepada data dari MK dan DKPP, sepanjang tahun 2024 hanya ada 4 kasus dugaan pelanggaran asas jujur secara nasional dalam tahun 2024. Dari 4 kasus tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan MK dan DKPP, tidak ada yang diputus bersalah terkait dengan dugaan pelanggaran asas jujur.

6. **Perwujudan dan pemenuhan standar "adil" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024**

Asas adil berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Perwujudan dan pemenuhan standar "adil" pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah dilakukan KPU Provinsi Banten melalui:

a. Memberikan hak kepada peserta pemilu, calon, pemilih, dan masyarakat umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
b. Menegakkan aturan hukum, termasuk melaksanakan putusan lembaga peradilan, menjatuhkan sanksi kepada jajaran KPU yang melanggar berdasarkan putusan Bawaslu, DKPP, maupun lembaga peradilan

4.2.1.2. Faktor Struktural

Permasalahan struktural dapat dipahami sebagai permasalahan berskala besar, dan bersifat fundamental yang telah terjadi dalam jangka waktu cukup lama sehingga berdampak merugikan. Permasalahan struktural menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian atas integritas pemilu/pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu/pemilihan di Indonesia khusunya di Provinsi Banten, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai permasalahan struktural, yang masih saja berulang terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Permasalahan struktural ini meliputi:

a. Regulasi (undang-undang) pemilu/pemilihan yang kerap berubah. Dalam sejarah pemilu/pemilihan pascareformasi, hampir setiap 5 tahun terjadi perubahan undang-undang pemilu/pemilihan.
b. Uji konstitusionalitas UU Pilkada yang diikuti dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah norma atau memberikan penafsiran norma, yang mana putusan tersebut dikeluarkan pada saat tahapan Pilkada telah sedang berlangsung. Hal ini sering terjadi, dan berdampak kepada munculnya tantangan teknis dan administratif tata Kelola Pemilu/Pemilihan, karena KPU sebagai pelaksana undang-undang dan putusan Lembaga peradilan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap putusan tersebut di tengah himpitan jadwal tahapan Pilkada.

4.2.1.3. Faktor Institusional

Faktor institusional berkaitan dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu/Pemilihan, baik yang berhubungan dengan desain kelembagaan maupun ketersediaan dan ketercukupan daya dukungnya. Faktor institusional menjadi salah satu bagian penting untuk menjadi dasar dalam penilaian integritas Pemilu/Pemilihan. Pembahasan tentang faktor institusional ini akan didalami di dalam bagian IV.B.3 pada pembahasan selanjutnya.

4.2.1.4. Faktor Relasi Aktor

. Salah satu masalah utamanya adalah *framing* media yang kurang tepat terhadap informasi terkait kepemiluan. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik tentang Pemilu/Pemilihan, tetapi framing yang tidak akurat atau bias dapat memicu kontroversi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat. Ketika informasi yang disampaikan oleh media tidak sejalan dengan fakta atau tersaji secara tidak proporsional, hal ini bisa menimbulkan salah paham di kalangan publik. Akibatnya, kepercayaan terhadap proses Pemilu/Pemilihan bisa menurun, dan KPU harus menghadapi tantangan lebih besar dalam menjelaskan atau mengklarifikasi situasi. KPU perlu terus berkolaborasi dengan media, memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan tidak memancing spekulasi yang berpotensi merusak citra lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Selain itu, intervensi dari pihak pemerintah daerah (Pemda), aktor lokal, hingga nasional juga menjadi faktor eksternal yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dengan penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Keterlibatan atau tekanan dari pihak-pihak ini bisa memengaruhi independensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Intervensi semacam ini dapat datang dalam bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu atau upaya memengaruhi keputusan terkait teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Konflik kepentingan yang muncul dari intervensi semacam ini dapat mengganggu integritas Pemilu/Pemilihan, mencederai prinsip-prinsip demokrasi, dan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pemilu/Pemilihan.

4.2.2. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Electoral governance merupakan esensi utama dalam integritas Pemilu/Pemilihan yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilihan, mulai dari proses pra-pemilu, saat pemilu, hingga setelah pemilu. Tata kelola pemilu telah diatur dalam undang-undang pemilu. Secara fundamental, penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam tata kelola tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024, tidak seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, meskipun secara umum manajemen penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 yang diterapkan oleh KPU telah mampu memfasilitasi terselenggaranya Pilkada dengan baik. Berdasarkan data evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten maupun informasi evaluatif yang disampaikan oleh pihak eksternal dari kalangan akademisi, pemantau pemilu maupun tokoh masyarakat menunjukkan potret penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

4.2.2.1. Tata Kelola Pendaftaran Pemilih

Penata kelolaan penyelenggaraan tahapan pendaftaran pemilih dilakukan oleh KPU secara cermat dan profesional, dengan cara menyusun peraturan teknis pendaftaran pemilih, menetapkan pedoman teknis pendaftaran pemilih, merekrut petugas Pantarlih dan melatihnya, mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-coklit dan sidalih, mengembangkan kanal cekdptonline, serta melakukan sosialisasi pendaftaran pemilih secara masif kepada masyarakat.

Berdasarkan evaluasi, jadwal tahapan pada proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinyatakan sudah cukup.

Laporan penyelenggaraan tahapan menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menambah waktu pada tahapan yang telah ditentukan. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengakses link cekdptonline juga menunjukkan hasil yang positif, meskipun tidak ada data spesifik mengenai jumlah akses dibandingkan dengan jumlah pemilih. Dalam hal pemantauan, jumlah Pantarlih dinyatakan sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terbentuk, dan persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit mencapai 100%. Kesesuaian PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih juga telah terverifikasi, dengan rekomendasi perbaikan untuk pemilu/Pemilihan selanjutnya, seperti Penambahan Formulir Surat Pernyataan Pemilih yang telah meninggal Dunia, dan Menyesuaikan dengan tahapan pencalonan, pada pasal 22 ayat 3 peserta rapat pleno diantaranya tim Pasangan Calon sedangankan di tahapan pencalonan belum ada penetapan calon kepala daerah.

Pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU berupa SK 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada, dinyatakan mudah difahami dan sesuai dalam pelaksanaanya, dengan rekomendasi perbaikan Penambahan Formulir Surat Pernyataan Pemilih yang telah meninggal Dunia, dan menyesuaikan dengan tahapan pencalonan, peserta rapat pleno diantaranya tim Pasangan Calon sedangankan di tahapan pencalonan belum ada penetapan calon kepala daerah.

Dalam prosesnya, penutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, diawali Pada tanggal 19 Mei 2024 KPU Provinsi Banten menerima data hasil sinkronisasi dari KPU Republik Indonesia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Data tersebut merupakan data Pemilu Tahun 2024 yang dimiliki oleh KPU yang disinkronisasi dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut diserahkan kepada KPU Provinsi Banten sejumlah 8.859.352 pemilih, dengan pemilih Laki-laki sejumlah 4.453.747 dan pemilih Perempuan sejumlah 4.405.605.

Kemudian KPU Provinsi Banten menyerahkan data tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten untuk dilakukan pemutakhiran dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pandeglang	35	339	494.357	473.018	967.375
2	Lebak	28	345	536.266	511.772	1.048.038
3	Tangerang	29	274	1.186.329	1.168.855	2.355.184
4	Serang	29	326	613.074	597.494	1.210.568
5	Kota Tangerang	13	104	686.475	698.680	1.385.155
6	Kota Cilegon	8	43	165.031	164.710	329.741
7	Kota Serang	6	67	256.447	253.881	510.328
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	515.768	537.195	1.052.963
Jumlah		**155**	**1.552**	**4.453.747**	**4.405.605**	**8.859.352**

Tabel 4.1 Jumlah DPT di Provinsi Banten

Data tersebut merupakan data awal yang akan digunakan sebagai bahan pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melakukan pemetaan TPS yang dibantu dengan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Selain melakukan pemetaan TPS, KPU Kabupaten/Kota juga menghitung kebutuhan Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang nantinya akan bekerja ke rumah-rumah pemilih untuk memastikan data yang dimiliki oleh KPU dengan data yang ada dilapangan dan juga estimasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) untuk penempelan striker pada saat pelaksanaan coklit berlangsung.

Pada tanggal 1 Juni 2024 KPU Provinsi Banten melakukan Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Jmlh Kec	Jmlh Desa/ Kel	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P	Jmlh TPS	Kebutuhan Pantarlih	Jmlh KK
1	Pandeglang	35	339	494.357	473.018	967.375	1.915	3.654	461.268
2	Lebak	28	345	536.266	511.772	1.048.038	1.958	3.862	487.733
3	Tangerang	29	274	1.186.329	1.168.855	2.355.184	4.428	8.706	1.070.893
4	Serang	29	326	613.074	597.494	1.210.568	2.330	4.528	539.694
5	Kota Tangerang	13	104	686.475	698.680	1.385.155	2.689	5.173	610.103
6	Kota Cilegon	8	43	165.031	164.710	329.741	643	1.225	144.177
7	Kota Serang	6	67	256.447	253.881	510.328	970	1.899	223.456
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	515.768	537.195	1.052.963	2.052	3.893	449.323
Jumlah		**155**	**1.552**	**4.453.747**	**4.405.605**	**8.859.352**	**16.985**	**32.940**	**3.986.647**

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah TPS hasil pemetaan TPS sejumlah 16.985 TPS sedangkan kebutuhan pantarlih sebanyak 32.940 orang. Terjadi perbedaan jumlah TPS dengan jumlah kebutuhan pantarlih disebabkan karena pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 jumlah pemilih per TPS paling banyak sejumlah 600 pemilih, berbeda dengan Pemilihan Umum yang berjumlah 300 pemilih per TPS.

Sehingga bagi TPS yang pemilihnya lebih dari 400 pemilih, maka jumlah pantarlihnya sebanyak 2 orang per TPS. Dari dasar tersebut mengakhibatkan perbedaan antara jumlah TPS dengan jumlah kebutuhan pantarlih.

Pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 merupakan proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih melaksanakan coklit secara langsung dengan cara mendatangi dari rumah kerumah berdasarkan dari data yang sudah dipetakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Pantarlih melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A Daftar Pemilih dengan KTP-el;

b. Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;
c. Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
d. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
e. Mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
f. Mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
h. Mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya.
i. Mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j. Mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
k. Mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan
l. Mencoret Data Pemilih yang berstatus warga negara asing.

Setelah dilakukan coklit, Pantarlih membuat laporan terkait hasil coklitnya yang kemudian disampaikan kepada PPS. Hasil laporan coklit kemudian digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). PPS Menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit setelah itu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulalsi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Desa/Kelurahan. Hasil dari Rapat Pleno tersebut kemudian disampaikan kepada PPK untuk menjadi bahan Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK, selanjutnya hasil Pleno

Rekapitulasi di Tingkat PPK disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara.

No	Kabupaten/ Kota	Jmlh Kec	Jmlh Desa/ Kel	Jmlh TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
1	Pandeglang	35	339	1.926	511.328	483.902	995.230
2	Lebak	28	345	2.058	540.353	513.062	1.053.415
3	Tangerang	29	274	4.483	1.195.281	1.175.408	2.370.689
4	Serang	29	326	2.355	622.321	604.773	1.227.094
5	Kota Tangerang	13	104	2.706	684.292	695.327	1.379.619
6	Kota Cilegon	8	43	646	165.729	164.430	330.159
7	Kota Serang	6	67	992	258.838	254.906	513.744
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	2.060	516.892	539.046	1.055.938
Jumlah		**155**	**1.552**	**17.226**	**4.495.034**	**4.430.854**	**8.925.888**

Tabel 4.3 Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Banten

KPU Provinsi Banten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil dari Rekapitulasi DPS Tingkat KPU Kabupaten/Kota. Pada tanggal 15 Agustus 2024 KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan jumlah pemilih sejumlah 8.925.888 yang terdiri dari 4.495.034 pemilih laki-laki dan 4.430.854 pemilih Perempuan.

Setelah Daftar Pemilih Sementara di tetapkan, selanjutnya yaitu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). PPS mengumumkan Salinan Rekapitulasi DPS per TPS pada papan pengumuman di RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan selama 10 hari. Pengumuman DPS menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengenai perlindungan data pribadi.

Pengumuman tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan. Masukan dan tanggapan tersebut meliputi:

a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat

b. Perbaikan data Pemilih;
c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Masukan dan tanggapan tersebut harus dilengkapi dengan bukti dukung seperti KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang diserahkan kepada PPS. Setelah 10 hari masa tanggapan dan masukan dari Masyarakat, PPS memiliki waktu 5 hari untuk memperbaiki DPS untuk kemudian selanjutnya di rekap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.

Setelah Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan, selanjutnya PPK menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 22 September 2024 KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Provinsi Banten menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 8.926.662 pemilih yang terdiri dari 4.495.022 pemilih Laki-laki dan 4.431.640 pemilih Perempuan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota, 155 Kecamatan, 1.552 Desa/Kelurahan dan 17.231 TPS dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Jmlh TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
1	Pandeglang	1	155	7	162
2	Lebak	2	364	128	492
3	Tangerang	2	801	1	802
4	Kota Tangerang	7	1.818	138	1.956
5	Kota Cilegon	3	1.344	0	1.344
6	Kota Serang	2	909	31	940
7	Kota Tangerang Selatan	1	178	158	336
Jumlah		**18**	**5.569**	**463**	**6.032**

Tabel 4.4 Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Banten

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut didalamnya terdapat Daftar Pemilih di TPS Lokasi Khusus. Pemilih di TPS Lokasi Khusus meliputi:

a. Rumah tahanan atau Lembaga permasyarakatan;
b. Relokasi bencana;
c. Daerah konflik;
d. Lokasi lainnya dengan kriteria:
    1. Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
    2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
    3. Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Lokasi Khusus tersebut dibuat berdasarkan pengajuan dari penanggungjawab, dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, hanya Kabupaten Serang yang tidak memiliki TPS di Lokasi Khusus. Berikut Rekapitulasi DPT di TPS Lokasi Khusus:

No	Kabupaten/ Kota	Masuk				Keluar			
		TPS	L	P	Total	TPS	L	P	Total
1	Pandeglang	102	202	172	374	8	8	9	17
2	Lebak	203	249	204	453	34	28	31	59
3	Tangerang	194	230	184	414	15	13	6	19
4	Serang	168	192	166	358	9	9	2	11
5	Kota Tangerang	108	137	180	317	9	10	6	16
6	Kota Cilegon	75	71	75	146	6	5	2	7
7	Kota Serang	17	27	26	53	11	10	8	18
8	Kota Tangerang Selatan	132	136	181	317	1	0	1	1
Jumlah		**999**	**1.244**	**1.188**	**2.432**	**93**	**83**	**65**	**148**

Tabel 4.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih di TPS Lokasi Khusus pada Provinsi Banten

Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, PPS mengumumkan Salinan Rekapitulasi DPS per TPS pada papan pengumuman di RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan. Pengumuman DPS menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengenai perlindungan data pribadi.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) inilah yang menjadi dasar pemilih yang dapat datang ke TPS, selain itu juga DPT ini menjadi dasar untuk mencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) proses selanjutnya yaitu penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). Daftar Pemilih Pindahan atau DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Pindah memilih dapat di proses hingga H-30 pemungutan suara atau pada tanggal 27 Oktober 2024. Adapun syarat pindah memilih untuk yang hingga tanggal 27 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dipanti sosial atau panti rehabilitasi;
d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
g. Pindah domisili;
h. Tertimpa bencana alam;
i. Bekerja diluar domisilinya.

KPU Provinsi Banten merekap pemilih yang masuk ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Banten dan juga pemilih yang keluar dari TPS asalnya ke berbagai wilayah.

Adapun rekap Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-30 hingga 27 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Masuk				Keluar			
		TPS	L	P	Total	TPS	L	P	Total
1	Pandeglang	102	202	172	374	8	8	9	17
2	Lebak	203	249	204	453	34	28	31	59
3	Tangerang	194	230	184	414	15	13	6	19
4	Serang	168	192	166	358	9	9	2	11
5	Kota Tangerang	108	137	180	317	9	10	6	16
6	Kota Cilegon	75	71	75	146	6	5	2	7
7	Kota Serang	17	27	26	53	11	10	8	18
8	Kota Tangerang Selatan	132	136	181	317	1	0	1	1
Jumlah		**999**	**1.244**	**1.188**	**2.432**	**93**	**83**	**65**	**148**

Tabel 4.6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-30 Provinsi Banten

Sedangkan untuk syarat pindah memilih sampai H-7 atau sampai dengan 20 November 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
d. Tertimpa bencana alam;

Rekap Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-7 hingga 20 November 2024 yaitu sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Masuk				Keluar			
		TPS	L	P	Total	TPS	L	P	Total
1	Pandeglang	261	424	228	652	452	443	221	664
2	Lebak	514	736	490	1.226	664	707	460	1.167
3	Tangerang	351	476	292	768	731	646	400	1.046
4	Serang	680	575	459	1.034	710	677	475	1.152
5	Kota Tangerang	718	1.023	571	1.594	932	957	660	1.617
6	Kota Cilegon	158	314	180	494	209	197	128	325
7	Kota Serang	678	970	596	1.566	615	922	596	1.518
8	Kota Tangerang Selatan	1.434	1.412	1.168	2.580	1.057	1.433	1.114	2.547
Jumlah		**4.794**	**5.930**	**3.984**	**9.914**	**5.370**	**5.982**	**4.054**	**10.036**

Tabel 4.7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-7 Provinsi Banten

Selain data diatas, pemilih yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilh Tetap (DPT) atau dalam Pemilih Pindahan (DPTb) dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 jika memiliki kartu identitas, sehingga dapat mencoblos di TPS dimana dia tinggal sesuai dengan alamat administrasi kependudukannya (KTP) yang disebut dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Adapun Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pandeglang	354	377	731
2	Lebak	341	335	676
3	Tangerang	3.310	3.467	6.777
4	Serang	772	759	1.531
5	Kota Tangerang	1.389	1.490	2.879
6	Kota Cilegon	444	441	885
7	Kota Serang	1.036	925	1.961
8	Kota Tangerang Selatan	1.171	1.304	2.475
Jumlah		**8.817**	**9.098**	**17.915**

Tabel 4.8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Provinsi Banten

Secara keseluruhan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

4.2.2.2. Tata Kelola Tahapan Penetapan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pada tahapan penetapan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, diketahui bahwa telah diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pasal 4 ayat (10, adalah sebagai berikut:

a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
b. pendaftaran Pasangan Calon;

c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan
d. penetapan Pasangan Calon.

Dalam tahapan pencalonan hal yang masih terjadi perbedaan perlakuan dalam pemenuhan dokumen syarat calon, diantaranya penerbitan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Ada yang mengahuruskan dari Pengadilan Tata Niaga, ada juga yang memperbolehkan dari Pengadilan Negeri dari instansi terkait, sementara dalam PKPU disebutkan dari Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya.

Gambar 4.4 Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afiffudin memonitoring kegiatan Penerimaan pendaftaran bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024

Dokumen lainnya juga dalam hal keterangan tidak pernah terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum tempat tinggal sesuai dalam KTP, ini juga tidak dapat mencakup jika calon yang bersangkutan melakukan tindakan pidana diluar wilayah hukum tempat tinggal, hal tersebut dikarenakan catatan kejahatan seseorang tidak terintegrasi secara nasional datanya pada lembaga yang berwenang tersebut, sehingga jika Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum mengeluarkan bahwa yang berangkutan tidak pernah dihukum pidana penjara ini bisa keliru, karena Pengadilan Negeri tersebut tidak mendapatkan informasi bahwa calon tersebut pernah dipidanan di wilayah hukum lain.

Rekomendasi dari kedua kondisi tersebut maka KPU harus lebih intens dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan syarat calon kepala daerah, sehingga apa yang kita butuhkan itu lebih terang kondisinya. dan juga kepada lembaga instansi terkait yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan harus betul-betul menerangkan kondisi seseorang berdasarkan informasi dari seluruh wilayah yang saling terkait.

Proses pencalonan Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas, meliputi persiapan pendaftyaran, pelaksanaan pendaftaran, dan pemeriksaan kesehatan, dan tahapan penelitian persyaratan administrasi calon berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan sebagaimana Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

Untuk mensukseskan tahapan tersebut KPU Provinsi Banten melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan pelaksanaan pencalonan, yang melibatkan KPU Republik Indonessia, KPU kabupaten/Kota, Partai Politik, maupun Instansi terkait dan stakeholders.

1. **Kegiatan Tahapan Persiapan Pendaftaran**

   Sesuai dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan pencalonan dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 s.d 23 September 2024, dimulai dari tahapan pendaftaran hingga dengan penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. KPU Provinsi Banten dalam tahapan persiapan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya untuk penyebaran informasi dan penyamaan pemahaman baik kepada KPU Kabupaten/Kota maupun kepada Pasanagn Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melaui Partai Politik calon Pengusul atau kepada Tim Pasangan Calon.

   Dalam mempersiapkan pelaksanaan tahapan pencalonan KPU Provinsi Banten melaksanakan beberapa kegiatan, diataranya:

   a. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 18 s.d 20 Juli 2024 bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, dengan peserta dari KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten masing-masing 5 (lima) orang terdiri dari, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Dalam kegiatan tersebut KPU Provinsi Banten mengundang beberapa narasumber dari Instansi terkait dengan syarat calon, diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Polda Banten, dan Pengadilan Negeri Serang.

b. Rapat koordinasi Persiapan Pendaftaran pada Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Hotel Le Dian Kota Serang. Dalam kegiatan tersebut peserta yang diundang adalah Para Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Banten.

Dalam kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait beberapa dokumen syarat calon yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Dalam rangka penjelasan pemenuhan dokumen syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Banten mengundang narasumber dari Pengadilan Negeri Tanagerang Kelas IA Khusus, disini yang akan dijelaskan adalah terkait syarat dokumen surat keterangan pailit.

Narasumber menjelaskan mekanisme pembuatan surat keterangan yang di keluarkan oleh pengadilan negeri Tangerang Kelas IA Khusus, dalam penjelasan surat keterangan ini Fitras menjelaskan beberapa surat keterangan yakni:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karna kealpaan ringan atau Alasan Politik;
5. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang secara Perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang merugikan Negara.

Surat keterangan Tidak sedang Pailit hanya dapat dibuat di pengadilan Niaga dimana dalam hal ini pengadilan yang dapat memproses surat keterangan tersebut di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA dimana wilayah hukumnya yakni Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Dalam memproses surat keterngan tidak sedang dalam keadaan Pailit di pengadilan Niaga, bisa di proses dalam Apilikasi www.eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dimana dalam prosesnya pembuat surat keterangan bisa mendaftarkan melalui apilkasi tersebut dengan menginput data diri, dokumen elektronik seperti KTP, Paspor, SIM, Dokumen SKCK yang masih berlaku dan Dokumen Elektronik Surat Permohonan yang di produksi dari Aplikasi.

Waktu yang dibutuhkan dalam proses yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Niaga/Militer paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima, dalam pembuatan permohonan surat keterangan tersebut dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani maupun rohani yang dapat menggangu kemampuan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Alur secara umum pemeriksaan kesehatan pasangan calon:

a. KPU Menentukan 1 (satu) rumah sakit atas dasar rekomendasi Dinas Kesehatan;
b. Rumah sakit ditetapkan melalui Surat Keputusan;
c. KPU Provinsi Banten bersama Pihak Rumah Sakit terpilih membentuk Tim Kesehatan;
d. Pasangan yang memenuhi hasil pemeriksaan pemenuhan persayaratan calon mendapatkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dan menandatangani tanda terima
e. Pemeriksaan Pasangan Calon;
f. Dokumentasi Pemeriksaan dan Penilaian kesehatan;
g. Hasil dari pemeriksaan di berikan ke KPU, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penilaian.

Untuk penilaian kesehatan di buat dalam bentuk rapat pleno oleh tim pemeriksa kesehatan. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan dikelompokan menjadi 2 (dua) kategori:

1. Pasangan calon yang dikategorikan mampu merujuk pada pengertian "Fit" dan layak sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Pasangan di kategorikan '*unfit*" merujuk pada pangertian tidak layak menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan Narkoba merupakan indikator penting serta di tujukan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yang dikeluarkan oleh BNN sesuai dengan tingkatannya. Untuk menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) Badan Narkotika Nasional melakukan beberapa proses tahapan pemeriksaan diantaranya:

1. Skrinning menggunakan Instrumen ASSIST;
2. Pemeriksaan Tes Urin (minimal parameter);
3. Pemeriksaan melalui Darah dan Rambut (konfirmasi tes);
4. Asesmen menggunakan instrument ASI V.5.

Selanjutnya dalam proses pemilihan rumah sakit, ketersedian rumah sakit atas rekomendasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia diantarnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) milik pemerintah pusat, 98 (sembilan puluh delapan) milik pemerintah provinsi, 167 (seratus enam puluh tujuh) milik pemerintah kabupaten/kota serta 167 (seratus enam puluh tujuh) milik rumah TNI/POLRI. Tindak lanjut tim KPU dalam menentukan rumah sakit pemeriksaan merujuk pada rumah sakit kelas B dengan ketentuan Keputusan 1090 Tahun 2024 dalam standar Medical Chack Up (MCU) serta lengkap dengan administrasi.

2. Pelaksanaan Pendaftaran

Gambar 4.5 KPU Provinsi Banten menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024, Airin-Ade Sumardi.

Gambar 4.6 KPU Provinsi Banten menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024, Andra Soni-A. Dimyati.

Pelaksanaan pendaftaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubvernur Banten Tahun 2024 hanya dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, karena dari Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan tidak ada yang menyerahkan dan tidak ada yang dinayatakan memeuhi syarat dukungan.

Persyaratan pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. terkait dengan ketentuan tersebut KPU Provinsi Banten telah menetapkan syarat minimal dukungan Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Yahun 2024 yaitu dengan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, bahwa jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024 adalah 6.100.128 suara x 25% = 1.525.032 suara atau 100 kursi x 20% = 20 kursi partai politik atau gabungan partai politik. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2024.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 diubah karena adanya Putusan Mahkamah Kkonstitusi, bahwa pada intinya syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi mengacu kepada perhitungan 25% jumlah kursi partai politik di DPRD Provinsi yang bersangkutan, melainkan berdasarkan kepada perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik pengususl. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 60/PUU-XXII/2024, KPU Republik Indonesia menerbituka Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. adapun salah satu perubahannya pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

a. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut maka KPU Provinsi Banten menindaklanjutinya dengan melakukan perubahan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dengan Keputusan Nomor 103 Tahun 2024 pada tanggal 23 Agustus 2024 menetapkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 adalah 7,5% jumlah seleuruh suara partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 yaitu 7,5% x 6.454.416 = 484.082 suara.

Selain dari pada itu juga adanya syarat calon yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan dalam pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Peratuan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024.

Adapun persyaratan calon dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-citaProklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, danNegara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkatatas atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati;
e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur;
n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, pada daerah yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, hal tersebut merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

Penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Banten dengan ketentuan pelayanan penerimaan pada tanggal 27 – 28 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, sedangkan tanggal 29 Agustus 2024 dimulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB. Untuk dapat berjalan lancarnya kegiatan tersebut KPU Provinsi Banten mempersiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan baik.

Melakukan pembagian tugas kepada seluruh Pegawai KPU Provinsi Banten, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024 itu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan yaitu Silon. Terkait pendaftaran akun silon, bahwa pasangan calon dapat menyampaikan permohonan pembukaan akses akun Silon harus sudah mendapatkan dukungan Partai Politik yang sudah memenuhi syarat dukungannya. Sementara itu sesuai dengan hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 tidak ada partai politik yang memenuhi syarat mengusulkan pasangan calon secara sendiri, dalam hal ini harus gabungan partai politik. Dengan demikian kemungkinan partai politik belum menetapkan gabungannya dalam mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Adapun data pendaftaran atau pembukaan akses Silon untuk pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Nomor dan Tanggal Surat Pembukaan Akses Silon	Petugas Admin Calon
1.	Andra Soni – A. Dimyati	003/PL.02.2-Silon/36/2024 Tanggal 25 Agustus 2024	Satriyadi
2.	Airin – Ade Sumardi	004/PL.02.2-Silon/36/20 Tanggal 26 Agustus 2024	Dimas Pradipta Assuhada

Tabel 4.9 Data pendaftaran paslon di silon Provinsi Banten

Proses pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten selama 3 (hari) sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

a. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 KPU Provinsi Banten pada pukul 08.00 WIB membuka pendaftaran. Hinggal pukul 16.00 WIB tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang hadir untuk mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Terlepas belum adanya pendaftar di hari pertama pendaftaran, KPU Provinsi Banten melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa Tim dari Partai Politik. Karena di hari pertama pendaftaran ini sudah diprediksi tidak bakal ada yang mendaftar, karena partai politik masih belum ada yang meminta akun Silon.

b. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, pada pukul 15:23 WIB pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik untuk didaftarkan sebagaai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., adalah 2.002.613 suara dengan uraian sebagai berikut:

1. Partai Gokar dengan suara sah 932.670;
2. PDI Perjuangan dengan suara sah 853.565;
3. PKN dengan suara sah 9.176;
4. Partai Buruh dengan suara sah 65.322;
5. PBB dengan suara sah 53.030;
6. Partai Gelora dengan suara sah 51.430;
7. Partai Ummat dengan suara sah 37.420

Hasil penelitian dokumen pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik diatas sebagai berikut:

1. Bahwa syarat dukungan telah memenuhi syarat yaitu sebanyak 2.002.613 suara adalah sebanyak 31,03% yang sudah mencukupi dari syarat minimal yang ditetapkan;

2. Dokumen Pencalonan yang diterbitkan oleh Gabungan Partai Politik dinyatakan lengkap dan sudah sesuai;
3. Waktu kedatangan saat pendaftaran yaitu pada tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 15:23 WIB, dinyatakan sesuai dan tidak melebihi waktu yang ditetapkan;
4. Dokumen Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., dinyatakan ada sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
5. Hasil dari proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., dinyatakan Sesuai dengan Syarat Pencalonan dan Lengkap dengan Kesimpulan dinyatakan Diterima.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan lengkap syarat dokumen syarat calon, maka KPU Provinsi Banten memberikan Berita Acara Nomor 440/PL.02.2-BA/36/2024 dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya setelah selesai proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama nama Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E., KPU Provinsi Banten melakukan koordinasi dengan Tim Pasangan Calon Andra Soni – Dimyati sesuai dengan daftar akun Silon yang sudah teregistrasi. Informasi yang didapatkan bahwa pasangan calon tersebut tidak akan mendaftarkan diri di hari ini. Sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal 28 Agustus 2024 tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang datang utnuk mendaftarkan pasangan calon.

c. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, merupakan hari terakhir jadwal Penerimaan pendaftaran pasangan calon pada pukul 13:49 WIB gabungan Partai Politik datang untuk mendaftarkan pasangan calon Andra Soni, S.M., M.AP., - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., yang diusulkan kepada KPU Provinsi Banten. Adapun gabungan partai politik tersebut dengan jumlah suara sah 4.341.539 terdiri dari:

1. Partai NasDem dengan perolehan suara 52.069;
2. PKS dengan perolehan suara 773.102;
3. PAN dengan perolehan suara 442.724;
4. PKB dengan perolehan suara 566.720;
5. Partai Gerindra dengan perolehan suara 886.432;
6. PPP dengan perolehan suara 315.395;
7. Partai Demokrat dengan perolehan suara 586.689;
8. Partai Garuda dengan perolehan suara 27.646;
9. PSI dengan perolehan suara 217.762.

Setelah dilakukan penelitian terhadap syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Andra Soni, S.M., M.AP., - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah gabungan suara sah sebanyak 4.341.539 adalah memenuhi syarat dukungan yaitu sebesar 67,26% suara sah dari minimal syarat dukungan 484.082 atau 7,5% suara sah gabungan partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2024;
2. Dokumen syarat pencalonan dari masing-masing Partai Politik pengusul dinyatakan ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Waktu kedatangan saat pendaftaran yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 13:49 WIB, dinyatakan sesuai dan tidak melebihi waktu yang ditetapkan;
4. Dokumen syarat calon Andra Soni, S.M., M.AP., - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dinyatakan ada dan lengkap;

5. Hasil dari proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama nama Andra Soni, S.M., M.AP., - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., dinyatakan Sesuai dengan Syarat Pencalonan dan Lengkap dengan Kesimpulan dinyatakan Diterima.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan lengkap syarat dokumen syarat calon, maka KPU Provinsi Banten memberikan Berita Acara Nomor 441/PL.02.2-BA/36/2024 dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama nama Andra Soni, S.M., M.AP., - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.7 Tim verifikasi KPU Provinsi Banten memverifikasi berkas Pendaftaran dari bakal paslon

Dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan, dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam tahapan, tidak adanya perpanjangan ataupun penundaan.

Berdasarkan hasil penerimaan pendaftaran, selanjutnya KPU Provinsi Banten akan melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen calon yang diserahkan, namun sebelumnya akan melakukan pemeriksaan Kesehatan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terlebih dahulu. Rekapitulasi daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diterima pendaftarannya adalah sebgai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul	Jumlah Suara Gabungan Partai Pengusul	Waktu Pendaftaran
1.	Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan H. Ade Sumardi, S.E.	1. Partai Gokar 2. PDI Perjuangan 3. PKN 4. Partai Buruh 5. PBB 6. Partai Gelora 7. Partai Ummat	2.002.613 (31.03%)	15:23 WIB
2.	Andra Soni, S.M., M.AP., - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	1. Partai NasDem 2. PKS 3. PAN 4. PKB 5. Partai Gerindra 6. PPP 7. Partai Demokrat 8. Partai Garuda 9. PSI	4.341.539 (67,26%)	13:49 WIB

Tabel 4.10 Data Rekapitulasi Pendaftaran paslon di Provinsi Banten

Adapun jadwal pemeriksaan administrasi terhadap dokumen syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan 2024 sesuai dengan tahapan akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus s.d 4 September 2024 yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan Kesehatan dahulu pada tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2024.

3. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 melalui rapat pleno KPU Provinsi Banten bertempat di hotel Aston Serang.

Gambar 4.8 Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

Penetapan Pasangan Calon Gubernur Baten ini berdasarkan kepada Berita Acara nomor 470/PI.02.2-BA/36/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan atas nama Pasangan Calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., serta Barita Acara Nomor 471/PI.02.2-BA/36/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan atas nama Pasangan Calon Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., bahwa dalam berita acara tersebut kedua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dokumen administrasi.

Rapat pleno secara tertutup ini setelah mencermati seluruh dokumen administrasi dari kedua pasangan calon, menetapkan bahwa bakal pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., serta Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024, penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara nomor 481/PI.02.2-BA/36/2024 tanggal 22 September 2024.

Penetapan ini juga dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

4. Pengundian Nomor Ururt Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024. Pengundian dan penetapan nomor urut pada rapat pleno terbuka KPU Provinsi Banten bertempat di Kantor KPU Provinsi Banten dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., serta Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., Partai Politik pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bawaslu Provinsi Banten, Pj. Gubernur Banten, serta Forkominda Provinsi Banten, Tokoh Masyarakat Provinsi Banten, serta para awak media.

Mekanisme pengundian nomor urut berpedoman pada Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 yang mengatur mekanisme pengundian nomor urut mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.

Dalam tahapan persiapan KPU Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi dengan LO pasangan calon, Bawaslu Provinsi Banten dan *stake holder* terkait untuk persiapan pelaksanaan pengundian nomor urut seperti jumlah tamu undangan, dan tata tertib, mekanisme pemberian tanda pengenal, jumlah pendukung yang diperbolehkan memasuki Lokasi, serta susunan acara. KPU Provinsi Banten juga mempersiapkan perlengkapan dan dokumen pengundian nomor urut yang akan dibacakan oleh KPU Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan pengundian nomor urut pertama-tama pasangan ccalon mengambil bola antrian untuk siapa yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu untuk mengambil nomor urut pasangan calon yang ada dalam tabung yang sudah disediakan. Dalam pengundian nomor antrian, Dimana didalam dotak bola undian terdapat 14 buah bola yang berisi angka 1 sampai dengan 14. Pasangan calon yang mendapatkan angka terendah itu yang akan mendapatkan giliran mengambil tabung nomor urut. Pelaksanaan pengundian nomor urut yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten disusun berdasarkan waktu kedatangan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, untuk mengambil nomor undian urutan pengambilan nomor urut.

Pada kesempatan ini yang mendapatakan giliran pertama untuk mengambil nomor antrian pengambilan nomor urut adalah pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., yang dilakukan pengambilan bola oleh calon Wakil Gubernur H. Ade Sumardi, S.E., Dimana pasangan calon tersebut mendaftarkan diri pada tanggal 28 Agustus 2024. Hasil dari pengambilan bola antrian pengambilan tabung nomor urut pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., yang mendapatkan bola dengan berisi nomor 12 (dua belas).

Gambar 4.9 H. Ade Sumardi mendapat giliran pertama pengambilan Nomor Urut

Selanjutnya giliran pasangan calon Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., yang mendaftarkan diri pada tanggal 29 Agustus 2024, dalam pengambilan bola undian urutan pengambilan tabung nomor urut oleh calon Wakil Gubernur Banten bapak Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. Adapun bola yang diambil berisi nomor 14 (empat belas). Dengan demikian pasangan calon Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., akan mendapatkan giliran pengambilan tabung nomor urut setelah pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E.

Gambar 4.10 H. R Achmad Dimyati Natakusumah mendapat giliran kedua pengambilan Nomor Urut

Prosesi pengambilan undian nomor urut yang berada dalam tabung oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Banten yang mendapatkan kesempatan pertama hasil pengundian antrian adalah pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., dan disusul selanjutnya oleh pasangan calon Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

Gambar 4.11 Hasil dari Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur Banten.

Gambar 4.12 Penetapan Nomor Urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

Hasil dari pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Banten, untuk pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) dan pasangan calon Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., mendapatkan Nomor Urut 2 (dua).

Rapat Pleno Terbuka ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 490/PL.02.3-BA/36/2024 tanggal 23 September 2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

4.2.2.3. Tata Kelola Tahapan Kampanye

Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan, terdapat beberapa catatan penting terkait tata kelola tahapan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, terdapat berbagai masalah yang sering muncul dan memengaruhi kualitas serta integritas proses kampanye. Salah satu isu utama adalah keterlambatan atau ketidakseragaman dalam pelaporan desain Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pilkada. Hal ini berdampak pada keterlambatan KPU dalam memfasilitasi pengadaan APK secara tepat waktu, sehingga proses kampanye menjadi terhambat. Selain itu, penggunaan APK yang tidak ramah lingkungan dan sering kali mengganggu fasilitas umum juga menjadi sorotan.

Ketaatan terhadap regulasi yang mengatur etika, estetika, dan keamanan dalam pemasangan APK sering diabaikan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat. Masalah transparansi dalam laporan dana kampanye juga menjadi perhatian serius. Laporan dana kampanye yang tidak terkendali, tidak transparan, dan tidak akuntabel menciptakan keraguan terhadap Validitas pengeluaran dana peserta pemilihan. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas proses kampanye.

Selain itu, mobilisasi dan politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat desa sering kali terjadi, meskipun sudah ada larangan yang jelas. Tindakan ini menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilu, di mana ASN dan perangkat desa seharusnya bersikap netral tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Penyebaran hoax dan disinformasi juga menjadi ancaman serius dalam kampanye Pilkada. Banyak informasi menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan menjatuhkan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya, yang merusak iklim demokrasi dan memengaruhi pilihan pemilih secara tidak sehat. Selain itu, kampanye terselubung di media sosial selama masa tenang juga sering dilakukan oleh beberapa pihak, meskipun aturan melarang aktivitas kampanye dalam periode tersebut.

Penyalahgunaan kegiatan sosial, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah untuk kampanye juga sering terjadi. Tindakan ini melanggar aturan kampanye yang mengharuskan kegiatan politik dipisahkan dari tempat-tempat yang seharusnya netral, seperti sekolah dan tempat ibadah, dan mengaburkan batas antara kegiatan sosial dan politik.

Pelaksanaan Kampanye sesuai jadwal adalah dimulai pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024. Demi menciptakan suasa damai, aman, dan tertib dalam pelaksanaan kampanye Pasanagn Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi Banten menggelar kegiatan yang bertema Kampanye Damai.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 bertempat di Lapangan Masjid Raya Al-bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.1, Sukajaya, Curug, Kota Serang, mulai pukul 17.00 s.d 21.30 WIB.

Rangkaian puncak acara dimulai pada pukul 20.00 WIB mulai dari sambutan Ketua KPU Provinsi Banten, sambutan Pj. Gubernur Banten, Sambutan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serat pembacaana dan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai.

Kegiatan bertajuk Kampanye Damai ini bertujuan untuk mengajak para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Partai Politika tau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, Tim Kampanye, serta seluruh massyarakat simpatisan Pasnagn Calon Gubernur dan Wakil gubernur Banten Bersama-sama menyepakati menciptakan pelaksanaan kampanye berjalan denga nyaman, tertib, damai, aman dan lancer. Kegiatan tersebut dilaksanakan diluar tahapan kampanye karena sesungguhnya yang melaksanakan kampanye itu bukan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Banten, sehingga jika dilaksanakan dimasa kampanye maka KPU Provinsi Banten melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

Gambar 4.13 Pasangan Calon Airin Rachmi Diany- Ade Sumardi pada acara Deklarasi Kampanye Damai

Gambar 4.14 Pasangan Calon Andra Soni-A. Dimyati Natakusumah pada acara Deklarasi Kampanye Damai

Pada pelaksanaan kegiatan bertajuk Kampanye Damai, KPU Provinsi mengundang seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik, beserta simpatisan pasangan calon, Tokoh Masyarakat, Pj. Gubernur Banten beserta Pimpinan Forkominda, Bawaslu Provinsi Banten, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Banten, Pimpinan Organisasi Kepemudaan, Pimpinan Organisasi Masyarakat, serta Pimpinan Organisasi Keagamaan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai. Dokumen Deklarasi Kampanye Damai tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten, Pasangan Calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., serta Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., Pj. Gubernur Banten, Kapolda Banten, Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, Ketua tim Pemenangan Pasangan Calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan H. Ade Sumardi, S.E., serta Andra Soni, S.M., M.A.P., dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

Gambar 4.15 Sambutan dari Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar pada Deklarasi Kampanye Damai

Gambar 4.16 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan, seluruh peserta yang terlibat dapat mengikuti aturan yang diterapkan, dapat menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga tidak terjadi gesekan diantara simpatisan atau pendukung.

Gambar 4.17 Memainkan angklung sebagai simbol Kampanye Damai dimulai

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

NASKAH DEKLARASI PEMILIHAN TAHUN 2024
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kami, Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Partai Politik Pengusul Beserta Tim Kampanye dan Para Pendukung Berjanji:

1. Mewujudkan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Melaksanakan Kampanye Pemilihan, yang Aman, Tertib dan Damai, Berintegritas, Tanpa HOAX, Tanpa Politisasi SARA dan Tanpa Politik Uang.
3. Melaksanakan Kampanye Pemilihan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Pasangan Calon No.Urut 1 | KETUA TIM KAMPANYE #1 | KETUA TIM KAMPANYE #2 | Pasangan Calon No.Urut 2

Mengetahui,

AIRIN RACHMI DIANY & ADE SUMARDI | BAHRUL ULUM | Pj. GUBERNUR BANTEN | RAFFI AHMAD | ANDRA SONI & ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH

DR. AL MUKTABAR, M.SC.

KETUA KPU PROVINSI BANTEN | KETUA BAWASLU PROVINSI BANTEN | KETUA DPRD PROVINSI BANTEN | KAPOLDA BANTEN | KAPOLDA METRO JAYA | KAJATI BANTEN | DANREM 064 MAULANA YUSUF | DANREM 052 WIJAYA KRAMA | KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI BANTEN

MOHAMAD IHSAN | ALI FAISAL, S.H., M.H., M.E. | H.FAHRI HAKIM, S.E | IRJEN POL SUYUDI ARIO SETO, S.IK.,S.H., M.SI. | IRJEN POL KARYOTO, S.IK. | DR.EDIWANTO, SH., MH | BRIGADIR JENDRAL TNI FIERMAN SJAFRIUL AGUSTUS, S.I.P | BRIGADIR JENDRAL TNI KRIDO PRABOWO, S.H, M.SI | DR. ANDRIANI NURDIN, S.H, M.H

Gambar 4.18 Naskah Deklarasi Kampanye Damai

Kampanye dengan metode Debat Publik

KPU Provinsi dalam pelaksanaan debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten melakukan persiapan-persiapan, diantaranya adalah merancang desain acara, Menyusun tata tertib, menentukan tema, memastikan kehadiran peserta, menetapkan jadwal dan tempat penyelenggaraan, menentukan moderator, menunjuk panelis dalam Menyusun pertanyan-pertanyaan debat, menentukan undangan, dan pemenentuan Lembaga penyiaran untuk publikasi saat pelaksanaan debat. KPU Provinsi juga melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting dari kegiatan-kegiatan persiapan diatas.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan debat adalah KPU Provinsi Banten menetapkan jadwal dan stasiun televisi pelaksanaan debat, menyusun petunjuk teknis pelaksaan debat, serta menetapkan nama-nama panelis debat.

a. Penetapan Jadwal dan Stasiun Televisi Pelaksanaan Debat

KPU Provinsi Banten menetapkan stasiun televisi dan tanggal pelaksanaan debat pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 143 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Ada pun jadwal dan stasiun televisi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Debat	Jadwal	Stasiun Televisi
Debat Pertama	16 Oktober 2024	TransTV
Debat Kedua	6 November 2024	BTV
Debat Ketiga	20 November 2024	MetroTV

Tabel 4.11 Jadwal Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Setelah ditetapkannya jadwal dan stasiun televisi debat publik ini, KPU Provinsi Banten melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

Surat Keputusan KPU Provinsi Banten tentang Jadwal dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 ini terdapat perubahan, hal tersebut dengan adanya kegiatan KPU Provinsi dengan KPU Republik Indonesia yang tidak bisa ditunda, sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun perubahan tersebut dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 162 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Adapun perubahan jadwal pelaksanaannya adalah pada debat kedua yang semula ditetapkan tanggal 6 November 2024 menjadi 7 Oktober 2024, sementara stasiun televisi tetap di BTV.

1. **Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten**

Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dilakukan dalam format kandidat-moderator, dimana debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi.

Pelaksanaan debat dilakukan dalam 6 (enam) segmen, Adapun pembagian segmennya adalah sebagai berikut:

Segmen Pertama	:	pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
Segmen Kedua	:	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
Segmen Ketiga	:	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
Segmen Keempat	:	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
Segmen Kelima	:	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
Segmen Keenam	:	Penutup

KPU Provinsi Banten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebanyak 3 (tiga) kali.

Adapun pelaksanaannya adalah:

a. **Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Kesatu**

Pelaksanaan Debat Kesatu, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, bahwa jadwalnya pada tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Graha Bang Mega Jakarta yang disiarkan langsung oleh TransTV.

Pelaksanaan debat dimulai pada pukul 19.00 s.d 21.30 WIB, dengan dihadiri oleh Pasangan Calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. - H. Ade Sumardi, S.E. dan Andra Soni, S.M., M.A.P. - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., Partai Politik Pengusul Pasangan Calon, Simpatisan Pasangan Calon, Pj. Gubernur Banten, Polda Banten, Polda Metro Jaya, Bawaslu Provinsi Banten, Dinas/Instansi Provinsi Banten, Tokoh Masyarakat Banten, dan Ormas serta OKP Provinsi Banten.

Debat dimulai dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan. Dalam sambutannya disampaikan harapan kepada para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mampu menggunakan kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan program, sehingga dapat menyakinkan pemilih untuk memilih dirinya menjadi Gubernur dan Wakil Gubenur untuk memimpin Provinsi Banten 5 (lima) tahun yang akan datang.

Pada kesempatan disampaikan kepada pemilih di Provinsi Banten dapat menyaksikan dan menyimak debat di berbagai saluran yang tersedia berkaitan dengan penyampaian visi misi dan program kerja calon Gubernur dan wakil Gubenur untuk dijadikan bahan memilih calon Gubenur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin Banten 5 tahun yang akan datang.

Gambar 4.19 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan Memberikan sambutan pada Debat Pertama

Debat publik atau debat terbuka pertama ini mengusul tema **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Akselerasi Pembangunan Berkeadilan di Provinsi Banten"**.

Tema tersebut dirumuskan oleh Tim Panelis yang terdiri dari:

1. DR. dr. Taufik Fredrik Pasiak, M.Kes., M.Pd.I., M.H.
2. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman
3. Dr. Ahsanul Minan, M.H.
4. Agus Supadmo, S.E., M.S.i
5. Yanu Setiawan
6. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si.
7. Karyono Wibowo

Para tim panelis bertugas untuk menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sudah ditetapkan diatas. Kegiatan penyusunan pertanyaan tersebut dilaksanakan dalam Forum Group Discusion (FGD) selama 2 (dua) hari di Hotel Aston Serang.

Tim Panelis dapat menyusun pertanyaan kedalam 5 (lima) sub tema, didalam setiap sub tema terdapat 4 (empat) pertanyaan, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) pertanyaan. Soal Pertanyaan disimpan dalam amplop coklat yang tertutup dan disegel, dan diserahkan kepada Pihak KPU Provinsi Banten pada saat awal acara siaran debat yang disiarkan oleh TransTV.

Gambar 4.20 Serah Terima soal debat yang mengusung tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Trans TV

Acara debat pertama yang disiarkan oleh TransTV, dengan moderator yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Banten yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan tim Pasangan Calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. - H. Ade Sumardi, S.E. dan Andra Soni, S.M., M.A.P. - Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., dan juga Bawaslu Provinsi Banten. Adapun moderator yang memandu acara tersebut adalah:

1. Rivana Pratiwi (CNN Indonesia Political Correspondent); dan
2. Alfian Rahardjo (Manager Anchor, News Anchor CNN Indonesia).

Gambar 4.21 Moderator Debat Pertama

Gambar 4.22 Prosesi Debat Pertama dari masing-masing Pasangan Calon

b. Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Kedua

Gambar 4.23 Sambutan Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan pada Debat Kedua

Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Kedua dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta yang disiarkan langsung oleh Stasiun Televisi BTV mulai pukul 19.00 s.d 21.30 WIB. Pelaksaan debat untuk yang Kedua ini secara ketentuan dan mekanisme sampa seperti pada pelaksanaan Debat Kesatu.

Dalam penyusunan pertanyaan debat, KPU Provinsi Banten menetapkan Tim Panelis sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Lili Romli, M.Si.
2. Dr. Didik Suharyanto.
3. Dr. H. Syaeful Bahri, S.Ag., M.M., CHCM.
4. Nurlia Dian Paramita, S.IP., M.A.
5. Dr. Dena Widyawan, M.Pd.
6. Adi Prayitno, M.Si.
7. Moh. Masykurudin Hafiz.

Tema dalam Debat Kedua yang ditetapkan oleh tim Panelis dalam Forum Group Discusion (FGD) yang dilaksanakan di Hotel Atria Gading Serpong Tangerang pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 adalah **"Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten"**.

Gambar 4.24 Pengambilan soal debat pada Debat Kedua

Moderator yang tetapkan sesuai dengan hasil peembahasan dengan Tim Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Banten untuk Debat Kedua ini KPU Provinsi Banten menetapkan moderator Wilson Septrudy Purba dan Soza Hutapea. Kegiatan Debat yang disiarkan langsung oelh BTV, juga di relay oleh JawaposTV, Banten TV, dan Radio Republik Indonesia.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

Gambar 4.25 Moderator Debat Kedua

Gambar 4.26 Prosesi Debat Kedua dari masing-masing Pasangan Calon

c. Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Ketiga

Pelaksanaan Debat Ketiga pada tanggal 20 November 2024 bertempat di Studio MetroTV dan disiarkan langsung oleh MetroTV mulai pukul 19.00 s.d 21.30 WIB. Debat ketiga ini mengusung tema **"Sinergi Pembangunan Daerah dan Pusat Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia"**. Adapun tema tersebut ditetapkan oleh para panelis dalam rapat pembahasan penyusunan pertanyaan yang diselenggarakan KPU Provinsi Banten dalam Forum Group Discusion (FGD) penyusunan pertanyaan debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Ketiga bertempat di Hotel Grand Zuri BSD pada tanggal 13 s.d 15 November 2024. Adapun para panelis yang Menyusun pertanyan debat tersebut adalah:

1. Prof. Dr. Suwaeb Amirudin.
2. Prov Dr. Aceng Hasani, M.Pd.
3. Dr. Endang Sulastri, M.Si.
4. Dr. Sopian Sjaf, S.Pt., M.Si.
5. Dr. Azmi Polem, S.Ag., S.H., M.H.
6. Mustoleh Siroj, S.H., M.H.
7. Dr. Syaefudin Asrori, M.Si.

Gambar 4.27 Penyerahan soal Debat Ketiga ari Panelis, Suwaeb Amirudin Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan

Mekanisme pelaksanaan debat itu sama halnya pelaksanaan pada Debat Kesatu dan Kedua. Dimana para pasangan calon menyampaikan visi dan misinya pada segmen pertama, lalu paparan visi misi sesuai dengan pertanyaan yang dibuat oleh Panelis untuk Calon Gubernur Banten yang ditanggapi oleh Calon Gubernur lainnya, lalu untuk Calon Wakil Gubernur Banten yang ditanggapi oleh Calon Wakil Gubernur lainnya pula. Pada selanjutnya juga ada saling memberikan pertanyaan dan jawaban dari masing-masing calon, pada segmen terakhir adalah penyampaian kata-kata penutup dari para pasangan calon. Pelaksanaan debat ini KPU Provinsi Banten menunjuk moderator yaitu sodara Leonardo Samosir dan Yohana Margaretha.

Gambar 4.28 Moderator pada Debat Ketiga

Gambar 4.29 Pasangan Calon Gubernur Banten Airin dan Andra Soni pada Debat Ketiga

Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Pada Pemilihan Tahun 2024 Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Debat	Tanggal dan Tempat	Materi Debat
1	Debat Kesatu	16 Oktober 2024, di TransTV	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Akselerasi Pembangunan Berkeadilan di Provinsi Banten
2	Debat Kedua	7 November 2024, di BTV	Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten
3	Debat Ketiga	20 November 2024, di MetroTV	Sinergi Pembangunan Daerah dan Pusat Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 4.12 Materi Debat Terbuka Pasangan Calon

Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Hal ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik dari semua unsur, baik itu dari penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten, peran serta Pihak Pengamanan dari Kepolisian Daerah Banten maupun Metro Jaya, dan dari pihak TNI, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, serta seluruh elemen masyarakat Provinsi Banten.

4.2.2.4. Tata Kelola Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa catatan penting terkait tata kelola tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara dalam Pilkada sering kali dihadapkan pada berbagai masalah yang mempengaruhi integritas dan kelancaran pemilihan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar di TPS setempat atau bukan pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal ini menimbulkan potensi ketidakakuratan dalam pemungutan suara dan memicu kecurigaan adanya manipulasi. Pada proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 terdapat PSU sebanyak 3 TPS di Kota Tangerang Selatan yaitu di TPS 41 Kel Benda Baru Kec Pamulang, TPS 62 Kel. Jombang, dan TPS 01 Kel. Sawah Baru. Kemudian PSL sebanyak 1 TPS di Kota Tangerang yaitu di TPS 12 Kel Belendung Kec. Benda. KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas pelaksanaan PSL dan PSU tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.30 Pemungutan Suara Lanjutan pada TPS 12 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang

Praktik politik uang atau *vote buying* juga marak terjadi, sering kali disertai dengan intimidasi terhadap pemilih. Kondisi ini merusak esensi pemilu yang adil dan bebas, di mana pilihan pemilih seharusnya didasarkan pada preferensi pribadi, bukan karena tekanan atau insentif materi. Kurangnya pengawasan yang efektif di TPS juga memperburuk situasi, di mana petugas pengawas sering kali tidak dapat mengontrol semua pelanggaran yang terjadi. Hal ini semakin mempersulit deteksi dan pencegahan kecurangan.

Selain masalah teknis dan pelanggaran, faktor alam seperti cuaca buruk dan bencana alam juga menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada Banten 2024. Contohnya, di Kota Cilegon terdapat TPS rubuh dikarenakan adanya angin kencang dan cuaca buruk, namun jajaran KPU dibantu Masyarakat segera merekolasi TPS dan proses pemungutan suara dapat dilanjutkan kembali.

4.2.2.5. Tata Kelola Tahapan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa catatan pada tahapan tata kelola tahapan rekapitulasi suara. Selain itu, proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota mengalami kendala teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan belum diunggahnya data C-Hasil dari TPS melalui sistem Sirekap. Kendala ini memperlambat rekapitulasi dan menambah kompleksitas dalam memastikan transparansi dan akurasi hasil Pilkada. Kesalahan dalam melakukan foto C-Hasil juga membuat kekeliruan pada Aplikasi SIREKAP. Meskipun demikian, penggunaan SIREKAP sudah lebih baik dibandingan pada tahapan Pemilu Tahun 2024.

4.2.2.6. Tata Kelola Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024

KPU Provinsi Banten telah menerbitkan produk hukum berupa Berita Acara Nomor 17/PL.02.7-BA/36/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam Pemilihan Tahun 2024.

Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024. Pada tahapan penetapan hasil tersebut, berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gugatan sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

4.2.2.7. Tata Kelola Pengadaan dan Distribusi Logistik

KPU membuat standar kebijakan perencanaan, pengadaan, distribusi dan penyimpanan logistik pemilu yang diberlakukan secara nasional. KPU juga membuat sistem teknologi informasi yakni Sistem Informasi Logistik (SILOG), serta membagi jenis dan mendesentralisasikan sistem pengadaan logistik Pilkada.

Secara umum, penata kelolaan logistik pemilu berjalan dengan baik. Kendala waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Pilkada periode sebelumnya, diantisipasi dengan perencanaan dan penyusunan jadwal pengadaan logistik yang telah melibatkan mitigasi risiko dalam pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan pemeliharaan, sehingga potensi-potensi masalah dapat teridentifikasi sebelumnya dan dapat diantisipasi sehingga tidak memunculkan masalah besar. Proses pengadaan logistik pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak muncul kasus keterlambatan.

Gambar 4.31 Kadiv Perencanaan dan Logistik, Ahmad Suja'I melakukan monitoring Kesiapan Logistik di Gudang Logistik KPU Kabupaten Serang

Dalam aspek akuntabilitas, KPU juga mempraktikkan sistem pencegahan yang kuat, Seluruh dokumen persiapan pengadaan juga telah direview oleh APIP, kerja sama dengan BPKP juga dilakukan hingga di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat sistem pencegahan potensi permasalahan dalam proses pengadaan logistik.

Upaya untuk memastikan ketepatan kualitas dan waktu dalam proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu juga dilakukan dengan cermat. Dokumen standarisasi kualitas surat suara telah disiapkan, dan sistem informasi digunakan untuk memonitor proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 4.32 Monitoring pembuatan kotak dan bilik suara ke pabrik PT Surya Prima Semesta, Sidoarjo, Jawa Timur

Koordinasi dalam pengamanan dan pengawalan pengiriman logistik berjalan lancar tanpa kendala. KPU menyiapkan prosedur untuk pengamanan pendistribusian, serta pemetaan daerah prioritas distribusi logistik yang berdasarkan variabel seperti jumlah pemilih, waktu tempuh, jarak lokasi, kondisi geografis, cuaca, sarana transportasi, tingkat keamanan, dan kerawanan daerah. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pengadaan dan distribusi logistik dilakukan dengan memprioritaskan daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga dapat mencegah keterlambatan distribusi. Mitigasi hambatan dalam pengiriman logistik juga diimplementasikan dengan mendirikan posko monitoring di gudang dan selama proses distribusi.

Optimalisasi distribusi logistik juga dilakukan melalui kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti POLRI dan TNI, untuk menjamin keselamatan dan keamanan pendistribusian logistik.

KPU juga menetapkan standar penyimpanan logistik Pilkada yang menjadi acuan bagi Provinsi/Kab/Kota. Dalam implementasinya, KPU Kabupaten/Kota mampu memenuhi standar tempat penyimpanan logistik, dengan dukungan dari pemerintah daerah. Sortir dan hitung terhadap logistik dilakukan setelah diterima dari pabrik, dan pemeliharaan logistik selama penyimpanan mencapai standar yang ditetapkan.

Gambar 4.33 Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat Memonitoring ke gudang logistik KPU Kabupaten Serang di dampingi para pimpinan KPU Provinsi Banten.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum, penatakelolaan logistik Pilkada 2024 telah dilakukan berdasarkan prinsip tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai bagian dari prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

4.2.3. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Integritas pemilu/pemilihan, sebagaimana dinyatakan oleh Toby S. James juga dipengaruhi desain organisasi lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini terkait dengan aspek sentralisasi; indepedensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel (James, et al. 2019).

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari *Election Management Body* (EMB), diikat oleh prinsip penyelenggaraan pemilu yang mencakup prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

4.2.3.1. Non Tahapan Pemilihan

1. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU Provinsi Banten melakukan agenda sosialisasi secara masive, baik secara langsung maupun tidak langsung ke seluruh lapisan masyarakat. Tentu yang diharapkan adalah tingginya angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024.

Untuk menunjukkan bahwa dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, KPU Provinsi Banten memulainya dengan melakukan Peluncuran Jingle dan Maskot. Maskot yang diluncurkan bernama “Bara” dan “Jara” yang berbentuk Badak bercula satu yang merupaka biota endemik di Provinsi Banten. Bara adalah badak jantan yang mewakili pemilih laki-laki dan Jara adalah badak betina yang mewakili pemilih perempuan. “Bara” dan “Jara” juga merupakan akronim dari istilah “Banten Bersuara” dan “Jaga Suara”.

Badak Jawa dipilih sebagai maskot Pilkada Banten 2024, karena hewan langka yang kini hanya bisa dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon. Tidak hanya langka, mamalia ini terancam punah. Data per Agustus 2021, jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon hanya 75 ekor.

Warna abu-abu dan hitam melambangkan netralitas. Dalam menyelenggarakan kepemiluan daerah, KPU Provinsi Banten akan bertindak dan bersikap netral. Tidak memihak salah satu calon atau kelompok tertentu.

Putih melambangkan bersih. Bahwa KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan Pilkada terbebas dari intervensi maupun hal-hal lain yang dapat mencoreng nama dan kredibelitas institusi.

Kuning melambangkan keceriaan. Pilkada merupakan pesta. Karena itu, harus disambut dengan kegembiraan.

Merah melambangkan keberanian. Warna merah dalam logo KPU dan surat suara juga mewakili ke-Indonesia-an.

Emas melambangkan kesejahteraan. Hasil pemilu diharapkan dapat membawa Masyarakat lebih sejahtera.

Ungu merepresentasi warna tinta. Dalam konteks Maskot ini, warna ungu tidak bermakna apa pun, kecuali hanya untuk. mewakili warna tinta.

Warna merah pada mulut bermakna bahwa pemilih (masyarakat) kita saat ini sangat kritis. Di era demokrasi, mereka berani menyampaikan sesuatu tanpa rasa takut. Warna merah pada mulut juga bermakna bahwa pemilih tidak takut dan tidak ragu untuk memberikan suaranya pada momen pesta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Warna merah pada telinga bermakna semangat dan gairah. Pemilih (masyarakat) kita saat ini memiliki semangat untuk mencari dan menyerap berbagai informasi kepemiluan, khususnya terkait profil dan track record calon kepala daerah yang akan berkontestasi. Berbekal informasi itulah mereka akan menentukan dan memantapkan pilihan.

3 (tiga) jari kaki melambangkan sila ke-3 (persatuan). Sebagai Pondasi penyelenggaraan. 1 (satu) cula melambangkan 1 (satu) pemimpin yang kuat. Hasil pemilu diharapkan dapat menghasilkan 1 (satu) pemimpin yang kuat. Badan saling belawanan dan menghadap ke depan dengan membawa peraga pemilu rasa riang, gembira, sumringah, senang setelah memilih. Mata saling melirik, jari kelingking saling berdekatan bermakna akur, walau berbeda pilihan kita tetap akur.

Gambar 4.34 Maskot Bara dan Jara

Sedangkan *jingle* dan *tagline* Pilkada Banten berjudul “Sayangi Bantenmu, Coblos Pilihanmu" yang digarap oleh Band Lokal Banten “Soulego”, *jingle* ini mengandung unsur musik lokal dan juga ajakan untuk datang ke TPS pada hari Rabu, 27 November 2024.

Gambar 4.35 Band Lokal Banten “Soulego” karya Adhitya Angga Pratama Menyanyikan jinggle Pilkada Banten 2024 “Sayangi Bantenmu, Coblos Pilihanmu”.

Berikut lirik jingle Pilkada Banten 2024 yaitu berjudul **‘Sayangi Bantenmu, Coblos Pilihanmu’** Karya Adhitya Angga Pratama/Soulego Band:

Ayo Ayo Ayo
Masyarakat Banten
Datang ke TPS
Di Pilkada Serentak
Berikan Suaramu
Sayangi Bantenmu Coblos Pilihanmu
Pilih Gubernur dan Wakilnya.

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
Jujur dan Adil Itulah Asasnya

(Ayo Ayo Ayo)
Datang ke TPS
(Ayo Ayo Ayo)
Coblos Pilihanmu
(Ayo Ayo Ayo)
Di Pilkada Banten
Gunakan hak pilihmu

(Ramai Ramai Ramai)
Masyarakat Banten
(Ramai Ramai Ramai)
Berikan Suaramu
(Ramai Ramai Ramai)
Untuk Masa Depan
Saatnya Banten Memilih.

Dulur Dulur
Masyarakat Banten
Jangan Lupa, Aje Kelalen,
Ntong Hilap,
Urang rame2 dongkap ka TPS
Hari Rabu, 27 November 2024
Coblos Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Banten

Dalam menjangkau pemilih muda yang merupakan persentase terbanyak jumlah pemilih pada DPT, KPU Provinsi Banten aktif melakukan sosialisasi di kanal media sosial, melakukan sosialisasi aktif ke sekolah, pesantren, mengadakan jambore kepemiluan, dan mengadakan konser musik yang menarik antensi masyakat.

KPU Provinsi Banten juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder ditingkat kecamatan yang tersebar di 155 kecamatan se-provinsi Banten. Selain itu pula, KPU menggandeng organisasi kemasyarkatan dalam mengadakan kegiatan sosialisasi.

Dengan tujuan menarik atensi masyarakat di tempat keramaian KPU Provinsi Banten mengadakan kegiatan sosialisasi di tempat car free day ataupun di pusat-pusat keramaian masyakat yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Banten juga mengadakan kegiatan Jalan Sehat Pilkada 2024.

Ada pula kegiatan Nonton Bareng Film yang diproduksi oleh KPU RI dengan judul “Tepatilah Janji”, KPU Provinsi Banten mengandeng Univeristas dan sekolah di wilayah Provinsi Banten dalam pemutaran film ini, sebagai saranan sosialisasi ke para pemilih pemula.

Dengan tujuan kelompok marjinal, KPU Provinsi Banten telah melakukan sosialisasi ke Lapas dan Rutan, Kelompok Masyarakat Nelayan, dan juga kelompok Disabilitas di Provinsi Banten.

Gambar 4.36 Jambore Kepemiluan

Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan KPU Provinsi Banten

NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	PESERTA	DOKUMENTASI
1	Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten	‘1 Juni 2024	• Forkopimda • Masyarakat Umum • KPU RI • KPU Kab/Kota	
2	Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024	30 April 2024	- Forkopimda	

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

3	Pembuatan Jingle dan Maskot Pilkada Tahun 2024		Pegiat Kepemiluan	
4	Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemilih	6, 8, 10, 12, 14 16, 18, 20, 22, 24 Agustus 2024 dan 7 September 2024	Pegiat Pemilu, akademisi, PPK, PPS, Masyarakat adat, Lapas.	

5	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Segmentasi siswa dan Mahasiswa	(12-23 November 2024).	Sekolah dan Kampus di Provinsi Banten, antara lain: STISNU, STAISMAN, UIN SMH, UIN Syarif Hidayatullah, UNSERA, UNMA, UNTIRTA, Institut Ilmu Alquran, SMA N I Ciruas, SMA N 1 Petir, Ponpes Darul Iman Pandeglang dan Ponpes Al Marjan Mulabaru.	

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

6	Sosialisasi Kepada Stakeholder Kecamatan		155 Kecamatan se-Provinsi Banten, Camat, PPK, Pegiat Kepemiluan dan Akademisi	
7	Sosialisasi pada kegiatan-kegiatan Masyarakat Konser Musik	12 Oktober 2024	Forkopimda Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, OPD Provinsi Banten, penjabat Bupati Tangerang, Penjabat Walikota Tangerang, Penjabat Walikota Tangerang Selatan, KPU Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat umum.	

	• Car free day/pusat keramaian	20 Oktober- 17 November 2024	Mayarakat umum	
	• Jalan Sehat Pilkada Tahun 2024	(17/11/2024)	FORKOPIMDA, Pemkot Serang, Polda dan Polres	

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

	• Sosialisasi untuk kelompok dan komunitas	8/Agustus 2024	Kelompok dan Komunitas	
8	Sosialisasi Tahapan Pilkada • Sosialisasi Tahapan Pilkada dengan Instansi Terkait dan organisasi lainnya	Selasa, 7 Mei 2024	Forkopimda, Polda, Kejaksaan, Media, dll	
9	Jambore Kepemiluan	23-25 Oktober dan 15-17 November 2024	Stakeholder, Kwarda Banten dan Anggota Pramuka	

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

10	Fasilitasi Media Center dan Kehumasan	Sepanjang Tahapan	Media lokal cetak, Elektronik dan daring se-Provinsi Banten	
11	Jambore Pesantren	13-15, November 2024.	500 santri dari 8 Pesantren	
12	Sosialisasi Tata Cara pemenuhan dukungan dan sebaran syarat calon perorangan	13/05/2024	Stake Holder dan Instansi terkait, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat	

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

13	Sosialisasi regulasi kampaye kepada pasangan calon stakeholder	28/09/2024	Forkopimda dan Dinas di Provinsi Banten, Komunitas, Organisasi Kemasyarakatan, dan awak media.	
14	Sosialisasi Nonton Bareng film “Tepatilah Janji” 1. Sosialisasi Nonton Bareng film “Tepatilah Janji” di UIN SMH BANTEN 2. Sosialisasi Nonton Bareng film “Tepatilah Janji” di UNSERA 3. Sosialisasi Nonton Bareng film “Tepatilah Janji” di UIN Syarif Hidayatullah 4. Sosialisasi Nonton Bareng film “Tepatilah Janji” SMA N 1 Petir 5. Sosialisasi Nonton Bareng film	28 Oktober 2024 30 Oktober 2024 9 November 2024 19 November 2024 22 November 2024 22 November 2024	SMA N 1 Ciruas, Kabupaten Serang; Universitas Math'laul Anwar, Kabupaten Pandeglang; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Syarif Hidayatullah, SMAN 1 Petir, dan UNSERA.	

	"Tepatilah Janji" di SMA N 1 Ciruas 6. Sosialisasi Nonton Bareng film "Tepatilah Janji" di Universitas Mathlaul Anwar			
15	Workshop Jurnalistik	2-3 Agustus 2024	Media Cetak, Elektronik dan Online	

Tabel 4.13 Kegiatan Sosialisasi

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

2. Hukum

Banyaknya lembaga negara yang terlibat dalam proses Pilkada, yang sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam aturan. Hal ini menyebabkan kebingungan di lapangan, terutama ketika lembaga-lembaga tersebut mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras. Selain itu, perubahan aturan di tengah pelaksanaan tahapan Pilkada menjadi masalah yang serius, karena dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan Pilkada dan menciptakan ketidakpastian bagi peserta dan penyelenggara.

Pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap peraturan perundang-undangan serta aturan lainnya terkait Pilkada juga sangat dibutuhkan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menurunkan kredibilitas proses Pilkada dan melemahkan kepercayaan publik. Di sisi lain, keterlambatan penyelesaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kerap kali menambah komplikasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024.

Selain itu, PKPU dan Petunjuk Teknis (juknis) sering kali dirilis terlalu mendekati waktu pelaksanaan tahapan. Kondisi ini menyulitkan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyesuaian dengan aturan baru dan meningkatkan risiko ketidaksiapan dalam menjalankan prosedur yang diatur. Hal ini memerlukan perhatian lebih untuk memastikan setiap regulasi dibuat tepat waktu dan mendukung proses pemilu yang transparan, adil, dan lancar.

Berikut kegiatan yang sudah dilakukan bagian hukum pada masa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024.

1. Evaluasi Kegiatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pilkada Serentak Tahun 2024

Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024 pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal 2 s.d. 3 Oktober 2024 bertempat di Trembesi Hotel Kota Tangerang Selatan.

Gambar 4.37 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan membuka Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pilkada Serentak 2024

Output Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024 antara lain:

a. Telaksananya implementasi nyata di lapangan yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan undang-undang;
b. Terlaksananya Pedoman bagi KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terutama langkah-langkah kegiatan yang disusun berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Kegiatan berdasarkan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Tahapan dan Jadwal Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
c. Terlaksananya implikasi pada penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Banten dan di Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagai pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) untuk Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis);

d. Terlaksananya informasi mengenai ruang lingkup Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024;

e. Terlaksananya informasi manfaat adanya kegiatan penyusunan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024;

f. Terlaksananya informasi langkah-langkah penyusunan kegiatan penyusunan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024;

g. Terlaksananya informasi sitematika penyusunan kegiatan penyusunan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024;

Gambar 4.38 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pilkada Serentak 2024 tanggal 2 s.d 3 Oktober 2024 di Trembesi Hotel

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024

Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 15 s.d. 16 November 2024 bertempat di Mambruk Hotel & Convention, Anyar, Kabupaten Serang.

Gambar 4.39 Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten, M. Agus M. Agus Muslim membuka Kegiatan Bimtek Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis adalah:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 merupakan satu bentuk implementasi nyata di lapangan yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan undang-undang;
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dapat melakukan mitigasi terhadap pelanggaran kode etik pemilu bagi penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahapan dan Jadwal Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dapat memahami regulasi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Menerima informasi dan manfaat mengenai ruang lingkup kode etik penyelenggara pemilu dan tata cara penganan kode etik penyelenggara pemilu pada kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024;

5. Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dapat memperoleh informasi mengenai tata cara proses penanganan sengketa kode etik dan Lembaga yang berwenang untuk menangani persidangan kode etik penyelenggara pemilu;
6. Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dapat memperoleh informasi mengenai sitematika penyusunan kegiatan penyusunan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Serentak Tahun 2024;
7. Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dapat memahami dan membuat jawaban atas sengketa kode etik;

b. Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024

Peserta adalah sebagai berikut:

Peserta dari KPU kabupaten/kota sebanyak 48 peserta terdiri dari:

1. Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
5. Pelaksana pada Sub Bagian Hukum.

Peserta Bimtek dari KPU Provinsi Banten sebanyak 35 peserta.

Gambar 4.40 Sesi Tanya Jawab mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pemilu Tahun 2024.

3. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Jawaban Sengketa Hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Jawaban Sengketa Hukum Di Mahkamah Konstitusi (MK) bertempat Aston Serang Hotel & Convention Center, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.29, RW.KM.4, Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Banten yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 (Fullday Meeting) dilaksanakan sebagai bentuk Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan pemeriksaaan Jawaban Termohon atas dalil-dalil pokok gugatan Pemohon pada Sengketa Hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) serta identifikasi terhadap tata cara penyusunan jawaban Termohon pada serta Pemeriksaan terhadap penyusunan Daftar Alat Bukti (DAB) Termohon agenda pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), pada agenda Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terhadap register perkara sebagai berikut:

1. Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA TANGERANG SELATAN Tahun 2024;
2. Nomor 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PANDEGLANG Tahun 2024;
3. Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SE
4. RANG Tahun 2024

Gambar 4.41 Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan membuka acara Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Jawaban Sengketa Hukum di Mahkamah Konstitusi.

Gambar 4.42 Peserta Rapat Koordinasi dari KPU Kabupaten Serang didampingi Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sedang menyusun jawaban PHPU

SAYANGI BANTENMU

Gambar 4.43 Peserta Rapat Koordinasi dari KPU Kabupaten Pandeglang didampingi Kadiv Data dan Informasi, A. Munawar sedang menyusun jawaban PHPU

Gambar 4.44 Peserta Rapat Koordinasi dari KPU Kota Tangerang Selatan didampingi peserta dari tim hukum KPU Provinsi Banten sedang menyusun jawaban PHPU

Selanjutnya hasil dari pemeriksaan jawaban Termohon untuk Satuan Kerja KPU Kota Tangerang Selatan, Satuan Kerja KPU Kabupaten Pandeglang dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Serang selanjutnya akan dilakukan Konsultasi dengan Tenaga Ahli dan atau Pihak Konsultan dari Biro Hukum KPU Republik Indonesia

4.2.3.2. Kelembagaan

1. SOP

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan kualitas layanan publik oleh KPU, maka berdasarkan ketentuan dalam UU Pelayanan Publik, masing-masing unit kerja di lingkungan satker KPU dituntut untuk memiliki standar operasional prosedur.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyediakan berbagai sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah proses pelaksanaan. Sistem-sistem informasi ini berperan penting dalam memfasilitasi beragam aspek penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Namun, meskipun sistem ini sangat membantu, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada implementasi awal saja. Untuk menjaga kualitas dan keandalan, sistem informasi tersebut perlu terus dikembangkan dan disempurnakan agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan serta tantangan yang muncul di lapangan.

NO	JUDUL SOP	PENANGGUNG JAWAB	JENIS SOP	KETERANGAN EVALUASI	Data SOP
1	2	3	4	5	6
1	SOP Pertanggungjawaban Belanja APBN dan Hibah Tahun 2023)4	Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1toAqdf8cdnwlTOTuLhrwOXAfBWWIoOOB/view?usp=share_link
2	SOP UKPBJ Tahun 2023	Sub Bagian Umum KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1i5m6LIFYwEzBF_Jf7_OImuhw0MQFcrBR/view?usp=share_link
3	SOP Pengelolaan Media Sosial dan Website Tahun 2023	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1cqLfniiaZNAScDolygAOpCASgrtVhm0m/view?usp=share_link
4	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2022	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/17MKWQHRqqD1ey28mVGc5b-kGVSjunUL_/view?usp=share_link
5	SOP Penerimaan Tamu	Sub Bagian Umum KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1KWzJb5n3TbsKvwREphUmn1AYI5USbKXq/view?usp=share_link
6	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021	Sub Bagian Perencanaan KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/17JGb27FkBo092GWcuoaCsXfqbB7YLrYd/view?usp=share_link
7	SOP - SOTK KPU & Sekretariat 2022	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1SUcHXN4RXOV952HDM6kG5NP5K0lypJjF/view?usp=share_link
8	SOP 10 Penanganan Sengketa Informasi Publik	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1wBTc7SdkZmsYAGk0A09zs9XyOjDzQyAy/view?usp=share_link
9	SOP 07 Pendokumentasian Informasi Publik	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1_FRbUBcdX6H82YUAIG7caR8zJklFjtw9/view?usp=share_link

10	SOP 08 Pendokumentasian Informasi Publik dikecualikan	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1caQJjMTwO0Lq9lIWf-9C7USIxCkmYpAh/view?usp=share_link
11	SOP Unjuk Rasa	Subbag Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/19JoJXSL4H0GbfkkYKBfX1zvCCLci8mq/view?usp=share_link
12	003 - SOP - Permohonan Cuti 2022	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1Bbb6_AGhPXnw2K1q3mKo2al8NcH67Twq/view?usp=share_link
13	004 - SOP - Hukuman Disiplin 2022	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1Sezlt4oXuKf5RuMBrNoYUTzeJZLXn-b1/view?usp=share_link
14	002 - SOP - Rekap Kehadiran dan Tukin 2022	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1C4TMc94WrjiuzROvc8KkBtBWpo0DzSLm/view?usp=share_link
15	SOP Surat Masuk 2023	Subbag Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1u4IP8eUvlguVuEpDFZZignnqPqremQ6V/view?usp=share_link
16	SOP Penerbitan Informasi Melalui Website	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1Qv1cn5PlgLPp5GYHjZ8R8rNiiGLY55aD/view?usp=share_link
17	SOP Kenaikan Gaji Berkala PNS 2020	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/15BwwaHRUSIRK-z99bSisQPpvzgN4JWh2/view?usp=share_link
18	SOP Kenaikan Pangkat Reguler 2020	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1gHCmhhzqRKg9xdyYGzQ3fRT7Bc_nvhv-/view?usp=share_link
19	SOP Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengunggahan Produk Hukum	Subbag Hukum KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1qbjeTWR1Hqx1oOKswPVuXnlgkcjWh9Xq/view?usp=share_link
20	SOP 06 Pengelolaan Keberatan Informasi	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1k-F4ivAW8rAj_UZgIQ_yQlw8f73LfdIW/view?usp=share_link
21	SOP 05 Permohonan Informasi Publik	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1MGN1pno1OfpOMAJA92L6ntyaAbhyTy5n/view?usp=share_link
22	SOP Pembuatan Putusan	Subbag Hukum KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1TmvmQLQAsMnCXeZpaXRRprFH-C1ZAYI6/view?usp=share_link
23	SOP tentang Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Dikecualikan Nomor 2_ORT.06_09_2022	Sub Bagian Parhubmas KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1Pyq5FVtTtLCXif-eiGLgO3JimeL7AAQF/view?usp=share_link
24	SOP Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017	Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Banten	Tahapan	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1DHQ-HSx_7sLJLcO_zB7tWAdVmvAMih07/view?usp=share_link
25	SOP Tugas dan Izin Belajar	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/10TLE1Dg7FIzBa-lIPIPAxLpvEjFHgCh-/view?usp=share_link

26	SOP Pembuatan Dokumen Pelantikan NEW	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1UtsFgTuUcNz0SgcMYpwxaXRHcAMNimRZ/view?usp=share_link
27	SOP Administrasi PAW Anggota KPU + Cap	Subbag SDM KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1PDebczBA7RZFstGAKj8Z2N6kCCv_bn5d/view?usp=sharing
28	SOP Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024	Subbag Datin KPU Provinsi Banten	Tahapan	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1ZEvMqFliuaD9CqL1D_Yg5l2H0UFNn2SP/view?usp=drive_link
29	SOP Pengamanan Sistem Komputer Dan Informasi Dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Pemilu Tahun 2024	Subbag Datin KPU Provinsi Banten	Tahapan	Sudah	https://drive.google.com/file/d/17BMFdb576mghAMSkCGtaCiqCRTplvmhz/view?usp=drive_link
30	SOP Penyusunan RKT pada KPU Provinsi Banten	Subbag Perencanan KPU Provinsi Banten	Rutin	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1hUbvEUvOESnOWp8Em9yDtP351wogPFHc/view?usp=sharing
31	SOP Revisi Anggaran	Subbag Perencanan KPU Provinsi Banten	Rutin/Tahunan	Sudah	https://drive.google.com/file/d/1kwPn5QzFoQoiQTueevlSqCz7-g3VTzKX/view?usp=sharing

Tabel 4.14 Inventarisasi SOP KPU Provinsi Banten

NO	PENILAIAN	SOP AP (nomor)																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Mampu mendorong peningkatan kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Mudah dipahami	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Mudah dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Sinergi satu dengan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4.15 Evaluasi Penerapan SOP pada KPU Provinsi Banten

2. *Staffing* (Personel)

Dalam hal personel atau *staffing* pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan proses berjalan secara adil dan transparan. Pertama, proses rekrutmen yang masih tertutup sering kali menimbulkan kurangnya transparansi dalam pemilihan personel. Hal ini dapat berimbas pada keberagaman dan kompetensi petugas di lapangan.

Selain itu, pemahaman yang tidak merata di kalangan personel juga menjadi kendala serius. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengenai regulasi dan prosedur, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

Tidak hanya itu, munculnya praktik-praktik negatif seperti manipulasi suara, intimidasi, dan konflik kepentingan oleh penyelenggara Pemilu menjadi masalah yang mengancam integritas proses demokrasi.

Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, pengaruh keluarga, atau honor yang rendah sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik kepentingan di kalangan petugas. Hal ini diperparah dengan sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata, baik dari segi jumlah maupun kompetensi di berbagai daerah.

Penyebab lain dari ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bimbingan teknis yang kurang optimal. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi para penyelenggara di berbagai tingkatan mengakibatkan pemahaman yang tidak seragam. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan sebagian personel dalam menjalankan tugasnya secara efektif, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran dan keadilan penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, pelatihan yang berkelanjutan, serta rekrutmen yang lebih transparan menjadi langkah penting untuk meningkatkan mutu dan integritas personel dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Perencanaan

Salah satu tantangannya adalah penggabungan antara pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota secara serentak se-Indonesia. Penggabungan ini sering kali memecah konsentrasi perhatian pemilih antara kepentingan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Akibatnya, pemilih kesulitan untuk secara mendalam memahami informasi dan program yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerahnya.

Selain itu, perencanaan yang berbasis kebutuhan di lapangan sering kali menghadapi kendala karena harus berhadapan dengan regulasi yang ketat dari KPU. Meskipun ada kebutuhan tertentu yang penting untuk diakomodasi demi kelancaran Pilkada, regulasi yang sudah ditetapkan terkadang membatasi ruang gerak dalam merealisasikan kebutuhan tersebut.

Hal ini menyebabkan beberapa rencana atau usulan yang sebenarnya sangat diperlukan tidak dapat direalisasikan, meskipun sudah diidentifikasi sebagai solusi yang relevan di lapangan. Akibatnya, penyelenggara Pemilu terkadang harus beradaptasi dengan keterbatasan regulasi yang ada, meskipun hal tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan.

4. Penganggaran

Dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tantangan yang dihadapi dalam penganggaran adalah keserentakan pelaksanaan, seperti di Provinsi Banten, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, juga beriringan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Banten.

KPU Provinsi Banten bersama dengan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan kesepakatan dengan adanya pembagian wewenang pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi pengangaaran. Hal ini juga, telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 8 November 2023, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.179.264.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang dicairkan dalam dua tahap/termin dengan tahap pertama sebesar Rp. 212.059.000.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau setara 42,48 % dari total alokasi yang dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Kemudian pencairan tahap kedua sebesar Rp. 287.120.264.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara 57,52% dari total alokasi hibah yang dicarikan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Gambar 4.45 Penandatanganan NPHD Pilkada Tahun 2024

Anggaran tersebut juga mencakup honorarium Badan Adhoc se-Provinsi Banten agar ada rasa keseragaman besaran honor diseluruh Kabupaten/Kota, karena pada pilkada sebelumnya, anggaran badan adhoc masing-masing Kabupaten/Kota berbeda-beda tergantung pada kemampuan daerahnya. Besaran honorarium sebesar Rp. 304.048.700.000,00 (Tiga Ratus Empat Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setara 60,91% dari total besaran anggaran Hibah Pilkada yang diterima oleh KPU Provinsi Banten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Postur Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PERSENTASE
I	HONORARIUM	Rp304.123.700.000	60,92 %
II	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	Rp178.274.969.000	35,71 %
III	OPRASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp16.780.594.750	3,36 %
	JUMLAH TOTAL	**Rp499.179.264.000**	**100 %**

Dalam penyusunan Program dan Anggaran KPU Provinsi Banten mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Gambar 4.46 Nilai NPHD KPU Provinsi Banten

5. Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilihan untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Anggita DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK

Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pembentukan PPK Pemilihan berlangsung sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

Tabel 4.16 Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPK Pemilihan 2024

1. Pengumuman Pendaftaran

   Pengumuman Pendaftaran PPK diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendaftar, pengumuman disampaikan melalui laman web, media sosial, media cetak dan elektronik serta metode konvensional dengan sosialisasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait. KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten mengumumkan pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 27 April 2024.

2. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

   Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April 2024 melalui aplikasi SIAKBA secara daring dan mandiri. Berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berkas yang harus dilengkapi oleh Pendaftar adalah sebagai berikut: surat pendaftaran; daftar riwayat hidup (DRH); fotokopi KTP elektronik; fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir; pas foto; surat pernyataan; dan surat keterangan. Khusus untuk surat pendaftaran, DRH, dan surat pernyataan dapat diakses pada laman SIAKBA.

Setelah Pendaftar melakukan *submit* kelengkapan berkas dan mendapatkan tanda terima pendaftar, maka Pendaftar harus membawa berkas fisiknya dan diserahkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota sesuai domisilinya. KPU Provinsi Banten turut melaksanakan monev palaksanaan pendaftaran dan penelitian administrasi kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Adapun penelitian administrasi dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024.

Gambar 4.47 Pendaftaran Calon Anggota PPK Kabupaten Lebak

3. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Pengumuman hasil penelitian administrasi diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui laman web SIAKBA, laman web KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan media cetak/elektronik pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 5 Mei 2024. Pendaftar yang lolos tahapan penelitian administrasi akan melaksanakan Tes Tertulis. Selain itu, KPU juga membuka tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024.

4. Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024. KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melaksanakan tes dengan berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*.

KPU Provinsi Banten turut melaksanakan monev palaksanaan tes tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Adapun pengumuman hasil tes tertulis diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui laman web SIAKBA, laman web KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan media cetak/elektronik pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024.

Gambar 4.48 Tes Tertulis Calon Anggota PPK Kota Cilegon

No	Satuan Kerja	Lokasi Tes Tertulis
1	KPU Kab. Pandeglang	SMKN 2 Pandeglang, Jl. Raya Lintas Timur Km 03, Kadubanen.
2	KPU Kab. Lebak	Hotel Mutiara Lebak Jl. Maulana Hasanudin
3	KPU Kab. Tangerang	Jl. Raya Serang Km 10, Kadu Jaya, Curug
4	KPU Kab. Serang	UIN Maulana Hasanudin Jl. Jend. Sudirman No. 30 Panancangan
5	KPU Kota Tangerang	Jl. Maulana Yusuf, Babakan

No	Satuan Kerja	Lokasi Tes Tertulis
6	KPU Kota Cilegon	SMKN 1 Cilegon, Jl. Kedung Baya No.21, Cibeber
7	KPU Kota Serang	SMKN 1 Serang, Jl. KH. Abdul Fatah Hasan, Cipare
8	KPU Kota Tangerang Selatan	Jl. Ir H. Juanda No.95, Cempaka Putih, Ciputat Timur

Tabel 4.17 Lokasi Pelaksanaan Tes Tertulis Badan Adhoc PPK Berbasis CAT

5. Tes Wawancara dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara

Tahapan tes wawancara dimulai dari tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024. KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melaksanakan tes dengan menggunakan sistem panelis guna mengefisiensi proses tahapan seleksi. KPU Provinsi Banten turut melaksanakan monev pelaksanaan tes wawancara kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Adapun pengumuman hasil tes wawancara diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui laman web SIAKBA, laman web KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan media cetak/elektronik pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024, termasuk dengan penetapan anggota PPK terpilih pada tanggal 15 Mei 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pendaftar yang lolos tahapan tes wawancara akan melaksanakan prosesi pengangkatan dan pengambilan sumpah.

No	Satuan Kerja	Lokasi Tes Wawancara
1	KPU Kab. Pandeglang	Hotel Horison Altama Pandeglang
2	KPU Kab. Lebak	LPMP Provinsi Banten, Jl. Siliwangi, Rangkasbitung
3	KPU Kab. Tangerang	Kantor KPU Kab. Tangerang
4	KPU Kab. Serang	Kantor KPU Kab. Serang
5	KPU Kota Tangerang	Kantor KPU Kota Tangerang
6	KPU Kota Cilegon	Bintang Laguna, Jl. Ahmad Yani 23. Kedaleman

No	Satuan Kerja	Lokasi Tes Wawancara
7	KPU Kota Serang	Lynn Hotel Serang
8	KPU Kota Tangerang Selatan	Kantor KPU Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.18 Lokasi Pelaksanaan Tes Wawancara Badan Adhoc PPK

6. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

Tahapan pengangkatan dan pengambilan sumpah anggota PPK pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024. Pelantikan PPK pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten turut dihadiri oleh *stakeholder* terkait. Setelah terbentuknya PPK, tahapan selanjutnya adalah pembentukan Sekretariat PPK yang juga melibatkan pemerintah daerah.

No	Satuan Kerja	Lokasi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
1	KPU Kab. Pandeglang	Hotel Horison Altama
2	KPU Kab. Lebak	Hotel Mutiara
3	KPU Kab. Tangerang	Hotel Atria
4	KPU Kab. Serang	Porbis Hotel, Waringim Kurung
5	KPU Kota Tangerang	D'Prima Hotel Tangerang
6	KPU Kota Cilegon	Aston Boutique Cilegon Hotel
7	KPU Kota Serang	Hotel Le Dian
8	KPU Kota Tangerang Selatan	Swissbell Hotel Serpong

Tabel 4.19 Lokasi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Badan Adhoc PPK se-Provinsi Banten

No	Nama Satker	Jumlah Kec	Jumlah PPK
1	KPU Kab. Pandeglang	35	175
2	KPU Kab. Lebak	28	140
3	KPU Kab. Tangerang	29	145
4	KPU Kab. Serang	29	145
5	KPU Kota Tangerang	13	65
6	KPU Kota Cilegon	8	40
7	KPU Kota Serang	6	30
8	KPU Kota Tangerang Selatan	7	35
Jumlah se-Provisi Banten		**155**	**775**

Tabel 4.20 Jumlah Badan Adhoc PPK se-Provinsi Banten

No	Nama Satker	Jml Kecamatan	Jml Sekretaris	Jml Staf Sekretariat	Jml Total
1	KPU Kab. Pandeglang	35	35	70	105
2	KPU Kab. Lebak	28	28	56	84
3	KPU Kab. Tangerang	29	29	58	87
4	KPU Kab. Serang	29	29	58	87
5	KPU Kota Tangerang	13	13	26	39
6	KPU Kota Cilegon	8	8	16	24
7	KPU Kota Serang	6	6	12	18
8	KPU Kota Tangerang Selatan	7	7	14	21
Jumlah se-Provisi Banten		**155**	**155**	**310**	**465**

Tabel 4.21 Jumlah Sekretariat Badan Adhoc PPK se-Provinsi Banten

Pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPS

Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pembentukan PPS Pemilihan berlangsung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3	Perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4	Penelitian Administrasi calon anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6	Seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9	Wawancara calon anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11	Penetapan calon anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12	Pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

Tabel 4.22 Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPS untuk Pilkada 2024

a. Pengumuman Pendaftaran PPS

Pengumuman Pendaftaran PPS diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendaftar, pengumuman disampaikan melalui laman web, media sosial, media cetak dan elektronik serta metode konvensional dengan sosialisasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait. KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten mengumumkan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2024.

b. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 melalui aplikasi SIAKBA secara daring dan mandiri. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berkas yang harus dilengkapi oleh Pendaftar adalah sebagai berikut: surat pendaftaran; daftar riwayat hidup (DRH); fotokopi KTP elektronik; fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir; pas foto; surat pernyataan; dan surat keterangan. Khusus untuk surat pendaftaran, DRH, dan surat pernyataan dapat diakses pada laman SIAKBA.

Setelah Pendaftar melakukan *submit* kelengkapan berkas dan mendapatkan tanda terima pendaftar, maka Pendaftar harus membawa berkas fisiknya dan diserahkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota sesuai domisilinya. KPU Provinsi Banten turut melaksanakan monev palaksanaan pendaftaran dan penelitian administrasi kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Adapun penelitian administrasi dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

Gambar 4.49 Pendaftaran Calon Anggota PPS KPU Kab Pandeglang

c. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Pengumuman hasil penelitian administrasi diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui laman web SIAKBA, laman web KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan media cetak/elektronik pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024. Pendaftar yang lolos tahapan penelitian administrasi akan melaksanakan Tes Tertulis. Selain itu, KPU juga membuka tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024.

d. Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melaksanakan tes dengan berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*.

Gambar 4.50 Tes Tertulis Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Lebak

KPU Provinsi Banten turut melaksanakan monitoring pelaksanaan tes tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Adapun pengumuman hasil tes tertulis diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui laman web SIAKBA, laman web KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan media cetak/elektronik pada tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Pendaftar yang lolos tahapan tes tertulis akan melaksanakan Tes Wawancara.

No	Satuan Kerja	Lokasi Tes Tertulis
1	KPU Kab. Pandeglang	SMKN 2 Pandeglang
2	KPU Kab. Lebak	SMKN 1, SMKN 2, SMAN 1, dan SMAN 3 Rangkasbitung
3	KPU Kab. Tangerang	UMN Gading Serpong
4	KPU Kab. Serang	SMK Bismillah Padarincang, LP31 Krmatwatu, SMAN 1 Cikeusal dan SMK Ikhlas Jawilan
5	KPU Kota Tangerang	STIE Bisma Lepisi
6	KPU Kota Cilegon	SMKN 1 Kota Cilegon
7	KPU Kota Serang	SMKN 1 Kota Serang
8	KPU Kota Tangerang Selatan	Fakultas Saintek UIN Jakarta

Tabel 4.23 Lokasi Pelaksanaan Tes Tertulis PPS untuk Pilkada 2024

e. Tes Wawancara dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara

Tahapan tes wawancara dimulai dari tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024. KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melaksanakan tes dengan menggunakan sistem panelis guna mengefisiensi proses tahapan seleksi. KPU Provinsi Banten turut melaksanakan monev pelaksanaan tes wawancara kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Adapun pengumuman hasil tes wawancara diumumkan oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui laman web SIAKBA, laman web KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan media cetak/elektronik pada tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2024, termasuk dengan penetapan anggota PPS terpilih pada tanggal 25 Mei 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pendaftar yang lolos tahapan tes wawancara akan melaksanakan prosesi pengangkatan dan pengambilan sumpah.

No	Satuan Kerja	Lokasi Tes Wawancara
1	KPU Kab. Pandeglang	Menggunakan lokasi berdasarkan pendekatan korwil
2	KPU Kab. Lebak	Menggunakan lokasi berdasarkan pendekatan korwil
3	KPU Kab. Tangerang	Menggunakan lokasi berdasarkan pendekatan korwil
4	KPU Kab. Serang	Menggunakan lokasi berdasarkan pendekatan korwil
5	KPU Kota Tangerang	Hotel Day Suites
6	KPU Kota Cilegon	Kantor KPU Kota Cilegon
7	KPU Kota Serang	Hotel Puri Kayana
8	KPU Kota Tangerang Selatan	Kantor KPU Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.24 Lokasi Pelaksanaan Tes Wawancara PPS untuk Pilkada 2024

f. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

Tahapan pengangkatan dan pengambilan sumpah anggota PPS pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024. Bimtek kepemiluan bagi anggota PPS terpilih dilaksanakan berbeda-beda antar satuan kerja. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi masing-masing jumlah sumber daya manusia dan wilayah masing-masing satuan kerja. Pelantikan PPS pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten turut dihadiri oleh *stakeholder* terkait. Setelah terbentuknya PPS, tahapan selanjutnya adalah pembentukan Sekretariat PPS yang juga melibatkan pemerintah daerah.

Gambar 4.51 Pelantikan PPS KPU Kabupaten Tangerang

No	Satuan Kerja	Lokasi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
1	KPU Kab. Pandeglang	Alun-Alun Pandeglang
2	KPU Kab. Lebak	La Tansa Masiro Rangkasbitung
3	KPU Kab. Tangerang	Lapangan Don Boscho
4	KPU Kab. Serang	Tennis Indoor Kabupaten Serang
5	KPU Kota Tangerang	Stadion Benteng dan Lapangan Ahmad Yani
6	KPU Kota Cilegon	Hotel Grand Royal Permata Cilegon
7	KPU Kota Serang	Gedung Sagara Lugina
8	KPU Kota Tangerang Selatan	Swissbell Hotel Tangerang Selatan

Tabel 4.25 Lokasi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah PPS

No	Nama Satker	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah PPS
1	KPU Kab. Pandeglang	35	339	1.017
2	KPU Kab. Lebak	28	345	1.035
3	KPU Kab. Tangerang	29	274	822
4	KPU Kab. Serang	29	326	978
5	KPU Kota Tangerang	13	104	312
6	KPU Kota Cilegon	8	43	129
7	KPU Kota Serang	6	67	201
8	KPU Kota Tangerang Selatan	7	54	162
Jumlah se-Provinsi Banten		**155**	**1.552**	**4.656**

Tabel 4.26 Jumlah Badan Adhoc PPS se-Provinsi Banten

No	Nama Satker	Jml Kec	Jml Kel /Desa	Jml Sekretaris	Jml Staf Sekretariat	Jml Total
1	KPU Kab. Pandeglang	35	339	339	678	1.017
2	KPU Kab. Lebak	28	345	345	690	1.035
3	KPU Kab. Tangerang	29	274	274	548	822
4	KPU Kab. Serang	29	326	326	652	978
5	KPU Kota Tangerang	13	104	104	208	312
6	KPU Kota Cilegon	8	43	43	86	129
7	KPU Kota Serang	6	67	67	134	201
8	KPU Kota Tangerang Selatan	7	54	54	108	162
Jumlah se-Provinsi		**155**	**1.552**	**1.552**	**3.104**	**4.656**

Tabel 4.27 Jumlah Sekretariat PPS se-Provinsi Banten

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pantarlih

Setelah dilaksanakananya pembentukan PPS dilanjutkan dengan Pembentukan Pantarlih. Tahapan pembentukan Pantarlih berdasarkan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota antara lain:

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pantarlih

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Pantarlih KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten berdasarkan Keputusan PPS, adapun jadwal dan tahapannya yaitu sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	17 Juni 2024
2	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	19 Juni 2024
3	Penelitian Administrasi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	20 Juni 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi calon Pantarlih/PPDP	21 Juni 2024	23 Juni 2024
5	Penetapan nama hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
6	Pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024
Masa Kerja Pantarlih/PPDP		24 Juni 2024	25 Juli 2024

Tabel 4.28 Jadwal Pembentukan Pantarlih

Gambar 4.52 Pendaftaran Pantarlih Kota Cilegon

2. Pengumuman

Tahapan dalam pembentukan Pantarlih dilaksanakan oleh PPS. Sehingga PPS yang telah dilantik sudah harus melaksanakan tugasnya yaitu membuat Pengumuman pendaftaran Pantarlih yang formatnya disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Gambar 4.53 Pelantikan Pantarlih Serentak di Kota Tangerang Selatan yang dihadiri Anggota KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos

No	Nama Satker	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih
1	KPU Kab. Pandeglang	35	339	1.926	3.654
2	KPU Kab. Lebak	28	345	2.062	3.862
3	KPU Kab. Tangerang	29	274	4.484	8.706
4	KPU Kab. Serang	29	326	2.355	4.528
5	KPU Kota Tangerang	13	104	2.706	5.173
6	KPU Kota Cilegon	8	43	646	1.225
7	KPU Kota Serang	6	67	992	1.899
8	KPU Kota Tangerang Selatan	7	54	2.060	3.893
Jumlah se-Provinsi		**155**	**1.552**	**17.231**	**32.940**

Tabel 4.29 Jumlah Pantarlih se-Provinsi Banten

Pelaksanaan Tahapan Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

Menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten melalui PPS melaksanakan pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang pada setiap TPS dan dibentuk oleh PPS.

Sementara Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang pada setiap TPS dan dibentuk oleh Keputusan Kepala Desa/Kelurahan dari unsur Pemerintah Daerah. Tahapan pembentukan KPPS berdasarkan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Sementara tahapan pembentukan Petugas Ketertiban TPS berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk Pemilihan Tahun 2024. Berikut ini adalah jadwal dan tahapan pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS:

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan KPPS pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten berdasarkan Keputusan PPS, adapun jadwal dan tahapannya yaitu sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	17 September 2024
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3	Penelitian Administrasi calon anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4	Pengumuman Hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5	Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6	Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7	Penetapan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8	Pelantikan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

Tabel 4.30 Jadwal Pembentukan KPPS

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja KPPS	7 November 2024	8 Desember 2024

Tabel 4.31 Masa Kerja KPPS

Adapun untuk Petugas Ketertiban TPS sebagaimana angka (4) Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk Pemilihan Tahun 2024.

KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan nama-nama calon Petugas Ketertiban TPS sejumlah kebutuhan sebelum penetapan anggota KPPS, yaitu paling lambat tanggal 7 November 2024 untuk sekaligus dilakukan penetapan.

2. Pengumuman

Tahapan dalam pembentukan Pantarlih dilaksanakan oleh PPS. Sehingga PPS yang telah dilantik sudah harus melaksanakan tugasnya yaitu membuat Pengumuman pendaftaran KPPS yang formatnya disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Gambar 4.54 Pelantikan KPPS Kecamatan Kedaleman Kota Cilegon

No	Nama Satker	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah KPPS	Jumlah Petugas Ketertiban TPS
1	KPU Kab. Pandeglang	35	339	1.926	13.482	3.852
2	KPU Kab. Lebak	28	345	2.062	14.434	4.124
3	KPU Kab. Tangerang	29	274	4.484	31.388	8.968
4	KPU Kab. Serang	29	326	2.355	16.485	4.710
5	KPU Kota Tangerang	13	104	2.706	18.942	5.412
6	KPU Kota Cilegon	8	43	646	4.522	1.292
7	KPU Kota Serang	6	67	992	6.944	1.984
8	KPU Kota Tangerang Selatan	7	54	2.060	14.420	4.120
Jumlah se-Provinsi		**155**	**1.552**	**17.231**	**120.617**	**34.462**

Tabel 4.32 Jumlah KPPS dan Petugas Ketertiban TPS se-Provinsi Banten

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

Penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA)

1. Maksud dan Tujuan

Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc, yaitu aplikasi yang bertujuan membantu proses pendaftaran dan pengelolaan data Anggota KPU dan Badan Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. SIAKBA merupakan aplikasi yang akan membantu proses administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc. Urgensi dari lahirnya SIAKBA, pertama adalah *database* para penyelenggara membutuhkan tempat tersendiri pada sistem digital. Dokumen-dokumen sangat banyak baik terkait dengan Anggota KPU dan Badan Adhoc. Dengan adanya digitalisasi ini akan lebih mudah melacak, walaupun dalam prosesnya dokumen fisik juga dibutuhkan utamanya dalam menghadapi sengketa dan verifikasi terkait dengan keabsahan dokumen. SIAKBA dirancang untuk melakukan *tracking* secara digital terkait dengan dokumen-dokumen penyelenggara pemilu.

Maksud dan Tujuan:

a. Untuk kebutuhan internal KPU memproses data yang berkaitan dengan Anggota KPU dan Badan Adhoc;
b. Digunakan untuk pendaftaran mandiri calon Anggota KPU dan Badan Adhoc dengan mengisi data pendaftaran dan mengunggah persyaratan secara digital; dan
c. Bentuk transparansi pada proses seleksi.

2. Alur dan Tata Kerja SIAKBA

a. Alur dan Tata Kerja pada aplikasi SIAKBA adalah sebagai berikut:

1. Fitur Jadwal dan Tahapan

Fitur untuk menyediakan pengaktifan dan penjadwalan tahapan pendaftaran Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menyesuaikan kebutuhan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Pendaftaran

Menu pada SIAKBA untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan pengisian form pendaftaran. Pada form ini terdapat berbagai data diri yang harus diisi dan dokumen yang harus diunggah untuk memudahkan dalam pendataan anggota KPU.

3. Penelitian Administrasi

Menu pada SIAKBA untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi dari pendaftaran calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. Fitur ini dapat menampilkan isi dokumen yang telah diunggah.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

4. Fitur Monitor Tahapan

Fitur pada SIAKBA untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang dilakukan.

5. Pengelolaan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Menu pada SIAKBA untuk melakukan pengelolaan terhadap hasil dari setiap tahapan dalam Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.

6. Fitur Pengangkatan Calon

Fitur pada SIAKBA untuk mengelola penginputan data bagi calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang diangkat secara definitif berdasarkan hasil dari seleksi yang telah dilakukan.

7. Fitur Manajemen PAW

Fitur pada SIAKBA untuk melakukan pengelolaan administrasi penggantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan melakukan peremajaan data terkait status keanggotaan.

8. Fitur Dashboard

Fitur pada SIAKBA untuk menyajikan data-data statistik dalam pendaftaran dan jumlah anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

b. Ilustrasi Alur Penggunaan SIAKBA bagi Pendaftar

Berikut ini adalah gambar ilustrasi alur penggunaan aplikasi SIAKBA bagi Pendaftar:

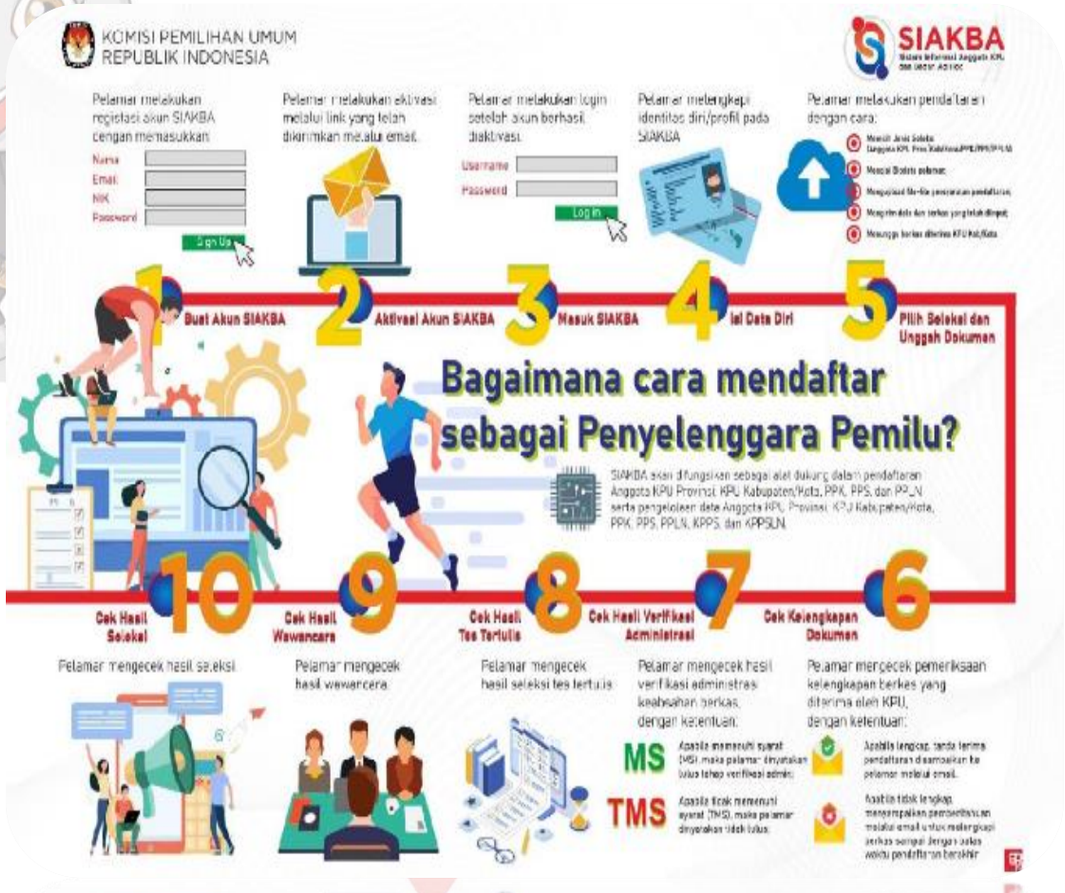

Gambar 4.55 Alur Penggunaan SIAKBA

6. Pelaporan dan Audit

Hasil evaluasi ini menunjukkan adanya beberapa kasus keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh badan Adhoc. Meskipun keterlambatan ini sering terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu, namun pada akhirnya seluruh laporan pertanggungjawaban tetap dapat diselesaikan. Proses pelaporan yang terlambat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk beban administrasi yang besar, kurangnya pemahaman teknis dari anggota badan Adhoc , atau kendala logistik di daerah terpencil.

Meskipun demikian, walau ada keterlambatan, terselesaikannya semua laporan menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah berjalan cukup baik, dengan mekanisme pemantauan dan penyelesaian yang memastikan bahwa setiap laporan dapat dilengkapi.

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan, diperlukan pelatihan yang lebih baik serta dukungan teknis dan administratif bagi badan Adhoc , sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun pelaporan dan audit menghadapi tantangan waktu, kemampuan untuk menyelesaikan semua pertanggungjawaban tetap menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

7. Kerja Sama Kelembagaan

Penyelenggaraan pemilu memerlukan kerja sama yang baik dengan semua pihak untuk mengoptimalkan kualitasnya. Dalam kaitan dengan kerja sama ini, KPU Provinsi telah melakukan dengan berbagai pihak.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

Matrik Kerja Sama yang sudah dilaksanakan KPU Provinsi Banten

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : 59/SR.06-SD/36/2024
Tanggal : 19 Februari 2025

MATRIKS EVALUASI KERJASAMA ANTARA KPU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI MITRA KERJA SAMA

NAMA SATUAN KERJA : KPU PROVINSI BANTEN

NO	NAMA MITRA*	JUDUL KERJA SAMA		WAKTU PELAKSANAAN**	HASIL KERJA SAMA***	KENDALA	TINDAK LANJUT****
		NOTA KESEPAHAMAN	PERJANJIAN KERJA SAMA				
1	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	900.1.10/3840-Kesbangpol/2023 DAN 18/PR.07/36/2023	NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN	8 November 2023	Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Tidak Ada	Kerjasama selama tahapan Pemilihan 2024
2	KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	4/PR.08-PKS/36/2024 DAN NKS-04/M.6/GS/05/2024	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	29 MEI 2024	Penerangan dan penyuluhan hukum; Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Pengamanan Pembangunan Strategis; Peningkatan Kapasitas SDM dan Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Tidak Ada	Kerjasama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani
3	RS DAERAH PROVINSI BANTEN	05/PR.08-PKS/36/2024 DAN T-100.3.7/2829/RSUB/2024	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024	23 AGUSTUS 2024	Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II	Tidak Ada	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tahapan dari tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2024
4	BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH BANTEN	PER/7/112024 DAN 12/PR.07-PKS/36/2024	PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BADAN ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN	11 November 2024	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Wilyah Provinsi Banten; Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian terhadap Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Wilyah Provinsi Banten	Tidak Ada	Kerjasama selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 11 November 2024 sampai dengan 31 Januari 2025
5	KEPOLISIAN DAERAH BANTEN	16/PR.08-PKS/36/2023 DAN PKS/69/X/HUK.8.1.1./2023	SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI DAERAH HUKUM POLDA BANTEN	6 Oktober 2023	Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; bantuan pengamanan; penegakan hukum; perumusan peraturan teknis; peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Tidak Ada	Kerjasama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 6 Oktober 2023 yaitu berakhir pada tanggal 6 Oktober 2028
6	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR BRI CABANG SERANG	3382-KC-XV/PKS/12/2023 DAN 22/PR.08-PKS/36/2023	BANK PENAMPUNGAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024	22 November 2023	Penampung Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Tidak Ada	Kerjasama selama tahapan Pemilihan 2024

Tabel 4.33 Matrik Evaluasi Kerja Sama antara KPU Provinsi Banten dengan Instansi Lain

4.3. Hambatan dan Kendala

Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, KPU Provinsi Banten tentu tidak lepas dari Hambatan dan kendala, mengingat tahapan pilkada juga beririsan dengan tahapan Pemilu 2024, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Berikut beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh KPU Provinsi Banten:

1. Terdapat Perbedaan pemahaman terkait Regulasi Pendanaan, Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Hibah antara KPU Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, KPU Provinsi Banten mengaju pada Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2020, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur, tetapi setelah dilakukan pembahasan bersama Tim TAPD Provinsi Banten dan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akhirnya sepakat mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2020, hal ini ditindaklajuti oleh KPU Provinsi Banten dengan mengadakan Rapat Koordinasi Penyamaan Pemahaman dan akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
2. Pelaporan Dana Kampanye Calon baik LADK, LPSDK, dan LPPDK tim pasangan calon melaporkannya selalu diakhir masa pelaporan, hal tersebut diakibatkan kesulitan pengumpulan data administrasi pelaporan dana kampanye.
3. Timeline pengadaan logistik yang singkat, maka dari itu KPU Provinsi Banten membagi kewenangan Pengadaan Logistik ke Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota agar terwujudnya pengadaan logistik yang efektif dan efisien.
4. Kurangnya jumlah personil petugas di Gudang penyimpanan logistik karena terbatasnya anggaran dalam rekrutmen petugas gudang menyebabkan tumpang tindihnya tupoksi petugas gudang sehingga pengelolaan logistik menjadi tidak maksimal.
5. Dalam pelaksanaan sortir lipat suara yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun Adhoc masih sering terjadi kesalahan yang mempengaruhi jumlah surat suara sehingga menyebabkan permintaan kembali kekurangan surat suara ke penyedia yang dapat menghambat ketepatan waktu dalam kegiatan setting dan packing logistik. Sehingga diperlukan konsultan pengawas agar dalam pelaksanaan sortir lipat tepat waktu dan tepat jumlah. Tidak adanya tenaga pengawas, menyebabkan jumlah surat suara yang tersortir menjadi tidak akurat.

6. Sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc yang berada di perkotaan sudah memadai tetapi untuk badan adhoc yang berada didaerah yang mengalami kendala dalam jaringan internet masih tidak maksimal sehingga persentase upload bukti pertanggungjawaban keuangan badan adhoc relatif kecil.
7. Jadwal tahapan pembentukan badan adhoc yang sangat sempit, diperlukan waktu pendaftaran yang lebih panjang, sehingga sosialisasi pendaftaran adhoc dapat menjangkau masyarakat secara luas.
8. Proses reset akun pendaftar yang mengalami gagal login dilakukan hanya terpusat di Admin Super (KPU Republik Indonesia), admin untuk reset akun Siakba dapat didelegasikan ke KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota agar proses reset akun dapat lebih cepat ditangani.
9. Biaya cek kesehatan untuk Calon Pendaftar Badan Adhoc yang tidak terjangkau, mengakibatkan sedikitnya minat pendaftar, KPU perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan agar dapat dibuat kebijakan tarif khusus untuk calon pendaftar Badan Adhoc.
10. Kendala yagn dihadapi KPU Provinsi Banten pada proses Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah struktur dinamika kependudukan masyarakat Banten punya variasi yang tinggi, kemudian multikulturalnya masyarakat Banten yg bermacam2 membuat metode Sosdiklih KPU Banten harus lebih variatif.

4.4. *Success Stories, Lesson Learned dan Best Practice*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 merupakan Pemilihan Kepala Daerah serentak atara Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang pertama kali dialami oleh KPU Provinsi Banten. Ini merupakan *Success Stories, Lesson Learned dan Best Practice* yang dapat dijadikan pemberlajaran dimasa yang akan datang. Dimulai dengan proses perencanaan penganggaran, KPU Provinsi Banten bersama KPU Kabupaten/Kota telah sukses melakukan koordinasi sehingga menghasilkan kebijakan pembagian wewenang pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 200/Kep.222-Huk/2022 tentang Komponen Pendanaan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Banten yang terbit pada tanggal 6 September 2022.

Kemudian, dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, masih berhimpitan dengan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri untuk jajaran KPU. Kinerja yang dilakukan oleh jajaran KPU menunjukkan berhasilnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024.

Penggunaan sistem informasi juga dapat dijadikan pembelajaran untuk penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan kedepan. Sistem informasi yang digunakan oleh KPU cukup membantu penyelenggaraan tahapan Pilkada. Dalam pengelolaan pencalonan KPU menggunakan aplikasi Silonkada, yang mudah diakses oleh pasangan calon kepala daerah, dalam pengelolaan logistik, adanya aplikasi Silog cukup membantu KPU untuk mengelola logistik mulai dari proses produksi hingga distribusi ke TPS. Penggunaan Aplikasi E-Coklit dan Sidalih dalam pemutakhiran Data Pemilih juga cukup membantu KPU.

Kemudian, aplikasi lain seperti Sikadeka, membantu KPU mengakses pelaporan Dana Kampanye dari pasangan calon kepala Daerah. Aplikasi Siakba, yang digunakan dalam proses rekrutmen Badan Adhoc juga efektif digunakan pada saat pendaftaran Badan Adhoc. Aplikasi Sitab untuk pelaporan pertanggung jawaban Badan Adhoc juga dimanfaatkan dengan baik. Pada proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS hingga ke KPU Provinsi, penggunaan Aplikasi Sirekap juga lebih baik jika dibandingkan pada Pemilu 2024.

Penggunaan sistem informasi ini, meskipun belum sempurna namun cukup mendukung kinerja KPU dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Penyempurnaan terus menerus harus dilakukan agar Sistem Informasi yang telah dimikili oleh KPU dapat semakin memudahkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dimasa yang akan datang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dengan melibatkan KPU Kabupaten/Kota serta pihak eksternal yang terdiri atas akademisi, pemantau pemilu, Media, dan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 telah menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diolah menjadi informasi sehingga menghasilkan potret penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Berbagai capaian dan keberhasilan dapat diidentifikasi bersama dengan beberapa daftar masalah yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

A. Simpulan

Hasil Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang penyelenggaraannya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimulai pada Februari 2024, secara umum telah berjalan dengan baik dan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai prinsip penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mencakup mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Namun demikian, beberapa permasalahan masih perlu menjadi area perbaikan. Pada aspek tata kelola pendaftaran pemilih, secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu mewujudkan asas umum dan prinsip jujur, adil, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Beberapa permasalahan dan kendala yang masih perlu diperbaiki khususnya terkait dengan akurasi data pemilih, koordinasi dengan pemerintah selaku penanggungjawab data kependudukan untuk meningkatkan kualitas DP4, transparansi dan aksesibilitas data pemilih, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan peserta pemilu dalam pencermatan dan perbaikan daftar pemilih melalui aplikasi Sidalih.

Pada aspek tata kelola tahapan pendaftaran peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, permasalahan masih muncul dan perlu masuk dalam area perbaikan di masa mendatang, Dalam tahapan pencalonan hal yang masih terjadi perbedaan perlakuan dalam pemenuhan dokumen syarat calon, diantaranya penerbitan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Ada yang mengahuruskan dari Pengadilan Tata Niaga, ada juga yang memperbolehkan dari Pengadilan Negeri dari instansi terkait, sementara dalam PKPU disebutkan dari Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya. Dokumen lainnya juga dalam hal keterangan tidak pernah terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum tempat tinggal sesuai dalam KTP, ini juga tidak dapat mencakup jika calon yang bersangkutan melakukan tindakan pidana diluar wilayah hukum tempat tinggal, hal tersebut dikarenakan catatan kejahatan seseorang tidak terintegrasi secara nasional datanya pada lembaga yang berwenang tersebut, sehingga jika Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum mengeluarkan bahwa yang berangkutan tidak pernah dihukum pidana penjara ini bisa keliru, karena Pengadilan Negeri tersebut tidak mendapatkan informasi bahwa calon tersebut pernah dipidanan di wilayah hukum lain. Rekomendasi dari kedua kondisi tersebut maka KPU harus lebih intens dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan syarat calon kepala daerah.

Pada aspek tata kelola tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pencegahan atas kemungkinan terulangnya tragedi kelelahan fisik KPPS dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang muncul justru terkait dengan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS dalam mengunggah data hasil penghitungan suara. Kendala muncul terkait dengan sulitnya akses ke aplikasi, dan akurasi data hasil penghitungan suara yang terekapitulasi secara real time oleh Sirekap. Meskipun demikian, penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 sudah lebih baik dibandingkan pada Pemilu 2024.

B. Saran

Hasil Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 menunjukkan capaian-capaian yang baik dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada hal yang harus disempurnakan, oleh karenanya, beberapa saran perbaikan diajukan untuk internal KPU Provinsi Banten maupun kepada pihak eskternal.

B.1. Perbaikan Tata Kelola Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Saran dan Perbaikan terkait tata kelola perencanaan penganggaran diantaranya adalah terbitnya PKPU 2 tahun 2024 yang mengatur tahapan dan jadwal Pilkada 2024 dengan durasi tahapan yang relatif lebih pendek, membuat perencanaan penganggaran yang telah direncakan dari tahun 2023 tidak efisien dan menyisakan anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang relatif banyak.

Pada tata kelola Hukum dapat diberika saran agar PKPU dan juknis lainnya yang sering kali dirilis terlalu mendekati waktu pelaksanaan tahapan dapat dievaluasi sehingga PKPU dan Junkis lainnya dapat terbit terlebih dahulu. Apabila terlalu mendekati waktu pelaksanaan tahapan dapat menyulitkan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyesuaian dengan aturan baru dan meningkatkan risiko ketidaksiapan dalam menjalankan prosedur yang diatur.

Tata kelola kampanye, diantaranya pada proses kampanye rapat umum, dirasa waktu risil SK 1 hari sebelum pelaksanaan Kampanye metode Rapat Umum terlalu sempit untuk proses koordinasi dengan berbagai pihak.

Tata kelola pemutakhiran data pemilih, evaluasi perbaikan pada PKPU untuk Pilkada terkait pemutakhiran data pemilih selanjutnya, diantaranya : Penambahan Formulir Surat Pernyataan Pemilih yang telah meninggal Dunia, menyesuaikan dengan tahapan pencalonan, pada pasal 22 ayat 3 peserta rapat pleno diantaranya tim Pasangan Calon sedangankan di tahapan pencalonan belum ada penetapan calon kepala daerah. Kemudian pada aplikasi E-coklit diantaranya adalah agar aplikasi dapat digunakan pada IOS, dan ditambahkan fitur laporan digital seperti pada format isian di buku kerja. Untuk aplikasi sidahlih, dapat ditambah fitur Generate Berita Acara, dan terintegrasi dengan data kependudukan yang update.

B.2. Perbaikan Tata Kelola Non Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Pada tata kelola pengelolaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan pihat terkait sudah berjalan dengan baik, namun sering kali ketika proses perijinan dari KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota ke KPU RI memerlukan waktu yang relatif lama.

Pada tata kelola pengelolaan logistik, perlu waktu yang lebih panjang dalam pengelolaan logistik hingga distribusi sampai ke TPS, selain itu, perlu adanya pengawas untuk petugas sortir dan lipat di Gudang, agar penghitungan logistik yang datang dapat lebih akurat.

B.3. Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

Tata kelola Sosialisasi Pemilu dan Partisipasi Masyarakat. Saran perbaikan pada bidang ini meliputi: perbaikan mekanisme penganggaran dan implementasi kegiatan sosialisasi agar lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik dan kondisi lokal supaya dapat lebih menjangkau masyarakat di daerah terpencil; optimalisasi pelibatan kelompok rentan, masyarakat adat, wilayah perbatasan dan disabilitas; serta optimalisasi materi sosialisasi untuk mencegah politik uang.

Pengelolaan Keuangan. Saran perbaikan pada aspek ini berupa perbaikan kepatuhan (terutama waktu) pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit.

Monitoring dan Evaluasi. Pada aspek ini, saran perbaikannya adalah peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan regular untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

BAB VI

PENUTUP

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 merupakan salah satu sarana bagi rakyat selaku pemilik kedaulatan untuk melaksanakan haknya secara langsung dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Pilkada bukan sekedar "pesta demokrasi", tetapi memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam kehidupan ketatanegaraan di dalam sebuah negara yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2005 telah mengalami banyak perkembangan dan perbaikan baik dari sisi sistem kepemiluan, maupun prosedur teknis penyelenggaraan, hingga kelembagaan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Khususnya di Provinsi Banten proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung mulai diselenggarakan pada tahun 2006, kemudian dilaksankan kembali pada tahun 2011, dan kemudian di tahun 2017. Karena ada perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang diserentakkan, sehingga Provinsi Banten kembali menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2024.

Tidak hanya itu, jadwal penyelenggaraan Pilkada yang semakin menuju ke arah keserentakan jadwal untuk mendorong efisiensi, serta penggunaan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Tidak dapat dipungkiri, meskipun pengalaman dalam penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan secara reguler, namun kendala, hambatan, dan permasalahan tetap saja selalu muncul dalam setiap penyelenggaraannya.

Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, tetapi juga semakin besarnya jumlah pemilih, semakin banyaknya jumlah wilayah administratif pemerintahan yang terlibat, dan juga semakin beragamnya tantangan modern yang mempengaruhi penyelenggaraan. Kegiatan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 yang dilakukan KPU Provinsi Banten ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan integritas, tata kelola penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu, serta tata kelola kelembagaan KPU.

Kegiatan evaluasi ini juga berusaha menilai integritas penyelenggaraan dengan mengukur ketercapaian dan jaminan atas pemenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta pemenuhan asas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Kegiatan evaluasi ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi untuk internal KPU dalam rangka perbaikan tata Kelola Pilkada, namun juga rekomendasi bagi pihak-pihak eksternal. Dan yang tak kalah pentingnya, evaluasi ini juga menghasilkan standar model evaluasi Pilkada yang akan dapat dijadikan acuan bagi KPU dalam pembuatan evaluasi pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Anna Mergoni Kristof De Witte. 2021. “Policy evaluation and efficiency: a systematic literature review”. International Transactions in Operational Research. DOI: 10.1111/itor.13012

Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Dunn, William. 2014. Public Policy Analysis: Dunn 5th Edition. Pearson Education Limited. Essex.

Elisabeth Carter & David M. Farrell. 2010. “Electoral Systems and Election Management”. dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris (eds.) Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century. SAGE Publications Ltd. hal. 2021. DOI:https://doi.org/10.4135/9781446288740

Hind Al Hudib, J. Bradley Cousins. 2021. “Evaluation policy and organizational evaluation capacity building: A study of international aid agency evaluation policies”. https://doi.org/10.1002/ev.20494

James E Anderson. 1975. Public Policy-making. University of California.

SAYANGI BANTENMU
COBLOS PILIHANMU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, No. 7A, Kel. Banjar Agung,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
Tlp. (0254) 216106, Email: humas.kpubanten@gmail.com
banten.kpu.go.id KPU Provinsi Banten @kpubanten
kpuprovinsibanten KPU Provinsi Banten kpu_banten